

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON



Penulis:

HARRYANTO LASUT
ROBBY GOLIOH
STENLY KOWAAS
ALBERTIEN PIJOH
JACOBUS WOWOR
STELLA SOMPE



PILKADA

ERA PANDEMI

POTRET PEMILIHAN SERENTAK 2020
DI KOTA TOMOHON

Editor:
STENLY KOWAAS

jdih.kpu.go.id



JUDUL:
PILKADA ERA PANDEMI

Penulis:
Harryanto Lasut
Robby Golioth
Stenly Kowaas
Albertien Pijoh
Jacobus Wowor
Stella Sompe

Desain Sampul dan Tata Letak:
Claudio Kaunang

Editor:
Stenly Kowaas

Penyelaras:
Wailan Montong
Harry Paat

ISBN:
978-623-6183-06-9

Cetakan Pertama:
April 2021

PENERBIT KPU KOTA TOMOHON
(Jalan Raya Tomohon-Manado, Kelurahan Kakaskasen III,
Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, Sulawesi Utara

No Telpon: 0431-356933

website: kota-tomohon.kpu.go.id

E-mail: kota_tomohon@kpu.go.id

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

KATA SAMBUTAN

Dr. ARDILES MEWOH SIP MSI

(Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara)

Usai melewati Pemilu 2019 yang dinamikanya begitu hebat dan melelahkan, KPU dan jajaran menatap pemilihan serentak 2020 dengan lebih percaya diri. Asumsi waktu itu sederhana; Mengurus lima surat suara saja bisa, masa Pilkada yang hanya dua surat suara tidak bisa?

Tahapan Pilkada akhirnya dimulai pada akhir 2019. Awalnya semua berjalan seperti biasa. Anggaran yang bersumber dari hibah pemerintah daerah relatif aman, proses pemutakhiran data dimulai, dan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) praktis tanpa kendala berarti. KPU Provinsi Sulawesi Utara dan kabupaten/kota penyelenggara bahkan sudah menggelar *launching*.

Awal 2020 semua berubah sejak Covid-19 mulai merajelala di Indonesia. Benar saja, 21 Maret 2020 keluar surat ketua KPU RI bahwa tahapan Pilkada ditunda. Hampir

tiga bulan offline, muncul Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020. Perppu yang diteken Presiden Joko Widodo 4 Mei 2020 ini menjelaskan hari H pemungutan suara ditunda 9 Desember 2020.

Beleid ini otomatis mewajibkan KPU melanjutkan tahapan Pilkada. Oleh karena itu diterbitkanlah PKPU Nomor 5 Tahun 2020 yang menjadi payung hukum secara teknis buat jajaran KPU dalam melanjutkan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020. 15 Juni 2020 tahapan Pilkada lanjut lagi, tapi suasananya benar-benar berbeda. Semua tahapan dilaksanakan dalam bingkai kenormalan baru. Protokol kesehatan pencegahan Covid-19 diterapkan secara maksimal. Tantangan sekaligus tekanan di Pilkada kali ini jadi lebih tinggi. Prediksi awal bahwa Pilkada akan landai-landai saja langsung lenyap.

Menggelar Pilkada di era Pandemi Covid-19 benar-benar jadi pengalaman baru, karena kali ini KPU tidak hanya hanya mengurus aspek teknis yang ada kaitannya dengan elemen *electoral*. Waktu, tenaga dan pikiran justru terkuras

untuk hal-hal yang sifatnya non *electoral*. Justru jauh lebih melelahkan dibanding Pemilu 2019.

Dengan dinamika yang luar biasa hebat, tantangan yang sedemikian tinggi, KPU Tomohon tetap bisa menuntaskan Pilkada dengan baik. Tahapan data pemilih yang luar biasa panjang dan melelahkan tereksekusi dengan maksimal, rekrutmen tenaga adhoc yang kali ini menuntut banyak hal bisa dilalui, begitu juga dengan tahapan kampanye, pengadaan logistik, pencalonan sampai proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi relatif tidak ada masalah pelik. Yang mengesankan, tidak ada gugatan atau sengketa perolehan suara di Mahkamah Konstitusi. Sebuah gambaran singkat bahwa kerja-kerja KPU Tomohon dan jajaran diapresiasi semua kontestan Pilkada.

Dengan suka duka yang sedemikian menggetarkan, saya berkeyakinan bahwa sudah selayaknya KPU Kota Tomohon mengabadikan perjalanan gelaran pesta demokrasi dari sudut pandang penyelenggara ke dalam sebuah buku berjudul Pilkada di Era Pandemi. Secara personal maupun mewakili kelembagaan saya memberikan apresiasi kepada

KPU Tomohon, khususnya tim penulis, karena menampilkan sejumlah sisi lain penyelenggara dan penyelenggaraan yang selama ini tidak terekam publik, termasuk ulasan detail terkait metode-metode sosialisasi yang progresif dan inovatif, yang kemudian berujung pada capaian tingkat partisipasi pemilih tertinggi se-Indonesia kategori kota.

Tanpa keraguan saya meyakini buku ini bisa memperkaya literasi demokrasi, serta menambah khazanah berpikir semua pihak yang *concern* dengan dunia kepemiluan yang berkualitas dan berintegritas di waktu yang akan datang.

(*)

DAFTAR ISI

Tim Penyusun - i

Kata Sambutan - ii

Daftar Isi - vi

Kata Pengantar - vii

BAGIAN 1 Potret Pilkada 2020 di Tomohon - 1

- Sebuah Refleksi: Membuka Tabir Gelap Kepercayaan Publik Terhadap KPU

Harryanto Lasut - 3

- Pilkada Damai Untuk Semua

Robby Goliath - 34

- Kearifan Lokal: “Baku Kase Inga”

Jacobus Wowor - 54

- Sinergitas Komisioner Sekretariat, Tahapan Pilkada Lancar

Stella Sompe - 63

BAGIAN 2 Strategi Sosialisasi dan Dinamika Partisipasi Masyarakat - 71

- Transformasi Sosialisasi

Stenly Kowaas - 73

- Catatan Kecil Jalan Panjang Menuju DPT

Albertien Pijoh - 105

- Rawat Partisipasi, di Saat Pandemi

Stenly Kowaas - 117

BAGIAN 3 Testimoni Anggota-anggota PPK - 159

BAGIAN 4 Kata Mereka Soal Pilkada (Pimpinan Parpol, Kontestan Pilkada, Jurnalis - 293

BINGKAI PILKADA - 303

DAFTAR PUSTAKA - 306

KATA PENGANTAR

Sejak keran Pemilihan Serentak (Pilkada) 2020 dibuka ulang pada Juni 2020, keinginan KPU Kota Tomohon untuk menuangkan perjalanan tahapan Pilkada dalam bentuk buku sudah bulat. Seperti ada tanggung-jawab moral untuk meninggalkan *legacy* formal yang bisa dikenang, sekaligus referensi buat masyarakat khususnya penyelenggara Pemilu di episode-episode yang akan datang. Selain itu, pesta demokrasi di tengah keputungan Pandemi Covid-19 terlalu sayang jika tidak dibukukan. Segala hal yang dibutuhkan untuk menulis buku tersedia, khususnya momen-momen menarik, unik dan dramatis. Dan lagi, sebagai orang yang pernah jadi jurnalis selama belasan tahun, rasanya keterlaluhan jika melewatkannya begitu saja.

Inilah kali pertama Indonesia dan bahkan dunia diperhadapkan dengan pemilihan calon pemimpin di tengah kecemasan dan ketakutan penyebaran sebuah virus yang menular sedemikian cepat. Lazimnya peristiwa perdana, segala sesuatu jadi serba menantang bagi yang akan mengambil keputusan maupun pelaksana putusan. Itu karena

semuanya miskin data pembanding. Keputusan yang diambil lebih didasarkan pada rasionalitas dan objektivitas, dengan mitigasi masalah yang cenderung parsial. Belum pasti dan berkelanjutan. Sewaktu-waktu bisa diubah, dibenahi dan disempurnakan. Sesuai kebutuhan di lapangan. Demi kebaikan bersama.

KPU Tomohon merasakan benar itu. Di beberapa tahapan Pilkada, sejumlah hal terpaksa tidak bisa ‘*saklek*’. Tidak serta merta jalan begitu saja. Biasanya harus ada koordinasi dulu dengan Satgas Covid-19 setempat. Sering juga di Bawaslu Tomohon. Jika direkomendasikan tidak memungkinkan karena berbenturan dengan protokol penanganan pencegahan Covid-19, kami wajib dimaklumi. Begitu juga peserta Pilkada. Sama halnya dengan teman-teman Bawaslu. Semua sepakat: Pilkada penting tapi keselamatan jiwa lebih penting. Jujur saja, elemen protokol pencegahan Covid-19 di setiap tahapan membuat segala sesuatu menjadi jauh lebih melelahkan. Energi banyak terkuras untuk hal-hal yang *non electoral*. Hukum alamnya semua sudah tahu. Jika psikologis terganggu, fisik otomatis terpengaruh. Bahkan saat segala macam asupan (makanan

dan vitamin) tersedia setiap saat. Sebagai penyelenggara di Pilkada sebelumnya, mengomparasikan kadar kesulitan Pemilu lokal 2015 dan 2020 tentu tidak terlalu sulit buat saya. Tidak ada keraguan bagi saya untuk menyimpulkan bahwa Pilkada 2020 jauh lebih tinggi level kesulitannya.

Dalam banyak kesempatan, kami dianggap lebih galak terkait protokol Covid-19 dibanding hal-hal teknis terkait tahapan Pilkada. Beberapa teman media malah sambil berguyon menyebut KPU Tomohon ibarat tenaga *marketing election*. Tidak sekadar inovatif dalam sosialisasi, tapi juga kreatif mengemas konten terkait anjuran memenuhi protokol Covid-19 dalam setiap tahapan Pilkada. Ada benarnya memang. Tugas kami memang bertransformasi dari sekadar meng-*create* Pilkada sebagai *brand product* untuk ‘dijual’ ke pemilih sebagai calon *customer*, tapi melebar jadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyosialisasikan protokol covid-19. *Market*-nya makin luas dan menantang.

Semua jenis tahapan otomatis jadi serba tak leluasa dijalankan. Pemutakhiran data pemilih jadi makin kompleks masalahnya, karena tahapan ini masih dilakukan secara

konvensional. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) harus *on the spot* di rumah pemilih. Kontak langsung tak dihindarkan. Meski anggota PPDP dilengkapi perlengkapan lengkap seperti masker, *faceshield*, sarung tangan dan *handsanitizer*, banyak calon pemilih yang takut didatangi. Respon yang manusiawi di tengah kecemasan infeksi Covid-19.

Urusan data di lapangan belum tuntas, KPU Tomohon sudah harus jalan dengan tahapan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan. Hampir sama tantangannya dengan pemutakhiran data pemilih, karena petugas di lapangan dalam hal ini Panitia Pemungutan Suara (PPS) harus *face to face* dengan warga yang masuk daftar pendukung. Protokol sudah pasti. Perlengkapan buat PPS komplit. Tapi kecemasan tetap tinggi. Apakah itu pendukung, maupun PPS itu sendiri.

Selain dua tahapan di atas, tantangan terberat dirasakan dalam proses sosialisasi dan pendidikan pemilih. Di segmen-segmen pemilih tertentu, semisal pemilih yang lanjut usia (Lansia), konsep tatap muka masih begitu *powerfull impact*-nya. Begitu juga dengan kaum difabel. Tapi

mau apa lagi. Satu hal yang pasti, siapapun tidak boleh menyerah dengan situasi. Ujian pemimpin sebenarnya dilihat kemampuannya mengatasi masalah di saat-saat sulit. Capaian tinggi saat kondisi normal tentu saja hal yang biasa. Meraihinya di situasi abnormal, itu baru spesial. *Mindset* ini terus kami rawat supaya totalitas tetap konsisten.

Usai Pilkada 2020 digelar, Tomohon dinobatkan sebagai daerah dengan tingkat partisipasi tertinggi kategori kota. Capaiannya memang di luar ekspektasi awal; 91,35 persen. Indikatornya banyak. Kami akan menceritakan sedetail dengan secermat mungkin di dalam buku ini. Termasuk hal-hal *behind the scene*, yang selama ini tidak diketahui masyarakat Tomohon. Meski begitu, buku ini tentu saja jauh dari sempurna. Tapi kalau buku ini bisa menyita 30-60 menit waktu baca Anda, tentu saja kami akan sangat senang.

Tomohon, April 2021

Stenly Kowaas

(Ketua Tim Penulis Buku)

BAGIAN 1

POTRET
PILKADA
DI TOMOHON



LEADERSHIP: Ketua KPU Tomohon Harryanto Lasut

KEPEMIMPINAN BERINTEGRITAS

Sebuah Refleksi: Membuka Tabir Gelap
Kepercayaan Publik Terhadap KPU

HARRYANTO LASUT

(Ketua KPU Kota Tomohon)

SEJAK tahun 1955 Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum (Pemilu) dan tahun tersebut menurut catatan sejarah merupakan awal dari proses demokrasi yang

dilakukan oleh bangsa yang secara demografi merupakan jumlah penduduk kelima terbesar di dunia, dan secara geografis wilayahnya terdiri dari beribu pulau dengan *culture* berbeda pada masing masing daerah.

Gambaran di atas, bagi kalangan tertentu, dianggap tidak mudah membangun demokrasi seperti layaknya negara-negara lain. Namun perjalanan waktu mencatat, tantangan tersebut bukan penghalang untuk membangun demokrasi di Indonesia. Sebuah keniscayaan bahwa demokrasi adalah pintu masuk bagi sebuah bangsa untuk menuju bangsa yang besar dan kuat. Dan oleh karena itu, melalui perjuangan panjang para pendiri bangsa menggoreskannya dalam hukum negara lewat pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang dimaknai sebagai ‘kedaulatan negara ada di tangan rakyat’.

Sejak era orde lama sampai era orde baru, begitu banyak model dan sistem demokrasi yang ditetapkan dan dilaksanakan. Seiring berakhirnya era orde baru, era reformasi sebagai sebuah era perubahan dalam sejarah demokrasi Indonesia, hadir bagi masyarakat. Perubahan yang paling mendasar yaitu dalam proses Pemilu, dalam hal

ini penyelenggaranya. Hal ini jelas tertuang pada pembukaan UUD 1945 hasil amandemen, pasal 22E ayat 5; Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat tetap dan mandiri.

Ada dua kata ini: Tetap dan mandiri. Bila dimaknai, kata ‘tetap’ tentunya lebih pada ciri kelembagaan. Sementara ‘mandiri’ adalah manusia atau sumber daya manusia sebagai pengelola atau penyelenggara dalam lembaga penyelenggaraan Pemilu.

Kata ‘mandiri’ merupakan filosofi serta nilai universal bagi karakter manusia dalam peran serta pengabdian pada bangsa dan negara. Filosofi kemandirian tidak terlepas dari syarat mutlak bagi penyelenggara yang berintegritas. Karakter manusia yang berintegritas sangatlah tidak mudah dijalankan dan diimplementasikan dalam tugas wewenang, apalagi bila dipercayakan oleh negara untuk memimpin sebuah lembaga dalam hal ini lembaga penyelenggara Pemilu. Ya. Karena aktivitasnya sangat beririsan dengan begitu banyak kepentingan politik, baik peserta Pemilu, masyarakat dan *stakeholder* lainnya, tidak

sedikit penyelenggara Pemilu yang berakhir dengan tragis. Mulai dari diberhentikan dari jabatan oleh keputusan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), sampai berakhir di jeruji penjara karena kasus pidana.

Apalagi bila kita melihat sejarah Pemilu pada era masa lalu, yang secara jujur ingin dikatakan menimbulkan stigma buruk masyarakat, terutama bila menyorot nilai integritas penyelenggara Pemilu. Dengan kata lain, tingkat kepercayaan masyarakat belum mencapai titik yakin bahwa penyelenggara Pemilu akan menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diinginkan dan digariskan oleh peraturan yang berlaku.

Khawatiran masyarakat soal hasil Pemilu (boleh diatur atau direayasa) dan keterpihakan (tidak netral), masih menjadi stigma buruk yang sekaligus jadi tantangan terberat dalam menghasilkan Pemilu yang jujur adil dan bermatabat. Di sisi lain, sebagai penyelenggara dalam menjalankan tugas dan kewenangan, wajib menjaga kemitraan yang sejuk dan konstruktif dengan pemerintah, peserta Pemilu, masyarakat

dan penyelenggara lainnya dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta diawasi DKPP.

Dengan kata lain, bila dimaknai dengan nilai pengabdian seseorang anak bangsa, ibarat bekerja dalam ruang gelap agar mampu dan tegak berjuang membangun kepercayaan masyarakat sehingga nilai-nilai kedaulatan rakyat dapat dicapai. Harapan nilai kedaulatan rakyat dengan bobot yang baik bisa dipenuhi bila makna ‘integritas’ dipegang teguh sebagai kekuatan untuk berjuang melenyapkan stigma buruk walau harus bekerja dalam ruang gelap.

Goresan cerita sebagai refleksi pengalaman sosok anak bangsa yang terpanggil dalam pengabdian sebagai penyelenggara Pemilu, tidaklah cukup menggambarkan secara keseluruhan nilai-nilai integritas sebagai *basic moral* dan etik dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin. Lebih dari itu, meski hasil yang dicapai walau belum sempurna, sebab kesempurnaan manusia tercipta dan dikenang ketika manusia itu telah tiada (mati), tulisan ini setidaknya dapat memberikan harapan serta keyakinan kepada penyelenggara

di waktu yang akan datang, bahwa dedikasi dan integritas adalah fondasi utama dalam menjalankan tugas.

Memimpin lembaga penyelenggara Pemilu tentunya sangat berbeda bila dibandingkan dengan lembaga lainnya. KPU daerah berdasarkan perundang-undangan, membawahi sejumlah penyelenggara Pemilu yang bersifat adhoc (PPK, PPS, KPPS dan PPDP). Kota Tomohon sendiri ‘mengoleksi’ 2.460 tenaga adhoc. Angka ini akan bertambah bila dihitung dengan jumlah staf sekretariat KPU Tomohon. Mungkin untuk beberapa kalangan tertentu bila dibandingkan dengan luas geografis serta jumlah struktur pemerintahannya, tergambar kecil dan mudah untuk dikelola dalam proses tahapan Pemilu. Akan tetapi bila kita memfokuskan gambaran pelaksanaan tugas kewenangan sebagai pemimpin, dalam menjawab stigma buruk integritas penyelenggara masih diragukan, setidaknya pesan dalam bentuk cacatan tulisan ini memberikan semangat dan warna pada nilai-nilai suci untuk berupaya merubah sisi gelap menjelma seberkas cahaya terang yang kemudian sedikit banyak merubah stigma buruk kepercayaan rakyat.

Harapan untuk melahirkan sebuah cita-cita yang sejalan keinginan masyarakat, dalam upaya menghasilkan Pemilu yang berintegritas tentunya tidak mudah. Komitmen yang lahir dari diri sendiri dalam sikap dan tindakan merupakan satu langkah awal sebagai seorang pemimpin. Dengan memegang prinsip yang teguh bahwa nilai integritas merupakan satu nilai tertinggi melebihi emas dan permata, seorang pemimpin wajib menyelesaikan jiwa integritas pada dirinya sendiri sebelum nilai itu ditransformasikan kepada orang yang dipimpinnya.

Untuk menjalankannya membutuhkan ketegasan dan kasih sayang yang tulus. Tidak berlebihan bila dalam banyak pertemuan, kalimat ‘I love U All’ selalu menjadi kalimat penutup. Tegass dalam tindakan, melindungi karena menyayangi. Apa lagi dalam melaksanakan tugas pada Pemilu saat ini, transformasi teknologi media social menjadi tantangan begitu berat. Kecermatan dan kecepatan dalam pengambilan keputusan sangat dibutuhkan seorang pemimpin. Penegakan aturan disertai karakter humanis dari catatan pengalaman yang ada, mampu menghindari diri dari kecemasan melanggar aturan yang kemudian pada akhirnya

bermuara pada sesuatu yang indah *happy ending*. Meski begitu, pemberhentian dan pemberian sanksi lainnya bila secara jelas telah melanggar aturan, tanpa keraguan segera lakukan langkah sesuai mekanisme peraturan. Tapi sekali lagi, ketegasan harus mengedepankan prinsip rasa adil dan bermartabat, tanpa didasari kepentingan pribadi dan golongan.

Sebagai catatan, berdasarkan data empiris KPU Kota Tomohon selama proses Pemilu tahun 2019 dan Pilkada 2020, tidak sedikit penyelenggara adhoc dikenai sanksi, mulai dari teguran ringan dan keras, sampai dengan pemberhentian. Prinsip ketegasan berdasarkan peraturan yang ada melahirkan sebuah keputusan yang terhidar dari berbagai gugatan, baik melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Netralitas penyelenggara merupakan satu keharusan dan wajib jadi acuan, dan hal itu harus dimulai dari pemimpin itu sendiri. Sekali lagi upaya pastilah tidak mudah. Butuh proses dan kedewasaan seorang pemimpin untuk selalu cakap, cermat dan tidak emosional dalam mengambil sikap maupun tindakan.

Prinsipnya pemimpin adalah sebuah *role model* yang kemudian menjadi cahaya untuk menepis stigma buruk masyarakat. Kepemimpinan dalam penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas bisa dikatakan sebagai sisi gelap bagi penyelenggara, yang dimaknai bahwa ketika sudah melakukan sesuatu yang benar dan terukur, belum tentu bagi oleh orang lain itu hal yang terbaik. Suasana kebatinan seperti inilah yang menjadi nilai tersendiri dalam memimpin sebuah lembaga penyelenggara Pemilu. Kekhawatiran meningkatnya tingkat ketidakpercayaan publik dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat.

Berkaca pada pengalaman dalam mengawal proses tahapan Pemilu 2019, ruang gelap berubah titik terang dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu. KPU Kota Tomohon dianugerahi *award* sebagai lembaga penyelenggara berintegritas se-Sulawesi Utara. Ini membuktikan bahwa sesuatu yang tidak mudah dilakukan, ternyata dapat terpenuhi walaupun tentunya belum sempurna tetapi setidaknya dapat memberikan seberkas cahaya terang bagi terciptanya kualitas demokrasi sebagai salah satu agenda reformasi bangsa.

Meningkatnya angka tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019 di Kota Tomohon membuktikan bahwa parameter kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara Pemilu makin menjanjikan. Ini merupakan modal besar dalam mengawal proses tahapan Pemilu berikutnya, yakni pemilihan kepada daerah.

Langkah Juang Penyelenggara Pahlawan Tanpa Tanda Jasa

Seiring dengan diterbitkannya peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020, perubahan ketiga peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019, langkah kaki bergerak dengan keyakinan untuk menggapai cita-cita membangun demokrasi yang berintegritas. Sebelumnya pada akhir bulan September 2019 dengan keyakinan yang teguh dimulailah babak baru tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dari 15 kabupaten-kota di Sulawesi Utara, Tomohon adalah daerah yang akan melaksanakan pemilihan walikota dan wakil wali kota, sekaligus dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara.

Lazimnya lembaga penyelenggara pemilihan, kerja awal untuk mempersiapkan serta mengawal tahapan Pilkada dimulai dari perencanaan sampai pada pembentukan badan adhoc. Hari berganti bulan, sampailah pada awal 2020. Ekspektasi awal, sukses bisa diraih sebab Pemilu legislatif dan presiden tahun 2019 tidak akan jauh berbeda dengan pemilihan kepala daerah di tahun 2020. Kecemasan tentang kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara Pemilu akan menjadi tantangan saat Pilkada 2020, seolah tidak lagi jadi ruang gelab yang akan dilalui, karena tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 cukup memuaskan.

Tahapan penetapan anggaran, tahapan pemutahiran data pemilih dan pembentukan badan adhoc (PPK) berjalan dengan sukses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendek kata tahapan tahapan awal dalam proses Pilkada dilalui dengan mulus tanpa adanya sebuah kendala yang berarti. Kalau ada riak-riak kecil, hal tersebut dinamika normal setiap kontestasi politik mentas.

Mengakhiri Maret 2020, jauh di negeri Tirai Bambu China, tepatnya wilayah Provinsi Wuhan, dunia terhenyak

dengan kabar wabah virus Covid-19 kemudian menyebar secara cepat dan masif ke seluruh belahan dunia. Indonesia salah satunya. Menghadapi bencana non alam tersebut sejumlah negara termasuk Indonesia melakukan langkah langkah kebijakan untuk mencegah penyebaran virus tersebut, salah satunya adalah melakukan pembatasan aktivitas masyarakat. Tagline *stay at home* jadi sedemikian terkenal. Langkah ini harus dilakukan pemerintah sebab keselamatan rakyat lebih diutamakan. ‘Salus populi suprema lex esto’. Hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat.

Melihat kondisi di atas, mungkinkah Pilkada serentak di 270 daerah di Indonesia dapat dilaksanakan? Kalah dilaksanakan, mampuhkah penyelenggara pemilihan melaksanakannya? Bagaimana dengan keselamatan rakyat? Banyak pertanyaan serta pertimbangan yang bermunculan. Tidak sedikit yang meyakini Pilkada 2020 ditunda. Tantangannya bertambah. Berlipat malah. Bukan hanya urusan menjaga integritas, netralitas serta profesionalitas, tetapi nilai-nilai semangat dan keberanian wajib menjadi tenaga atau roh kekuatan mengawal proses tahapan Pilkada

2020. Setelah mengalami penundaan kurang lebih tiga bulan, Pilkada akhirnya diputuskan lanjut.

Apa boleh buat penyelenggara Pemilu harus siap. Total. Sepenuh hati mengawal tahapan. Meski jujur perasaan kuatir rajin muncul. Resikonya benar-benar tinggi. Rasarasanya tidak berlebihan kalau ada yang menyebut penyelenggara Pemilu sebagai sekumpulan ‘Pahlawan Tanpa Tanda Jasa’. Ibarat seorang guru yang telah melahirkan pemimpin bangsa termasuk pemimpin daerah, seorang penyelenggara juga harus siap secara mental untuk ‘dilupakan’ jasanya. Saya mempuisikannya seperti ini; Setitik embun pagi sirna seiring sang mentari muncul dari ufuk timur. Tidak berlebihan. Para pemimpin seperti presiden, gubernur dan wali kota lahir dari proses Pemilu yang kokinya adalah penyelenggara Pemilu itu sendiri.

Di tengah ketakutan dan kekuatiran penyebaran virus corona yang mengancam nyawa manusia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 6 tahun 2020 keluar. Temanya tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota

serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam corona virus disease 2019 (Covid 19). Genderang telah ditabu para pahlawan tanpa tanda jasa, bergerak layaknya sinar terang tak terhalang oleh ruang dan waktu serta rasa ketakutan di tengah wabah virus corona. Kaki harus melangkah dengan pasti dan optimis untuk menyukseskan Pilkada 2020. Tidak ada pilihan lain.

Saya membagikan cerita singkat dimana suatu ketika seorang teman bertanya kepada saya. Pertanyaannya kira-kira seperti ini: “Berani dan mampukah kalian melakukan tugas sebagai penyelenggara di tengah kondisi saat ini? Dimana sebagian besar orang merasa takut akan kehilangan nyawa karena virus corona?” Jawaban saya singkat. “Saya telah wakafkan hidup ini untuk negeri yang dicintai.”

Dalam rapat koordinasi nasional persiapan pelaksanaan Pilkada lanjutan serentak tahun 2020, melalui metode webinar, Mendagri yang dikenal mantan Kapolri Jendral Purnawirawan Tito Karnavian mengatakan kalimat yang sampai saat ini terngiang di kepala. “Kita harus menjadi bangsa petarung.” Ia menyebut beberapa negara di belahan

dunia lainnya melaksanakan Pemilu dengan baik, dan itu menjadi api semangat untuk sukses pemilihan kepala daerah di 270 daerah seluruh Indonesia.

Seiring perjalanan waktu, tahapan demi tahapan dilalui dengan mematuhi amanat undang-undang, dimana wajib melaksanakan protokol pencegahan Covid-19 yang ketat. Kami melakukan deteksi dini dalam bentuk rapid tes bagi penyelenggara sampai pada tingkat pelaksana adhoc, serta melalui aturan yang dikeluarkan untuk menjamin terlasananya tahapan Pilkada sesuai standart kesehatan. Sejumlah kewajiban pembatasan pertemuan, wajib gunakan alat pelindung diri dan ketentuan lainnya kami lakukan dengan cermat. Dan yang terpenting wajib memastikan penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya harus dalam kondisi sehat, tidak terpapar Covid-19.

Pilkada lanjutan di tengah wabah Covid-19 diwarnai sejumlah aturan yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan, kemudian jadi bagian terpenting dalam proses pengawasan oleh lembaga mitra KPU, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Tujuannya konkrit; Pilkada sukses, kesehatan terjaga. Berkenaan hal tersebut, langkah-langkah tegas dan terukur sesuai dengan peraturan yang berlaku, KPU Tomohon menjalankannya dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan amanat undang undang. Walaupun belum sempurna, namun lebih dari itu dari Pilkada Tomohon 2020 diharapkan terhindar dari cluster baru penyebaran Covid-19.

Peran kepemimpinan penyelenggara di Pilkada 2020 mewajibkan seorang pemimpin untuk memastikan bahwa para petugas penyelenggara Pilkada dalam kondisi sehat dan tidak terpapar wabah Covid-19. Salah satu menjadi kewajiban/keharusan adalah mampu membangun koordinasi yang dinamis dan terukur dengan *stakeholder* serta lembaga mitra kerja KPU, yakni Bawaslu. Batasan kewenangan masing-masing penyelenggara Pemilu harus menjadi kewajiban untuk dilaksanakan. Ini menjadi pegangan kuat sebagai dasar moral dan etik dalam menjaga keseimbangan kewenangan, agar Pilkada sukses terhindar dari gejala sosial politik yang mengarah pada tingkat kepercayaan masyarakat menurun dan pada akhirnya bisa mempengaruhi tingkat partisipasi di TPS.

Jelang 9 Desember 2020 yang merupakan hari pemungutan suara, persiapan dari proses pencalonan, pemutahiran data pemilih dan pemenuhan logistik Pilkada terus dimantapkan. Tak kalah pentingnya kesiapan penyelenggara agar siap dan sehat saat bertugas. Dijalankan tes kesehatan secara massif namun terukur. Ketegasan dan ketegaran hati seorang pemimpin diuji, bilamana ternyata di antara penyelenggara tingkat TPS (KPPS), hasil rapid tes terkonfirmasi reaktif dan atau bahkan positif. Sesuai aturan, yang terpapar ini tidak diperbolehkan aktif pada proses pemungutan perhitungan suara di TPS.

Bagi kalangan tertentu, mungkin saja suatu hal yang tidak mudah. Koordinasi masing-masing lembaga yang berkompeten secara terstruktur wajib dilakukan, Bayang-bayang ketakutan akan terjadinya *cluster* baru penyebaran Covid 19 selalu menghantui saat fisik mulai rapuh melangkah pasti, untuk mempertanggungjawabkan bahwa keselamatan rakyat di atas segala galanya. Kekuatan doa dan pengharapan serta kedewasaan dalam mengambil keputusan kunci utama agar cahaya sukses dapat diraih walau awan hitam pekat menjadi penghalang.

Seiring dengan perjalanannya waktu, Rabu 9 Desember 2020, KPU Tomohon dengan penuh tanggungjawab disertai semangat selayaknya pasukan perang, menuju medan juang demi negeri yang dicintainya. Pertayaan besar muncul saat terlelap tidur setelah berkerja tak mengenal batas ruang dan waktu. Akankah kita dapat memenangkan pertempuran ini? Satu komitmen selalu jadi penyejuk jiwa. “ Kami telah wakafkan hidup demi pengabdian kepada merah-putih.” Sekedar me-rewind lagi, saat hari H hampir seluruh wilayah Kota Tomohon dari data yang ada berada pada posisi 'merah' (www.kompas.com edisi 9 Desember 2020). Deg-degan sudah pasti. Kuatir banyak yang takut ke TPS. Tapi hal tersebut sirna. Antusiasme masyarakat dating menyalurkan hak konstitusionalnya begitu mewabah. Tidak sedikit yang mengaku tak cemas ke TPS, karena protokol pencegahan Covid-19 di lokasi pemungutan suara sangat maksimal. Puji Tuhan. Kecemasan terbesar sirna.

1 Kompas.com – 09/12/2020, Ada 22 Daerah Zona Merah yang Gelar Pilkada Serentak 2020, Mana Saja?

Di tengah keletihan dan rasa syukur, suara telpon berdering. Layar kaca ponsel tertulis salah satu pimpinan komisioner KPU Provinsi Sulut. “Selamat malam ketua. Apakah benar ada petugas KPPS di wilayah kerja KPU Tomohon yang terkonfirmasi positif Covid-19 namun tetap bertugas di TPS? Seketika itu terdiam sejenak seraya berkata dalam hati: “Benarkah itu? Ini sudah jadi viral secara nasional. Bila tidak ditindaklanjuti akan berpotensi pada pelanggaran kode etik. Coba cek media online yang memuat berita tersebut.” Demikian sambungan informasi pimpinan provinsi tersebut.

Hanya satu kata yang keluar dari mulut yang bergetar. “Siapa pimpinan. Segera dicek.”. Malam yang dingin di Kota Tomohon terasa panas seketika seperti siang hari. Keringat mengucur deras ibarat berdiri dekat bara api yang membakar relung jiwa yang goncang.

Singkat cerita, seketika itu juga dengan penuh ketegaran langsung memanjatkan doa kepada yang Maha Kuasa. Dengan tangan gemetar dan terasa tak lagi mampu bergerak, jari mulai menyentuh perangkat komputer di

sudut ruang salah satu teman komisioner. Tatapan bola mata yang tadinya mulai redup kembali tajam, dan terang ibarat sang mentari baru keluar dari ufuk timur untuk memastikan berita itu benar atau tidak.

Satu persatu layar komputer dicermati. Info berita tentang Pilkada satu persatu di telusuri dan diwarnai perdebatan yang serius diantara para komisioner kecewa, marah dan ketakutan mewarnai suasana malam itu. Dalam suasana yang ‘tak terkendali’ ketenangan seorang pemimpin sangat dibutuhkan. Pemimpin harus mampu menciptakan suasana nyaman walau sebagai manusia biasa rasa kecewa, marah dan takut ada. Manusiawi. Namun seorang pemimpin harus mampu tampil sebagai satu cahaya terang saat kegelapan datang tanpa diundang. Suasana semakin mencekam saat jari ini menyentuh salah satu media online yang mengutip pernyataan salah satu pimpinan penyelenggara Pemilu yang secara jelas menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkada Kota Tomohon diduga telah terjadi pelanggaran. Disebut ada petugas KPPS yang dikonfirmasi positif tapi bertugas di salah satu TPS di wilayah kerja KPU

Tomohon. ([www.tribunmanado.com/Rabu 9 Desember 2020](http://www.tribunmanado.com/Rabu_9_Desember_2020)).

Dari hasil penelusuran berita dan data empiris, ternyata dugaan pelanggaran tersebut terjadi bukan pada lembaga KPU melainkan pada lembaga lain sebagai mitra kerja KPU. Malam itu juga suasana semakin tidak terkendali. Desakan untuk mengklarifikasi bahwa itu tidak benar dan salah alamat sampai pada gagasan melalui proses gugatan menjadi perdebatan panjang dan melelahkan. Kedewasaan dan jiwa besar pemimpin menjadi kekuatan penyeimbang dalam upaya menjaga keharmonisan antara lembaga penyelenggara Pemilu menjadi embun penyejuk ketika bara api mengusai renung jiwa.

Keteguhan dan pengendalian diri berakhir dengan indah tanpa harus saling menyalahkan. Ini adalah sebuah cerita singkat dari sekian banyak cerita lainnya yang tak mungkin digoreskan satu persatu dalam lembaran putih.

2 <https://manado.tribunnews.com/2020/12/09/bawaslu-ada-petugas-kpps-di-tomohon-positif-covid-19-tetap-bertugas>

“Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang mengusai dirinya, melebihi orang yang merebut kota (Amsal 16:32).

Kearifan Lokal di Ruang Demokrasi

Demokrasi sering dikaitkan dengan sebuah pengertian yang lebih mendekati pada proses modernisasi di bidang politik. Demokrasi dari arah sejarah perkembangannya telah menjadi tuntutan dan harapan bagi berbagai bangsa dalam proses bernegara dalam membangun tatanan sistem politik guna mengakomodir kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat.

Moderennisasi demokrasi politik yang sejalan dengan perkembangan teknologi, menjadi tantangan tersendiri pada proses demokrasi politik melalui pemilihan langsung pimpinan daerah. Kemajuan teknologi dalam alam demokrasi modern pada pratiknya bila dilihat dari sejarah pemilihan kepala daerah banyak sekali di dominasi oleh penggunaan teknologi modern, sehingga tanpa disadari mendegradasi nilai-nilai kearifan lokal. Nampak jelas dari menurunnya

nilai-nilai kearifan budaya lokal dengan penggunaan pakaian adat baik calon pimpinan daerah maupun simbol-simbol lain sebagai ruang sosialisasi politik.

Dari sekian banyaknya kearifan lokal yang dapat ditampilkan saat tahapan Pilkada serentak 2020, melalui sebuah pemikiran yang menembus ruang budaya sebagai sarana sosialisasi menjadi pesan politik bagi masyarakat bahwa kearifan lokal merupakan kekayaan yang tak akan hilang oleh waktu, sebagai akibat kemajuan peradaban manusia yang tinggal di bawah kolong langit.

Dalam konteks tanggungjawab sejarah tersebut, KPU Tomohon berusaha menonjolkan beberapa nilai-nilai budaya lokal yang sejalan dengan maksud dan makna pada proses tahapan Pilkada 2020. Pada beberapa tahapan Pilkada, muatan kearifan lokal ditampilkan seperti penggunaan Kower (alat minum terbuat dari bambu) dalam proses penetapan nomor urut calon wali kota dan wakil wali kota. Pesan yang coba diangkat dari Kower yakni kesederhanaan dan keteguhan hati harus kokoh ketika nanti terpilih.

Ada juga Aweyen dan miniatur Pohon Seho (tempat penampungan air nira dan jenis Pohon Enau) yang bila dikaitkan dengan makna yang terkandung di dalamnya, seorang pemimpin wajib menampung segenap aspirasi rakyatnya yang bersumber pada kekuatan dan potensi daerah, sehingga mampu berdiri tegak dengan kearifan lokal lainnya yaitu penggunaan “Roroongan” (tempat bertelur ayam) yang menggambarkan bahwa pemimpin itu harus dapat menciptakan pemimpin yang baru untuk melanjutkan kemajuan daerah untuk kesejahteraan rakyatnya secara utuh.

KPU Tomohon juga menggunakan logo Pilkada Burung Manguni sebagai satu simbol dari Tanah Minahasa (Mina Esa: yang dipersatuhkan). Maknanya Tomohon adalah satu kesatuan Budaya Minahasa yang tak akan terlepas dari sejarah dan budaya Toar Lumimuut Wanua Malesung (Tanah Malesung), walaupun secara administrasi pemerintahan Tomohon merupakan satu wilayah otonom yang lahir dari proses perjuangan panjang oleh para tokoh tokoh pejuang pemekaran. Kearifan lokal ini ditampilkan dalam mengisi ruang demokrasi Pilkada, sebagai modal untuk menunjukkan

bahwa bangsa kita mempunyai kekayaan tersendiri yang tak akan sirna di tengah kemajuan peradaban dunia.

Usaha Tidak Menghianati Hasil

Pemilu 2019 KPU Tomohon memperoleh penghargaan sebagai KPU berintegritas dari 15 kabupaten kota se-Sulawesi Utara. Hal ini merupakan modal besar untuk memutar balikan stigma buruk masyarakat pada tingkat kepercayaan penyelenggara, dan diyakini merupakan satu pijakan penting dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat. Dan memang, tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2019 Tomohon cukup menjanjikan.

Keyakinan itu menjadi roh kekuatan dan semangat dalam mengawal Pilkada 2020. Pertanyaan besarnya, akankah prestasi ini dapat ditingkatkan atau minimal dipertahankan? Pertanyaan ini mengandung makna sangat penting oleh karena Pilkada 2020 dilaksanakan pada suasana berbeda dengan Pilkada sebelumnya.

Pandemi Covid-19 memang membuat banyak pihak ramai-ramai memprediksi tingkat partisipasi masyarakat akan menurun secara signifikan. Alat ukurnya jelas. Pemilih akan takut datang ke TPS, takut terinfeksi Corona. Jika itu terjadi kemerosotan demokrasi partisipatif sudah di depan mata. Lebih gawat lagi, legitimasi terhadap pasangan calon terpilih akan sangat rendah. Dan lain-lain. Dan lain-lain. Yang pasti, banyak yang kompak meyakini tingkat partisipasi akan turun. Bahkan ketika ketika militansi pendukung setiap kandidat dibakar sepanas-panasnya.

Suatu waktu, sore hari, saat melakukan aktivitas persiapan tahapan Pilkada, seorang penulis berita (wartawan) bertanya. “Mampukah KPU menyakinkan masyarakat (Tomohon) untuk datang ke TPS sementara berdasarkan data yang ada Tomohon adalah salah satu wilayah merah penyebaran virus corona?”. Jawaban saya singkat dan tegas. “Mampu...!” Sekilas raut wajah penulis berita tersebut masih menyisakan keraguan atau aura pesimis. Terlepas makna yang terkandung dari perbincangan tersebut, sebuah kewajiban moral bagi penyelenggara agar senantiasa dapat menyampaikan pesan positif serta rasa optimisme yang kuat

bahwa peran serta masyarakat dalam Pilkada tahun 2020 sangatlah penting.

‘Pertarungan’ dimulai. Semua amunisi segera dan wajib diasah untuk meraih keberhasilan yang membanggakan. Ibarat sekelompok pasukan perang melalui ruang kekuatiran dan ketakutan di tengah ancaman hilangnya nyawa sebagai akibat dari penyebaran virus yang tak mudah dikendalikan. Kantor KPU Tomohon yang berada di jalan utama Kota Tomohon, suara sirene ambulance sudah tak asing dan menambah gejala jiwa dalam kebimbangan. Mampukah kita melaksanakan pilkada dalam situasi seperti ini. Produk hukum untuk membentengi tahapan Pilkada di tengah pandemic Covid-19 silih berganti datang, menjadi roh kekuatan dalam menjalankan tugas serta pengabdian bagi negeri yang di cintai. Meski begitu, hal ini tetap membutuhkan kecermatan dan kehati-hatian, agar tidak ada persoalan dalam penerapannya.

Waktu berjalan begitu singkat, segala upaya dan kerja keras telah dilakukan. Kemampuan dalam mengawal serta melaksanakan berbagai tahapan Pilkada 2020 tidak terlepas

dari bagaimana kita mampu melakukan kerjasama antar lembaga, supaya Pilkada serentak sukses, aman dan sehat. Akhirnya dedikasi dan kerja keras tidak ‘menghianati’ hasil. Kota Tomohon dari 30 kota se-Indonesia yang melaksanakan Pilkada serentak, mendapat predikat tingkat partisipasi pemilih tertinggi secara nasional. 91.86%. Sungguh sebuah capaian yang jauh melebihi ekspektasi banyak pihak. Sekali lagi kerja keras, pengorbanan dan peran serta seluruh komponen anak bangsa yang mendiami sebuah wilayah Pengunungan Mahawu dan Lokon, berakhir dengan indah.

Akhir Sebuah Cerita: Antara Kenangan dan Harapan

Cerita adalah goresan dinamika untuk menceritakan sebuah kenangan untuk menjadi landasan kehidupan untuk melakukan lebih baik di masa akan datang. Pasang surut apa yang seharusnya dilakukan untuk mengisi ruang pengabdian pada bangsa dan negara merupakan satu momentum sejarah kehidupan yang membanggakan. Sekecil apapun peran yang diberikan, menjadi satu nilai tersendiri terhadap kecintaan

bagi ibu pertiwi walau seiring dengan perjalanan waktu sering dilupakan.

Pernyataan ungkapan tersebut di atas menjadi makna penulisan dari seorang anak bangsa yang karena kebanggaannya menjadi penyelenggara pesta demokrasi. Pemilu 2019 merupakan satu momen sejarah Pemilu di Indonesia dimana pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dilaksanakan secara serentak. Berkaca dari pengalaman Pemilu 2019, stigma bahwa penyelenggara Pemilu dapat melakukan kecurangan dan menguntungkan salah satu peserta Pemilu, masih menjadi isu yang mewarnai proses Pemilu dan hasilnya.

Melalui berbagai perubahan perundang-undangan, satu hal yang paling fundament dilakukan dalam menepis stigma negatif masyarakat tersebut adalah menjaga nilai-nilai integritas. Ya. Integritas memang menjadi satu nilai yang wajib dipenuhi dan menjadi cermin moral serta etika dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu, meraih tingkat

partisipasi pemilih yang membanggakan tinggal soal waktu. Lebih dari itu, kualitas demokrasi bisa melahirkan pimpinan daerah yang sesuai amanat UUD 1945.

Pemilihan kepala daerah tahun 2020 menyimpan cerita tersendiri dalam ruang pengabdian sebagai penyelenggara. Kemampuan dan kedewasaan dalam pengambilan keputusan dalam bayang-bayang ketakutan pandemic Covid-19 adalah tantangan tersendiri. Pemberian diri yang sudah menjadi satu komitmen harus diperhadapkan dengan situasi kondisi berbeda dengan Pilkada sebelumnya. Mungkin saja akan menjadi catatan sejarah tersendiri bahwa sebagai penyelenggara harus mampu melewati proses tahapan Pilkada dalam kondisi apapun. Bahkan ketika nyawa menjadi taruhannya.

Keteguhan dan doa merupakan elemen paling bernilai agar mampu melewati setiap tahapan. Koordinasi dan komunikasi antar lembaga penyelenggara, pemerintah, peserta Pemilu dan masyarakat, wajib dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Menjaga keharmonisan, penting dilakukan untuk tujuan menjaga kestabilan sosial politik

masyarakat. Memberikan ruang kearifan lokal sebagai sebuah simbol daerah, satu sarana sosialisasi guna memberikan kesan penting dalam proses demokrasi bahwasannya konsep demokrasi lahir dari tatanan budaya masyarakat yang kemudian seiring dengan penerapan demokrasi tidak menghilangkan unsur unsur budaya lokal.

Kerja keras, totalitas serta komitmen terhadap pengabdian bagi bangsa dan daerah akhirnya menghasilkan sebuah kebanggaan tersendiri. Hasil yang dicapai akan menjadi cerita indah untuk masa depan bahwa kerja keras tidak mengkhianati hasil. Kedaulatan negara ada di tangan rakyat. ‘vox populi, vox dei.’ Suara rakyat adalah suara Tuhan. (*)



BERI PENJELASAN: Robby Golioth memberikan penjelasan kepada mantan komisioner KPU RI Sigit Pamungkas di salah satu kegiatan simulasi

PILKADA DAMAI UNTUK SEMUA

ROBBY GOLIOTH

(Anggota KPU Kota Tomohon)

Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon telah usai. Patut disyukuri karena semua berjalan dengan aman dan damai. Ini menunjukkan masyarakat Tomohon makin dewasa dalam berpolitik

SENIN 25 Januari 2021 Pukul 10.00 Wita
Komisioner KPU Kota Tomohon terundang mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Tomohon dalam rangka Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih pada Pemilihan Tahun 2020. Walaupun acara agak ‘ngaret’, tetapi 10.30 acara sudah bergulir. Semua Komisioner KPU Tomohon menempati kursi yang telah disiapkan panitia, tepat di belakang para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon.

Tidak ada yang aneh ataupun salah pada acara ini. Semua mengalir sebagaimana mestinya. Penulis duduk diapit oleh sesama komisioner, Stenly Kowaas dan Albertien Pijoh. Kami begitu menikmati rangkaian acara yang ditata secara protokoler dengan apik, kadang-kadang kami harus mengarahkan wajah kepada para awak media yang ingin mengabadikan kehadiran Penyelenggara Pemilu yang turut serta dalam ruang sidang.

Tiga puluh menit acara bergulir, Sekretaris Dewan DPRD Kota Tomohon Fransiskus Herry Lantang SSTP membacakan Surat Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Terpilih

dengan dasar surat Berita Acara penetapan yang diterbitkan KPU Tomohon, yang sudah kami plenokan dan serahkan kepada pimpinan DPRD tanggal 22 Januari yang lalu.

Sejujurnya lelah ini belum berlalu, karena yang kami hadapi bukan hanya tahapan Pilkada saja. namun menjalaninya dengan era *new normal*, dimana dalam segala aktivitas harus menggunakan alat pelindung diri (APD) agar tidak terpapar virus corona. Hal inilah yang membuat tenaga, pikiran dan mental diperas habis agar penyelenggaraan Pilkada berjalan dengan lancar dan benar.

Sangat ‘plong’ rasanya karena tugas kami selama lima belas (15) bulan sebagai penyelenggara Pilkada telah selesai, dan kini terbayang lagi betapa kita telah menjalani tahapan demi tahapan yang sangat berat karena Pemilihan Kepala Daerah pelaksanaannya di luar kewajaran karena disamping kita wajib menjalankan tahapan yang tidak boleh kurang maupun lebih, kita juga berhadapan dengan Virus Corona 19.

Pengalaman Pertama Bertugas dengan APD

KPU Kota Tomohon memulai tahapan Pemilihan Kepala Daerah di akhir September 2019. Sebagai Kepala Divisi Teknis Penyelenggara, penulis ingat benar tahapan yang bersentuhan langsung dengan divisi kami adalah pemenuhan syarat calon perseorangan yang dimulai bulan Oktober 2019.

Di akhir November 2019 kami beberapa kali melakukan sosialisasi pencalonan perseorangan. Di awal Desember diumumkanlah apa saja syarat-syarat bagi mereka yang akan menjadi peserta Pilkada melalui jalur calon perseorangan, termasuk jadwal penyerahan dokumen dan juga sekaligus menerima surat mandat bagi penghubung (LO).

Mendekati masa verifikasi faktual dukungan, Pandemi Virus Corona semakin mencemaskan. Semua penyelenggara wajib menjalankan protokol kesehatan Covid-19 dalam tugasnya, termasuk saat mendatangi pendukung calon perseorangan. Ini menjadi tantangan tersendiri karena semua pendukung yang dokumennya lengkap harus

dikunjungi dan difaktualkan sesuai alamat mereka masing-masing. Ini adalah pekerjaan yang tidak mudah dilaksanakan oleh penyelenggara adhoc di tingkat kelurahan (PPS).

Tambahan lagi, ternyata dukungan yang dimasukkan ke KPU banyak yang tidak memenuhi syarat karena dari hasil verifikasi faktual yang dilakukan PPS, yang memenuhi syarat hanya 4.755 pendukung. Maka untuk memenuhi syarat jumlah minimum, bakal pasangan calon harus melanjutkan dengan memasukkan perbaikan dokumen dukungan.

Dalam tahapan perbaikan ini kami harus bekerja ekstra keras. Sejak pukul 08.00 Wita sudah *standby* menunggu kedatangan Bapaslon dan tim. Lebih dari satu kali dua puluh empat jam kami menerima dan memeriksa dokumen perbaikan dan kalau dihitung kami tidak tidur maupun beristirahat sekitar 31 jam. Padahal sebenarnya kami perlu stamina yang lebih untuk menjaga imun tubuh, karena saat itu virus corona masih sangat marajalela.

Hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS yang dilanjutkan dengan rekapitulasi di PPK dan KPU Kota Tomohon, pada akhirnya menetapkan bakal pasangan calon

perseorangan Robert P.A. Pelealu, SH MH dan Franciscus H. A. Soekirno, SH MH (RoSe) lolos. Verifikasi faktual akhirnya membuktikan bahwa bakal pasangan calon perseorangan dapat melanjutkan ke tahapan pendaftaran.

Melalui jalan yang panjang dan melelahkan, hasil dukungan jumlah minimum dukungan dapat terpenuhi untuk selanjutnya bisa ikut dalam tahapan pendaftaran calon kepala daerah di Kota Tomohon, dengan jumlah dukungan perbaikan yang memenuhi syarat sebanyak 3.301. Dengan demikian total dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 8.056 dukungan.

Peran Partai Politik

Lain halnya dengan syarat pendaftaran melalui pengusulan partai politik. Sesuai peraturan yang berlaku, pendaftaran pasangan calon oleh partai politik dapat dilakukan dengan syarat partai politik atau gabungan partai politik telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

Hari pertama masa pendaftaran, 4 September 2020, suasana di kantor KPU telah siap menyambut kedatangan para bakal pasangan calon. Tidak ada aturan yang mengatur siapa yang mendapatkan kesempatan pertama atau selanjutnya. KPU wajib menerima pendaftaran saat ada yang datang untuk mendaftar sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ada.

Waktu menunjukkan pukul 12.10 bakal Paslon Jilly Gabriella Eman SE MM dan Virgie Baker SS MSi tiba dengan di antar oleh masing-masing ketua dan sekretaris partai politik pengusul, yakni Golkar, Nasdem, Hanura dan Demokrat. Semua yang akan masuk diarahkan mencuci tangan terlebih dahulu, diukur suhu tubuhnya dengan *thermogun*, dan wajib menggunakan masker serta menyerahkan hasil rapid tes bahwa bapason non reaktif virus corona. Setelah itu baru dipersilahkan mengisi buku

pendaftaran dan menyerahkan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon.

Berbeda dengan Pilkada yang lalu, saat ini kehadiran pengantar/pendamping sangat dibatasi. Untuk itu KPU menyiarkan acara pendaftaran secara langsung/live melalui media online zoom, Youtube, Facebook dan Instagram agar masyarakat dapat menyaksikan melalui media daring.

Pemeriksaan dokumen baru saja berjalan, sekitar pukul 12.35 kami mendapat informasi bahwa ada pasangan yang lain sudah dalam perjalanan menuju ke KPU dan siap untuk mendaftar. Kami menyampaikan silahkan datang, namun mohon menunggu di ruang tunggu yang telah disiapkan. Benar, pukul 14.00 terdengar dentuman tambur dan pekikan penari Kabasaran semakin lama semakin mendekat. Ternyata ini adalah iring-iringan bakal Paslon Caroll Joram Azarias Senduk SH dan Wenny Lumentut SE.

Tidak lama setelah mereka tiba, pemeriksaan dokumen pendaftar pertama selesai. Kami langsung mempersilahkan mereka memasuki ruang pendaftaran. Sesuai buku pendaftaran, Pasangan ini datang bersama dengan

pengurus Partai PDIP dan Gerindra ketika jam menunjukkan 14.50.

Hari kedua masa pendaftaran, 5 September 2020, kami bersama Bawaslu telah bersiap untuk menutup pendaftaran. Tapi tim penghubung perseorangan menghubungi via handphone menyampaikan akan melakukan pendaftaran saat ini juga. Benar saja Saat waktu menunjukkan pukul 15.55 Paslon Robert PA Pelealu SH MH dan Franciscus Hermanus Angelo Soekirno SH MH bersama tim dari jalur perseorangan memasuki ruangan pendaftaran dengan membawa dokumen lengkap. Setelah di diperiksa akhirnya diterima oleh tim verifikator.

Minggu, 6 September 2020 hari terakhir, kami tetap membuka pendaftaran sejak jam 08.00 sampai dengan waktu yang sudah ditentukan pukul 24.00 Wita. Tidak ada lagi Paslon yang mendaftar. Kami menutup pelaksanaan pendaftaran disaksikan Bawaslu Kota Tomohon. Dengan demikian hanya 3 Paslon yang mendaftar:

1. Jilly Gabriella Eman SE MM dan Virgie Baker SS MSi
2. Caroll Joram Azarias Senduk SH dan Wenny Lumentut SE
3. Robert PA Pelealu SH MH dan Franciscus Hermanus Angelo Soekirno SH MH.

Saat pendaftaran pasangan calon, kami langsung memeriksa semua dokumen yang dibawa yang pertama adalah syarat pencalonan yakni formulir :

1. Formulir Model B-KWK Parpol: Surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung serta bakal pasangan calon, sesuai dengan tingkatannya, yang menyatakan.
 - a. Sepakat mendaftarkan bakal pasangan wali kota dan wakil wali kota.
 - b. Tidak akan menarik bakal pasangan wali kota dan wakil wali kota yang akan didaftarkan.

- c. Sepakat antara partai politik atau gabungan partai politik dengan bakal pasangan calon untuk mengikuti proses pemilihan; dan
 - d. Naskah visi, misi, dan program pasangan calon wali kota dan wakil wali kota telah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah
2. Formulir Model B.1-KWK Parpol: Keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang persetujuan bakal pasangan calon.
 3. Keputusan pimpinan partai politik keputusan pimpinan partai politik terdiri atas:
keputusan partai politik tingkat pusat atau tingkat provinsi tentang kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan untuk bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati atau bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. dan
 4. Berita Acara Model BA.7-KWK Perbaikan Perseorangan beserta lampirannya.

Pemeriksaan tim verifikator menyatakan semua dokumen syarat pencalonan lengkap dan sah serta syarat calon ada dan lengkap maka KPU Tomohon menerima pendaftaran dengan memberikan status DITERIMA dan diberikan Formulir TT.1-KWK dan lampiran-nya serta Berita Acara Pendaftaran. KPU juga memberikan surat pengantar kepada semua calon untuk digunakan dalam pemeriksaan kesehatan di Rumah tipe A, RSUP. Prof. Dr. R. D. Kandou Manado yang merupakan rumah sakit pemerintah terbesar dan terlengkap di Sulawesi Utara.

Hasil pemeriksaan dokumen tim verifikator mendapati beberapa dokumen syarat calon dari ketiga pasangan calon ada, namun masih belum memenuhi syarat. Diantaranya laporan LHKPN yang belum berbentuk tanda terima, surat dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya tidak meliputi tempat tinggal calon, dan juga tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak masih dalam bentuk laporan online belum sebagai Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak.

Pasangan calon sangat cepat meresponnya dan menyerahkan dokumen perbaikan dan langsung diverifikasi oleh tim verifikator hasil pemeriksaan. Semua pasangan calon telah memenuhi syarat maka KPU memberikan status diterima serta memberikan Tanda Terima Model TT.2-KWK dan lampirannya. KPU juga mengumumkan dokumen perbaikan persyaratan calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan dari masyarakat.

Kamis, 24 September 2020, dengan menjalankan protocol kesehatan Covid-19, dilaksanakan pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor : 299 / PL.03.3-Kpt/7173/ KOTA/IX/2020. Uniknya hasil undi yang dicabut oleh masing-masing pasangan calon, urutannya sama dengan dengan saat para calon datang mendaftar di KPU.

Nomor Urut Satu (1): Jilly Gabriella Eman SE MM dan Virgie Baker SS MSi

Nomor Urut Dua (2) : Caroll Joram Azarias Senduk SH dan Wenny Lumentut SE

Nomor Urut Tiga (3): Robert PA Pelealu SH MH dan Franciscus Hermanus Angelo Soekirno SH MH

Ketiga pasangan calon mengikuti semua tahapan dengan persyaratan yang ada termasuk kampanye serta pelaporan dana kampanye.

Hasil yang Mendamaikan

Rabu, 9 Desember 2020, sebelum pukul enam pagi seluruh KPPS kecuali yang sedang melakukan isolasi mandiri karena hasil rapid dan PCR Swab dinyatakan terpapar virus corona, sudah berada di TPS untuk melaksanakan tugasnya.

Saat pemungutan suara semua calon wali kota dan wakil wali kota memilih sesuai dengan domisili mereka. Pukul 17.00 atau jam lima sore sudah ada pendukung yang

melakukan konvoi mengklaim sebagai pemenang. Pengamanan dari pihak kepolisian sempat membubarkan kerumunan masa di rumah salah satu calon dan massapun akhirnya dapat dikendalikan.

10 Desember 2020 dan hari hari selanjutnya suasana amat tenang. Ditambah juga sudah ada statemen dari pihak yang mengaku kalah melalui media, dengan narasi sejuk dan damai. Ini cuplikan pesan yang kami ambil dari media online kawauaterkini.co.id tertanggal 11 Desember 2020 dengan judul: “JGE-VB dan Ketua Partai Pengusung Beri Selamat Kepada CS-WL”

“Kami mengucapkan selamat kepada wali kota dan wakil wali kota terpilih (CS-WL, red), untuk memimpin Kota Tomohon. Kami titipkan kota ini supaya betul-betul untuk seluruh masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu,” tutur VB, saat konferensi pers di Wale Sarongsong, Jumat (11/12) 2020.

Sementara itu, JGE juga menyatakan dengan berbesar hati dan suka cita menyampaikan banyak selamat kepada CS-

WL, karena sudah memenangkan kontestasi Pilkada tahun ini.

“Semoga visi dan misi bisa diwujudkan. Niat dan kerinduan kami kepada pemimpin yang baru, agar bisa membawa kota ini lebih maju. Juga, semoga kedepan keduanya bisa mempersatukan kembali warga. Bisa optimalkan infrastruktur, potensi masyarakat dan struktur pemerintahan yang ada sudah sangat baik. SDM dari struktur pemerintahan ini memang baik semua, untuk membantu pemimpin ini membangun Tomohon,” tuturnya.

Ucapan yang sama disampaikan sejumlah ketua partai pengusul, yakni Miky JL Wenur (Golkar), Andy Sengkey (Nasdem) dan Fischer Mangundap (Hanura). “Saya sampaikan kepada para kader Golkar, yang utama bukan siapa pemimpinnya namun membangun kota ini secara bersama-sama. Perbedaan harus ditinggalkan. Partai Golkar akan mensupport pemimpin terpilih ini, supaya kota ini berada dalam kondisi aman dan semakin maju ke depan,” kata Miky JL Wenur.

Fischer Mangundap mengatakan, ada rasa kebanggaan bisa maju bersama dengan gerbong besar JGE-VB. Sangat terlihat bentuk kecintaan masyarakat terhadap pasangan calon ini. “Saya sebagai Ketua Hanura berpesen kepada pendukung dan seluruh warga untuk melepas segala perbedaan. Walaupun bukan dari jalur partai kami yang menjadi pemenang. Saya juga menyampaikan rasa terima kasih yang besar kepada masyarakat yang sudah memilih sesuai hati nurani,” katanya.

Andy Sengkey menambahkan, sebagai politisi dan pemimpin partai mengajak para pendukung, untuk tidak usah berlarut dan fokus pada hasil namun fokus pada proses demokrasinya. “Menjadi kebanggaan bagi partai pengusung karena bisa memberikan calon yang masih sangat muda dan tentu saja punya prospek ke depan,” ujarnya.

Saat rekapitulasi di tingkat PPK maupun tingkat KPU Kota Tomohon para saksi pasangan calon jarang sekali bahkan nyaris tidak ada sanggahan semua berjalan dengan lancar. Akhirnya pada Selasa 15 Desember 2020 KPU,

selesai melakukan rekapitulasi suara tingkat kota dengan hasil :

1. *Jilly Gabriella Eman dan Virgie Baker*

23.495 (Dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima) suara

2. *Caroll Joram Azarias Senduk dan Wenny Lumentut*

43.611 (Empat puluh tiga ribu enam ratus sebelas) suara

3. *Robert PA Pelealu dan Franciscus HA Soekirno*

550 (lima ratus lima puluh) suara

Berdasarkan Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor: 717/PL.0.6-Kpt/7173/Kota/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2020.

Setelah Mahkamah Konstitusi menerbitkan Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) bahwa pemilihan di Kota Tomohon tidak ada gugatan/sengketa dan surat Ketua

KPU RI nomor: 60/PL.02.7-SD/03/KPU/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam pemilihan tahun 2020, KPU Tomohon menetapkan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tomohon Terpilih Pada Pemilihan Tahun 2020, adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Carroll Joram Azarias Senduk SH dan Wenny Lumentut SE dengan perolehan suara sebanyak 43.611 (Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sebelas) suara.

Yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor: 35/Pl.O2.7-KPT/7173/Kota/I/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Terpilih Pada Pemilihan Tahun 2020. Dengan dua partai pengusul PDIP empat (4) kursi dan Gerindra dua (2) kursi, pasangan ini mampu mengalahkan koalisi besar partai Golkar, Nasdem, Demokrat dan Hanura dengan total empat belas (14) kursi yang mengusulkan pasangan calon Jilly Gabriella Eman dan Virgie Baker yang hanya memperoleh 23.495 (dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh lima) suara.

Demikian pasangan calon terpilih dilantik pada tanggal 26 Februari tahun 2021, mundur sembilan hari dari akhir masa jabatan (AMJ) Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih 2015 Jemmy Feidie Eman dan Sherly Adelin Sompotan yang mestinya jatuh pada tanggal 17 Februari 2021. (*)



HAPPY ENDING: Jacobus Wowor saat menyerahkan dokumen pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara

KEARIFAN LOKAL : “BAKU KASE INGA”

JACOBUS ANDREAS WOWOR

(Anggota KPU Kota Tomohon)

PEMILIHAN Serentak Kepala Daerah di tahun 2020 menjadi momentum bersejarah karena dilakukan di tengah Pandemi Covid-19. Seluruh lapisan masyarakat dipaksa

untuk melakukan banyak hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga hal ini seakan mengganggu *safe zone* kehidupan masyarakat di berbagai lini.

Protokol kesehatan yang diberlakukan terus dievaluasi dan diperketat, sementara Pilkada harus tetap dilakukan dengan segala pertimbangan yang dalam dan detail dengan memperhitungkan segala dampak, tetapi juga berbagai manfaat tetap dilaksanakannya Pilkada ini.

Tantangan bagi penyelenggara pun semakin sulit, saat masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam proses demokrasi di Indonesia terbagi dalam opini pro dan kontra mengenai pelaksanaan Pilkada di tengah Pandemi.

Dalam proses panjang pelaksanaan Pilkada di Kota Tomohon, KPU memfasilitasi tiga pasang calon yang sudah ditetapkan, yaitu pasangan calon nomor urut 1 Jilly G. Eman dan Virgie Baker, pasangan calon nomor urut 2 Carroll J. A. Senduk dan Wenny Lumentut dan pasangan calon nomor urut 3 Robert P. A. Pelealu dan Fransiscus H. A. Soekirno.

Ketiga pasang calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon ini berpartisipasi aktif dalam koordinasi dan diskusi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon. Hal ini terus didorong oleh KPU Tomohon sebagai penyelenggara guna membangun komunikasi yang intens namun tetap berkeadilan, dengan cara selalu melibatkan tim penghubung dari ketiga pasang calon.

KPU memandang hal ini sangat diperlukan karena dengan komunikasi yang baik, berbagai potensi masalah sebagai *side effect* dari berbagai kebijakan dalam tahapan yang telah diatur, dapat diantisipasi secara arif dan dikoordinasikan dengan aktif dengan berbagai *stakeholder* misalnya institusi keamanan, Bawaslu dan institusi terkait lainnya. Hal ini demi mewujudkan cita-cita terlaksananya pesta demokrasi yang aman dan damai.

Dampak dari tiga pasangan calon yang berkompetisi memenangkan hati rakyat ini, secara tidak langsung melahirkan potensi polarisasi masa pendukung yang cukup besar di kota Tomohon. Euforia suasana menjelang Pilkada

pun makin menghangat menghiasi hitung mundur hari-H pemungutan suara.

Hal ini dikarenakan masing-masing pendukung berusaha memperoleh simpati dan perhatian semua masyarakat untuk memilih pasangan calon mereka. Mulai dari saling mengangkat prestasi dan kelebihan masing-masing pasangan calon, mengungkap *track record* mereka, merangkai slogan dan kata bijak hingga menjagokan kelebihan dari masing-masing pasangan calon.

Namun, yang tidak dapat dihindari juga, para pendukung memanfaatkan kemajuan teknologi berupa saring serang di dunia maya seperti media sosial. Suasana media sosial dihiasi dengan percakapan antar pendukung, mulai dari hal-hal yang positif dan bersifat fakta hingga kalimat-kalimat yang bersifat opini yang seolah-olah ingin menjatuhkan salah satu paslon. Memang hal ini disinyalir juga disebabkan oleh karena banyak masyarakat yang menghabiskan waktu mereka di rumah dan lebih aktif menggunakan media sosial disaat masa pandemi, sehingga membuka ruang untuk para pendukung memanfaatkan fasilitas media sosial yang

memang jika ditinjau dari *cost* anggaran kampanye, tidak membutuhkan biaya besar, namun dapat berpengaruh besar dalam membangun opini di masyarakat.

Belum lagi masalah kebiasaan berkumpul masyarakat jika mulai memasuki masa Pilkada. Pada masa sebelum pandemi, para kader dan simpatisan cenderung lebih aktif dan berkonsentrasi untuk mengumpulkan masa di tempat-tempat tertentu bahkan di rumah kediaman para pasangan calon. Sedangkan dalam masa pandemi, hal ini tidak diperbolehkan lagi oleh pemerintah, mempertimbangkan protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus Covid19.

Bisa dilihat juga pada fasilitas umum seperti jalan raya, dimanfaatkan para pendukung untuk melakukan konvoi, sambil mengenakan atribut partai maupun identitas masing-masing pasangan calon. Dapat didapati pula banyak pengendara yang tidak mematuhi protokol kesehatan berupa memakai masker dan menjaga jarak. Hal ini juga acap kali menyebabkan pertemuan antar rombongan pendukung pasangan calon sehingga terjadi saling ejek ataupun

membunyikan klakson dan suara bising dari kendaraan mereka.

Berbagai masalah ini terjadi dan menjadi kekhawatiran khusus dari penyelenggara pemilihan, tetapi juga menjadi *concern* dari para institusi yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Hal ini pun sudah menjadi kewajiban dari KPU Tomohon sebagai penyelenggara untuk berusaha melaksanakan tahapan namun tetap memperhatikan keamanan dan kenyamanan umum, juga yang terpenting menjaga protokol kesehatan.

Kondisi ini tentu mendorong KPU Tomohon untuk andil dalam usaha preventif, guna mengantisipasi terjadinya konflik di masyarakat yang dapat berimplikasi pada berjalannya tahapan pemilihan yang berintegritas dan aman. KPU sebagai pengambil kebijakan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan memiliki posisi yang paling strategis untuk dapat mengkoordinasikan berbagai persoalan maupun usaha preventif tersebut. Segala kebijakan dapat disesuaikan dengan tetap berorientasi pada pedoman pelaksanaan maupun petunjuk teknis.

KPU Tomohon dengan penuh keterbukaan dan interaktif membangun komunikasi dan hubungan dengan para pasangan calon, baik secara langsung maupun melalui tim penghubung yang telah dimandatkan oleh para pasangan calon. Pintu *helpdesk* dan ruang diskusi dibuka selebar-lebarnya namun dengan hati-hati agar tetap menjaga rasa kejujuran dan keadilan bagi para pasangan calon dan tim penghubung.

Satu demi satu tahapan direncanakan dan dilaksanakan dengan melaksanakan diskusi yang mendahuluinya, bersama dengan para pasangan calon ataupun tim penghubung. Misalnya dalam hal kehadiran pasangan calon bersama simpatisan pasangan calon di kantor KPU Tomohon, dalam hal pengerahan massa, serta kegiatan-kegiatan kampanye yang harus benar-benar memenuhi protokol kesehatan yang telah diatur.

Metode ini dengan penuh keterbukaan dan komunikatif dapat diterima dengan baik oleh para pasangan calon maupun tim penghubung. Sehingga komunikasi berupa berbagai diskusi dan musyawarah ini menghasilkan

keputusan-keputusan dan kesepakatan baik antara KPU, Bawaslu, institusi keamanan dan ketiga pihak pasangan calon sebagai peserta Pilkada. Sebagai potensi-potensi masalah, konflik dan pelanggaran protokol kesehatan dapat dicegah dan diatasi.

Dalam pelaksanaannya para pasangan calon dan tim sukses terus menghimbau dan mengarahkan para simpatisan dan pendukung untuk menahan diri dan tetap berjalan sesuai koridor hukum maupun peraturan dan kesepakatan bersama yang telah dibuat. Terutama agar tetap menjaga protokol kesehatan demi kebaikan bersama. Walaupun pada kenyataannya masih terdapat beberapa pelanggaran dan konflik kecil di masyarakat, namun hal ini dapat segera diatasi dan dicegah agar tidak terjadi konflik horizontal berkepanjangan di tengah masyarakat.

Budaya ‘Baku Kase Inga’ di tengah masyarakat Kota Tomohon memang masih terasa dan hal ini berdampak pada penyelesaian berbagai masalah yang terjadi, terutama yang terjadi dalam masa tahapan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon. Budaya ini berarti saling mengingatkan

antara satu dengan yang lain. Ini menjadi penting, karena ruang pekerjaan penyelenggara Pemilu selalu dibatasi oleh peraturan berupa produk-produk hukum. Makna pedagogis yang terkandung dalam setiap produk hukum diterjemahkan dengan teliti untuk diaktualisasikan di tengah masyarakat, dengan cara komunikasi yang baik dan bahasa yang dapat diterima. Pada akhirnya budaya ‘Baku Kase Inga’ dapat terkolaborasi dengan sendirinya menghasilkan penyebarluasan produk hukum di tengah kehidupan masyarakat itu sendiri.

Kepedulian dan kecakapan membangun komunikasi dari berbagai pihak tentu menjadi hal yang utama untuk dikedepankan ditengah kehidupan politik dimana kita harus tetap menjaga hak demokrasi setiap warga negara. Secara tidak langsung masyarakat dapat menginterpretasikan hal ini sebagai hal yang positif sehingga dapat berdampak pada tingkat kepercayaan publik yang tinggi bagi penyelenggara Pemilu. (*)



SALING SUPPORT: Sekretaris KPU Tomohon Stella Sompe saat bersama-sama dengan Komisioner KPU RI Viryan Aziz dan komisioner KPU Provinsi serta Kota Tomohon

SINERGITAS KOMISIONER SEKRETARIAT, TAHAPAN PILKADA LANCAR

STELLA S SOMPE

(Sekretaris KPU Kota Tomohon)

RABU 9 Desember Tahun 2020 menjadi sejarah yang istimewa bagi bangsa Indonesia. Di hari itu, digelar Pilkada

di 270 (Provinsi dan kota/kabupaten) daerah, saat Pandemi Covid-19 masih sedang gawat-gawatnya.

Sesuai Pasal 22 E UUD 1945 diamanatkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan, adil guna menciptakan demokrasi yang berkualitas.

Kita tahu bersama sebagai lembaga yang bersifat hirarki, KPU yang merupakan penyelenggara Pemilu sangat kental dengan slogan kolektif kolegial, karena kepemimpinan kolektif kolegial adalah istilah umum yang merujuk kepada sistem kepemimpinan yang melibatkan beberapa orang pimpinan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan dengan mekanisme tertentu, yang ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara dengan mengedepankan semangat kebersamaan.

Masing-masing pimpinan itu memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan dan/atau kebijakan dalam lembaga tersebut. Lembaga KPU dalam konteks

pengambilan keputusan bersifat kolektif kolegial, mengambil kebijakan tidak oleh ketua saja tapi seluruh komisionernya punya andil dan punya hak yang sama.

Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang wilayah kerja terdiri dari 5 Kecamatan, 44 Kelurahan, 220 Tempat Pemungutan Suara (TPS), Daftar Pemilih Tetap sebanyak 73.633 orang, memiliki dinamika tersendiri tetapi juga ada kebanggaan tersendiri karena mengukir prestasi fantastis, yakni partisipasi masyarakat tertinggi kategori kota di Indonesia sebesar 91,98 %.

Secara kelembagaan yang bersifat hirarkhi, KPU Tomohon telah sukses menyelenggarakan pemilihan di Kota Tomohon. Ini tidak lepas juga adanya sinergitas komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon yang saling menghormati tugas, wewenang, dan kewajiban atau kedudukan hukum (legal standing) masing-masing, yang kemudian ditindak lanjuti kepada jajaran penyelenggara di tingkat kecamatan, kelurahan, serta dengan para *stakeholder*.

Fenomena selama tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 dalam kebijakan publik di sekretariat, seorang sekretaris dan jajaran menjalankan tugas, wewenang, kewajiban sesuai aturan yang berlaku, dengan juga menerapkan teori implementasi kebijakan publik oleh George C. Edward Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92). Disebutkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel.

- A. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

3 Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press

- B. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- C. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

- D. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Meski begitu, yang paling penting adalah menjaga sinergitas komisioner dengan personil Sekretariat KPU kota Tomohon, dan komunikasi yang intens dengan badan Adhoc penyelenggara Pemilihan. Komunikasi ini sendiri tidak mengurangi nilai profesionalitas yang berintegritas, karena terkait dukungan teknis administrasi, ketersediaan dana, pengadaan, serta distribusi logistic.

Terkait logistik plus Alat Pelindung Diri (APD), semua dilakukan dengan ketelitian yang ekstra. Ini terbukti ketika pelaksanaan Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 di kota Tomohon seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di 44 kelurahan tidak ada yang menyampaikan adanya kekurangan logistic Pilkada dan APD.

Iplikasi implementasi kebijakan publik oleh KPU kota Tomohon tercermin saat tahapan penetapan pasangan calon terpilih, 21 Januari 2021. Dimana saat itu ditetapkan pasangan calon atas nama Caroll JA Senduk SH dan Wenny Lumentut SH sesuai surat keputusan KPU Kota Tomohon Nomor: 35/PL.02.7-Kpt/7173/KOTA/I2021, tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Terpilih dalam Pemilihan Tahun 2021 oleh Ketua Harryanto Y. S Lasut dan para anggota Robby Goliath, Stenly J. Kowaas, Jacobus A. Wowor dan Albertien G. V. Pijoh.

Keputusan KPU Tomohon itu sendiri tidak mengalami resistensi atau penolakan oleh pihak tertentu di Mahkamah Konstitusi. Inilah beberapa testimoni yang dalam

fakta dan data secara terang dan jelas bahwa kami adalah penyelenggara pemilihan, bersama kami bisa (*we are the organizer of election, together we can*) telah terbukti. (*)

BAGIAN 2

STRATEGI SOSIALISASI DAN DINAMIKA PARTISIPASI MASYARAKAT



ERA BARU: Komisioner Stenly Kowaas saat *live quiz* Pilkada

TRANSFORMASI SOSIALISASI

*Inovasi dan Kreativitas KPU Tomohon
di Pilkada New Normal*

STENLY KOWAAS

(Anggota KPU Kota Tomohon)

SETIAP era ditandai dengan perubahan. Oleh karena itu, orang dan lembaga yang tidak *aware* dengan perubahan,

pasti akan tertinggal dan hanya bisa meratap menahan pahit melihat kesuksesan pihak lain yang cepat beradaptasi dengan perubahan itu sendiri.

Dalam dua dekade terakhir, teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan perubahan fundamental di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam di internal lembaga pemerintah. Perubahan yang cepat membuat tantangan baru bagi semua pimpinan lembaga, entah itu swasta maupun pemerintah. Tidak ada pilihan lain selain secepatnya beradaptasi dan bertransformasi dengan lingkungan baru.

Pakar Manajemen Universitas Indonesia Rhenald Kasali dalam bukunya “Disruption: Menghadapi Lawan-Lawan Tak Kelihatan” mengatakan, banyak yang mengaku kebingungan bahkan sulit bertindak dengan perubahan yang ada. Ini karena masih saja mengasumsikan dan mengacu pada cara-cara lama.

4 Kasali, Rhenald. 2017. *Disruption: Menghadapi Lawan-Lawan Tak Kelihatan dalam Peradaban Uber*”. Jakarta. Gramedia

Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga dituntut melakukan hal yang sama. Secepatnya bertransformasi. Menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan market (pemilih), agar produk (program) yang disusun dan diimplementasikan di lapangan cocok dengan kondisi kekinian. Jika tidak peka dengan perubahan, mempertahankan kejayaan kelembagaan dengan mindset konvensional, sangat mungkin hasil yang dituai tidak akan sesuai ekspektasi.

Di dua jilid Pemilu (2014-2019) dan Pilkada (2015-2020), sangat terlihat komitmen usaha KPU memaknai perubahan lewat berbagai program dan kebijakan. Sistem informasi data pemilih (Sidalih), Sistem informasi partai politik (Sipol), Sistem informasi penghitungan (Situng), Sistem informasi pencalonan (Silon) dan terakhir Sistem Elektronik Rekap (Sirekap), adalah wujud aktualisasi konkrit KPU dalam meletakkan fondasi penting di era transformasi informasi dan komunikasi.

Bahwa akan ada sedikit dinamika bahkan kontroversi, hal tersebut adalah residu normatif dari perubahan itu sendiri. Yang terpenting, KPU sudah membuat langkah maju

mendobrak kekakuan yang selalu identik dengan beberapa lembaga pemerintahan. Hasilnya mungkin tidak akan langsung spektakuler. Tapi di masa yang akan datang, pilihan beradaptasi lebih dini dengan perubahan pasti akan terlihat hasilnya. Dan yang terpenting, entitas yang ada di KPU sekarang dan yang akan datang, sudah mendapatkan fondasi absolut terhadap apa yang dibutuhkan lembaga dan masyarakat modern.

Lembaga yang progresif memang harus seperti itu. Berani tidak populer karena mengambil resiko lewat rencana program jangka panjang yang lebih goal-nya sustainable. Mengejar kesuksesan jangka pendek hanyalah pilihan buat orang-orang yang tidak visioner dan kurang memedulikan nasib lembaga di waktu yang akan datang.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 terang saja makin mendesak KPU untuk memperdalam dan memperluas spektrum transformasi. Penyebabnya tidak lain karena gelaran pesta demokrasi lokal itu dilaksanakan saat Pandemi Covid-19. Semua tahapan dijalankan dalam tatanan kenormalan baru. Pola-pola lama selain tidak relevan lagi

dengan situasi, akan membuat penyelenggara, peserta Pilkada dan masyarakat rentan terinfeksi Virus Corona.

KPU Kota Tomohon sendiri merancang banyak metode sosialisasi metode digital ketimbang konvensional. Tantangan terbesarnya adalah kreativitas. *Content* yang atraktif dan inovatif harus dirancang menyentuh semua segmen pemilih. Tidak hanya kepada pemilih pemula dan pemilih muda yang lebih bersenyawa dengan dunia digital, tapi juga kepada segmen pemilih dengan *range* usia 30-50 tahun. Sementara untuk pemilih di atas 50 tahun, apalagi yang sudah lanjut usia (Lansia), pendekatan metode konvensional seperti tatap muka mau tidak mau harus dilakukan.

Kerja keras keluarga besar KPU Kota Tomohon sendiri berbuah hasil menawan. Usai proses pemungutan dan penghitungan suara digelar, Tomohon nangkring di posisi puncak sebagai daerah dengan tingkat partisipasi pemilih tertinggi untuk kategori kota. Capaiannya 91,35 persen. Hasil yang tentu saja mencengangkan, mengingat sebelumnya banyak pihak ramai-ramai memprediksi minat pemilih datang

di Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan terjun bebas karena takut terinfeksi Covid-19. Hasil di lapangan akhirnya memproduksi hal yang berbeda.

Boleh saja kalau belakangan banyak kalangan memberikan pendapat baru, bahwa tingginya tingkat partisipasi pemilih di Tomohon disebabkan oleh karena level kontestasi yang tinggi antar paslon dan pendukung masing-masing. KPU Tomohon tentu tidak dalam posisi untuk melarang orang berpikiran seperti itu. Sah-sah saja. Demokrasi memang melazimkan perbedaan argumentasi. Tapi hasil akhir tetap saja hasil akhir.

91,35 persen bukanlah angka yang lahir karena faktor tunggal. Banyak elemen yang saling berkontraksi dan kemudian membentuk elemen pemicu dalam mendorong pemilih berduyun-duyun datang di TPS. Salah satunya, tentu saja, karena pilihan KPU Tomohon memberi prioritas besar pada metode sosialisasi secara digital, yang mana itu merupakan wujud transformasi penyelenggara yang akrab dengan perubahan.



POLA NEW NORMAL: Flyer promosi iven *Quiz* Pilkada 2020 KPU Tomohon

Kunci Utamanya Kreativitas

Platformnya tersedia. Daya jangkanya tanpa tanding. *Output*-nya konkrit. Begitulah kira-kira memaknai era digital. Tantangannya cuma satu; kreatif. Lebih dahsyat dampaknya kalau kreativitas dibungkus dengan ide simple tapi imajinatif. Jika simpul mampu dikendalikan, hasil manis tinggal menunggu waktu.

Seperti dikatakan Rudi Tarumingkeng dan Chandra Suwondo dalam buku “Kreativitas & Inovasi Kunci Kesuksesan”: Semua berubah, kecuali perubahan itu sendiri. Waktu berjalan terus, zaman berubah. Kebutuhan manusia juga berubah sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kreativitas dan inovasi merupakan kebutuhan yang harus dilakukan oleh pribadi maupun organisasi untuk dapat bertahan dan berkembang cepat.

Menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) saat Pandemi Covid-19, “memaksa” Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tomohon beradaptasi dan berupaya mengatasi kondisi masalah yang dihadapi. Kalau sebelumnya prosentase program sosialisasi digital dan konvensional masih 50-50, kehadiran Virus Corona membuat KPU Kota Tomohon mengubah strategi dengan menempatkan prosentase sosialisasi digital menjadi lebih dominan.

5 Tarumingkeng, Rudi dan Chandra Suwodono. 2019. *Kreativitas & Inovasi Kunci Kesuksesan*. Jakarta. Gramedia

Dari sekian banyak ide kreatif yang diusulkan dalam sejumlah rapat internal, KPU Tomohon mematenkan beberapa metode sosialisasi, yang dianggap paling memungkinkan, efektif dan bersenyawa dengan kebutuhan pasar pemilih Pilkada. Berikut daftarnya:

- 1. Quiz Pilkada**
- 2. Tik Tok Challenge**
- 3. Virtual Run For Vote**
- 4. Podcast**
- 5. Lomba Selfie di TPS**

Untuk melengkapi kedoyanan KPU Tomohon menggenjot sosialisasi digital, hampir 20 media massa berbasis *online* digandeng untuk menambah massif sosialisasi secara digital. Hampir semua kegiatan maupun promosi even KPU Tomohon dipublikasikan pihak eksternal, dalam hal ini media *online*.

Sederet metode sosialisasi di atas belum termasuk *flyer-flyer* dengan *design* kekinian yang setiap hari diviralkan

lewat akun resmi sosial media KPU Kota Tomohon, apakah itu *Facebook*, *Instagram* dan *channel Youtube*. Dikemas dengan menarik karena *content* yang di-*upload* harus memiliki karakter kuat dan daya tarik maksimal. Masyarakat sekarang makin selektif. Jika tidak menggoda, *content* di media sosial tidak akan menarik simpati. Sekali lagi kunci utamanya kreativitas.

Rating Tinggi Kuis Pilkada



DIMINATI: Penonton sekaligus peserta *live Quiz* Pilkada Tomohon 2020 selalu tinggi.

Quiz Pilkada terbukti menjadi salah satu metode baru yang *sexy*. Awalnya dirancang sepekan sekali. Tapi karena *rating*-nya terbilang tinggi, kadang harus dibuat dua kali seminggu. Padahal hadiahnya jauh dari mewah. Kami hanya membuat sejumlah *gift* yang murah-meriah seperti payung, kaos, *tumbler*, plus Alat Pelengkap Diri (APD) Covid-19 seperti *hand sanitizer* dan masker.

Program *Quiz* Pilkada dibuat simple. Tidak berat. Tujuannya supaya lebih penonton yang sekaligus jadi peserta jadi tertarik. Durasinya juga pendek. Paling lama 15 menit. Akan tetapi, pesan sosialisasi cepat ditangkap warga. Diawali dengan sosialisasi singkat terkait tahapan yang sementara berlangsung, penonton mau tidak mau harus memperhatikan karena soal akan diambil dari materi sosialisasi yang disampaikan secara *live* di akun *facebook* KPU Tomohon.

Begitu pertanyaan disampaikan, pemirsa *Quiz* Pilkada cukup mengetik jawaban di kolom komentar akun *facebook*. Yang benar dan paling cepat mengetik jawaban yang menang. Setiap *episode Quiz* Pilkada hanya ada tiga pertanyaan. Dibuat begitu supaya lebih banyak yang

penasaran. Kalau penasaran karena tidak menang, tentu mereka akan menonton dan ikut lagi di *episode* selanjutnya. Begitu strategi *entertainment* yang lazim digoreng para produser program-program televisi *mainstream*.

Quiz Pilkada terbukti melahirkan *multiplier* efek yang kuat. Selain karena pesan sosialisasi benar-benar diterima secara utuh, *netizen* yang meminta pertemanan dengan FB KPU Tomohon melonjak tajam. Operator sampai harus membuat *fanpage* khusus, karena akun *facebook* biasa hanya dibatasi 5000 pertemanan. Di dunia media sosial, jumlah pengikut adalah aset terbesar. Makin banyak, makin kuat dampaknya. Ibarat di dunia perbankan, makin banyak nasabah otomatis nilai kapitalisasi bank makin bertambah.

Dalam kaitan dengan sosialisasi tahapan Pilkada, *Quiz* Pilkada adalah berkah tak ternilai. Kalau di banyak kegiatan sosialisasi secara tatap muka, kehadiran peserta dalam jumlah banyak bukan jaminan bahwa yang disampaikan bisa ditangkap oleh semua yang hadir. Banyak yang sekadarnya memenuhi undangan penyelenggara, tapi tidak benar-benar memperhatikan materi yang disosialisasikan. Berbeda dengan

Quiz. Pilkada. Penontonnya otomatis harus memperhatikan materi yang dilontarkan *host*, karena potongan-potongan materi yang disampaikan berpotensi jadi pertanyaan. Inilah yang dinamakan upaya minimum, tapi hasilnya maksimum.

Memanfaatkan Tren TikTok Challenge



TREN BARU: Peserta menampilkan ajakan memilih lewat karya *TikTok*. Puluhan *video* peserta disukai puluhan ribu warga di akun sosial media mereka masing-masing.

Di era digital, semua serba cepat berubah. Hampir selalu ada tren baru yang muncul. Memanfaatkan tren untuk mencapai tujuan tentu harus jadi opsi. Sesuatu yang jadi tren

biasanya memengaruhi gaya hidup masyarakat. *TikTok* tidak terkecuali. *Platform* ini sudah menjadi sedemikian fenomenal sejak diluncurkan. Anak muda sampai orang tua, “terinfeksi” dengan virus *TikTok*. Aplikasi ini memang sangat *booming* karena sangat bersenyawa dengan rupa-rupa gaya hidup jaman *now*, yakni narsis dan lebay. KPU Tomohon juga tidak menyia-nyiakan tren ini. Dihadirkanlah yang namanya Pilkada *TikTok Challenge*.

Sejak di-*publish* di akun sosial media (Sosmed) KPU Tomohon *Facebook* dan *Instagram*, sambutan masyarakat begitu tinggi. *Flyer* Pilkada *TikTok Challenge* bahkan jadi viral sekira dua pekan. *TikTok lovers* di Tomohon berlomba-lomba mem-*posting flyer* tersebut, sembari men-*tag* sesama rekan dunia maya mereka, yang merupakan warga dan pemilih di Kota Tomohon.

Supaya *aura* Pilkada sedemikian kental di Pilkada *TikTok Challenge*, semua peserta (tim maupun perorangan) wajib memakai *jingle* Pilkada KPU Provinsi dan KPU Tomohon sebagai *backsound*. Ini juga. Berkat lomba ini, *jingle* Pilkada KPU Provinsi dan KPU Tomohon menjadi

sedemikian populer di Tomohon. Bahkan di angkutan-angkutan umum di Kota Tomohon, *jingle* ini sering sekali diputar.

Syarat lainnya, semua gerakan yang dilakukan tidak boleh menampilkan simbol-simbol yang identik dengan peserta Pilkada. Bagaimanapun juga, tujuan lomba ini harus bersih dari hal-hal yang berbau kontestasi. Sebagai penyelenggara, KPU Tomohon menjaga benar supaya tidak jadi sorotan di kemudian hari. Peserta yang tidak patuh, tentu saja tidak mendapat nilai yang bagus.

Hasil karya setiap peserta juga wajib di-*upload* di *Facebook* dan *Instagram*, dengan men-*tag* akun KPU Tomohon. Pemenang akan ditentukan oleh ramai tidaknya tanggapan masyarakat di *platform* Sosmed peserta. Sebenarnya inilah tujuan utama lomba ini digelar, yakni ajakan dating ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020 dimunculkan lewat karya yang bisa menjangkau banyak orang.

Benar saja. Dari sekian banyak peserta yang ikut, ada puluhan karya peserta yang mendapatkan atensi dahsyat dari

masyarakat luas. Ada malah yang mendulang belasan ribu *like* (*Facebook*) dan simbol hati (*Instagram*) di unggahan mereka, yang mana ini jadi salah satu penilaian utama bagi calon pemenang. Mencengangkan memang. Kami sebenarnya sudah memprediksi bahwa *TikTok Challenge* akan jadi heboh. Tapi yang terjadi lebih dari ekspektasi awal.

Memang benar. Era sekarang yang dibutuhkan memang bukan lagi melulu *work hard*, tapi *work smart*. Yang kreatif memanfaatkan tren dan digitalisasi akan lebih akrab dengan kesuksesan. Sesederhana itu rumusnya.

KPU Pelopor Virtual Run For Vote



DOUBLE IMPACT: Selain mengajak warga Tomohon untuk hidup sehat di era Pandemi Covid-19, ratusan *runner* di Tomohon mengajak pemilih untuk ke TPS, lewat postingan-postingan di sosial media.

Pandemi Covid-19 membuat banyak warga meng-*upgrade* kembali pola hidup sehat. Olahraga salah satunya. Berlari dan bersepeda menjadi dua olahraga paling digandrungi, karena selain membuat tubuh bugar, dua tipe olahraga ini tidak terlalu sulit untuk dilakoni.

KPU Kota Tomohon memanfaatkan situasi ini untuk dijadikan metode sosialisasi, lewat iven bertajuk *Run For Vote*. Konsepnya bukan *offline*, tapi *online*. Perlombaannya dikemas *virtual*. Mulai dari pendaftaran sampai saat *race*, semua dilakukan secara *online*. Meski *virtual run* terbilang baru pertama kali Tomohon, peserta membludak. Saat informasi pembukaan pendaftaran di *share* di akun *Facebook* dan *Instagram* KPU Tomohon, *link* pendaftaran langsung dibanjiri pendaftaran.

Bayangkan saja. Tidak sampai sehari, kuota 150 *slot* pendaftar awal sudah langsung *sold out*. Tim kerja *Virtual Run For Vote* sampai geleng-geleng kepala melihat luar biasanya animo warga Tomohon terhadap iven ini. Kolom komentar akun *Facebook* dan *Instagram*, serta nomor *contact person* tim kerja langsung dijejali pertanyaan sampai protes. Rata-rata menanyakan kenapa pendaftaran sudah ditutup, dan atau meminta KPU Tomohon menambah kuota *slot* peserta.

Melihat respon tinggi warga, akhirnya diputuskan kuota peserta ditambah. Apa boleh buat. Kami harus menambah *order jersey* dan medali, demi untuk mewujudkan

aspirasi warga yang tidak sempat mendapatkan *slot* di pendaftaran awal. Kuota ditambah 50 peserta. Lagi-lagi, hanya hitungan jam *slot* sudah *sold out*. Fantastis.

KPU Kota Tomohon membuat syarat dan ketentuan, yang mana tujuannya *double impact*. Selain menjadi bagian dari lembaga pemerintahan yang intens mendorong warga untuk menjalani pola hidup sehat, setiap peserta wajib meng-*upload* semua etape keikutsertaan mereka di *Virtual Run For Vote* di akun sosial media (Sosmed) *Facebook* dan *Instagram* masing-masing, dengan men-*tag* akun Sosmed KPU Tomohon.

Simple-nya begini. Setiap peserta akan mendapatkan *flyer E-Bib* yang dikirimkan ke *email* masing-masing. *Flyer* tersebut wajib mereka *upload* di akun *Facebook* dan *Instagram* masing-masing, dengan syarat menyertakan kata-kata ajakan memilih, *plus hastag* Pilkada 9 Desember 2020, ayo ke TPS dan jangan Golput. Itu berarti, sosialisasi terkait Pilkada tidak hanya dilakukan KPU, tapi juga dilakukan ratusan peserta *Virtual Run For Vote*. Warga tidak hanya berpartisipasi, tapi sudah menjadi agen sosialisasi KPU

Tomohon dalam mengumandangkan Pilkada. *Multiplier* efeknya sangat maksimal.

Ketika periode *race* digelar, setiap hasil lari yang direkam lewat rupa-rupa aplikasi olahraga, juga wajib di-*upload* di Sosmed masing-masing, tentu dengan men-*tag* akun *Facebook* dan *Instagram* KPU Tomohon. Lagi-lagi kata-kata atau kalimat ajakan memilih dijadikan *caption* di setiap unggahan, lengkap dengan sejumlah hastag Pilkada.

Saat akhir periode lomba, yang diatur beberapa hari sebelum hari H Pilkada, 9 Desember 2020, peserta menjemput *jersey-jersey* dan medali *finisher*. Lagi-lagi semua peserta mem-*posting* ajakan memilih dengan memakai *Jersey* lengkap dengan medalnya. Bisa dibayangkan *impact*-nya, saat 200 peserta mewarnai jagad dunia maya Tomohon dengan postingan-postingan ajakan hidup sehat dan ajakan ke TPS untuk memilih calon kepala daerah Sulut dan Tomohon.

Tidak hanya memelopori dimulainya era lomba lari *virtual* di Tomohon, KPU juga mampu mendorong warga untuk hidup sehat dan membantu secara nyata kampanye memilih di Pilkada 9 Desember 2020. Tidak salah memang

quote sejumlah tokoh milenial terkait dunia digitalisasi:
“Yang dibutuhkan sekarang bukan *work hard*, tapi *work smart*.”

Broadcast Pilkada Berwujud Podcast



PLATFORM BARU: KPU Tomohon ikut menjajal cara para selebritis untuk melakukan promo/sosialisasi lewat siaran *Podcast*.

Perubahan menghempas semua industri. Tidak terkecuali bisnis pertelevisian. Para selebritis tidak lagi membutuhkan *platform* televisi untuk bisa menjual pesona mereka. Cukup membuat akun sosial media seperti *Facebook*, *Instagram* dan *channel Youtube*, dikoneksikan dengan *internet*, *the show go on* lewat acara kekinian bertajuk *Podcast*.

KPU Tomohon ikut tergiur mencicipi *Podcast* ini. Dan, supaya atraktif serta menarik banyak penonton, konsepnya benar-benar dibuat sama dengan yang dikemas oleh para selebritis nasional. Ada *host*, kemudian ada bintang tamu. Menyematkan kata narasumber jadi sangat terkesan jadul. Lebih keren disebut bintang tamu.

Episode Podcast hadir seminggu sekali. Ruangan Rumah Pintar Pemilu (RPP) dikemas jadi seperti studio *mini*, meski dengan perlengkapan *broadcasting* yang tidak se-*glamour* yang ada di studio-studio televisi. Kan yang penting *output*-nya. Bukan fasilitasnya. Memang diakui kualitas siaran tak sementेरeng yang di televisi, tapi minimal sosialisasi program dan tahapan bisa diketahui masyarakat

lewat siaran di akun *Facebook*, *Instagram* dan *Channel Youtube* KPU Kota Tomohon.

Istilah-istilah seperti *cut*, *action* dan *pariwara*, akhirnya tersaji di kantor KPU. Memang tidak *super* rapi. Tapi untuk ukuran staf KPU yang hanya bermodal nekat, hasilnya sudah sangat maksimal. Yang membanggakan, semua kru *podcast* mulai dari produser acara, *cameraman* dan lain-lain yang terlibat, semuanya *full* staf KPU Kota Tomohon

Bintang tamu yang tampil di *Podcast* KPU variatif. Sering Komisioner KPU Tomohon, tapi terkadang mengundang pihak eksternal. Seperti pimpinan Bawaslu dan *stakeholder* terkait lainnya. Konsepnya *host* memberikan pertanyaan seputar tahapan serta hal-hal teknis Pilkada, kemudian bintang tamu memberi penjelasan.

Seperti kemasan *Podcast* selebritis pada umumnya, suasana dibuat tidak kaku. Sangat santai. Supaya semua mengalir, dan masyarakat Tomohon yang menonton tidak mendapatkan suguhan yang membosankan. Kan seperti itu tujuan *talkshow* di televisi-televisi *mainstream*. Ada *talk*

(pembicaraan), tapi juga harus ada unsur *show*. Supaya menarik.

Podcast juga sekali lagi merupakan cerminan program kekinian. Budgetnya kaki lima, hasilnya bintang lima. Bayangkan saja jika harus mengikat Kerjasama dengan televisi. Harga sekali *live* durasi satu jam, biayanya pasti luar biasa mahal. Bandingkan dengan *Podcast* yang fasilitas produksinya seadanya, tapi mampu menarik penonton dalam jumlah banyak.

Radio juga begitu. Benar bahwa suaranya didengar masyarakat, tapi emosi yang tergambar dari mimik *host* dan bintang tamu tidak bisa dilihat warga. Auranya tentu saja berbeda. *Podcast* emosinya lebih kuat. Tidak mengherankan bahwa konsep ini menjadi sedemikian *booming* saat ini. Sebuah kebanggaan KPU Tomohon mengambil bagian dari era baru *broadcasting*.

Hebohnya Lomba Selfie di TPS



NARSIS POSITIF: Peserta lomba *selfie* di TPS dengan karya kreatif mereka.

Inilah etape terakhir iven KPU Tomohon dalam proses sosialisasi dan pendidikan pemilih di Pilkada 2020. Lomba *Selfie* di TPS. Sejak pengumuman lomba ini di-bom KPU Tomohon lewat akun resmi Sosial Media (Sosmed) KPU Tomohon beserta seluruh anggota PPK dan PPS lewat

akun Sosmed mereka masing-masing, tanggapan masyarakat sudah sedemikian heboh.

Kali ini KPU Tomohon memang tidak tanggung-tanggung menyiapkan hadiah. Daya tariknya memang di hadiah uang tunai. Makin menggiurkan nilainya, makin banyak yang tertarik. Tidak rugi KPU Tomohon mengguyur Lomba *Selfie* di TPS dengan anggaran Rp16 Juta, jika warga yang awalnya tidak tertarik datang ke TPS memilih hadir karena ingin ikut lomba.

Lomba *Selfie* di TPS sendiri adalah jilid kedua. Yang pertama lahir saat Pemilu 2019. Pesertanya luar biasa banyak. Dan ketika tujuh pemenang dipublikasikan membawa pulang hadiah jutaan rupiah waktu itu, tidak sedikit yang dirundung rasa kecewa karena melewatkan momentum tersebut.

Tak heran, saat digelar lagi di Pilkada 2020, peserta makin berjubel. Caranya pun tidak sulit. Cukup datang ke TPS, memilih, ber-*selfie* ria, setelah itu mereka menguploadnya di sosial media masing-masing. Tentu dengan catatan, unggahannya harus ditautkan dengan akun *Facebook* atau *Instagram* KPU Tomohon. Fotonya juga harus

menampilkan unsur jari yang sudah ada tintanya. Sebagai penanda sudah memilih.

Makin narsis dan atraktif fotonya, makin besar peluang menang. Menampilkan foto keluarga pasca memilih, tentu mendapatkan kredit poin khusus. Tak heran, banyak peserta meng-upload foto sekeluarga pasca memilih. Lomba *selfie* di TPS ini memiliki magnet strategis dalam menarik warga untuk berbondong-bondong menyalurkan hak suara. Persis sama dengan tagline lomba ini. “Pilih calonnya, bawa pulang hadiahnya.” Benar-benar *happy ending* iven.

Team Work Kuat, Hasil Pasti Hebat

“*Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships.*” *Quote* ikonik dari legenda hidup klub Basket NBA *Chicago Bulls*, Michael Jordan, adalah filosofi holistik yang menginspirasi KPU Tomohon dalam menjelajahi tahapan demi tahapan Pilkada 2020. “Talenta dapat memenangkan berbagai permainan, namun sebuah

kerja sama tim dan juga kecerdasan intelektual dapat memenangkan berbagai kejuaran.”

Sebagai Komisioner Divisi Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, penulis tentu memiliki kemewahan untuk merancang pola dan metode sosialisasi. Tapi keangkuhan itu disingkirkan sejauh mungkin, tidak hanya karena segmen sosialisasi yang beragam, tapi era digital dan aura kekinian membutuhkan kreativitas dan inovasi program dari banyak pihak. Khususnya anak-anak muda.

Sejak awal penyusunan program sosialisasi Pilkada 2020, penulis sudah begitu optimis karena meyakini KPU Tomohon kali ini dianugerahi *squad* yang komplit. Ada yang jenius membuat konten video, ada yang ahli membuat *flyer-flyer* imajinatif, ada yang punya segudang ide kreatif di kepalanya, ada juga yang memiliki ketekunan dalam hal data dan administrasi, sementara ada yang punya daya jelajah tinggi dalam proses implementasi program di lapangan. Benar-benar *dream team*.

Hampir semua konsep program berbasis platform digital lahir dari tim ini. Peran saya hanya menggambarkan *output* kegiatan yang diharapkan, memberi bumbu semangat kepada masing-masing personil tim, serta mengkomunikasikan anggaran setiap kegiatan dengan pihak pengelola keuangan sekretariat KPU Tomohon. Selebihnya eksekusi diserahkan kepada tim millennial ini.

Salah satu kelebihan bekerja dengan anak-anak muda adalah kepercayaan diri yang kuat. Setiap program yang akan dilaksanakan, selalu mereka yakini akan berdampak kuat di masyarakat. Ini sebenarnya sangat fundamental, karena terkadang seorang pemimpin masih belum yakin benar dengan setiap program yang disuguhkan ke publik. “Tenang pak. Santai saja. Pasti kuat respon publik.” Inilah kalimat yang rajin dilontarkan tim.

Benar saja. Hampir semua program yang disusun berjalan relatif baik. Bahwa ada kekurangan sini dan sana, hal tersebut layak diberi permakluman, mengingat macam-macam keterbatasan yang muncul saat proses eksekusi program. Yang utama, KPU Tomohon sudah berusaha dan

pernah berselancar di era digital dengan metode sosialisasi yang kreatif dan inovatif. Kalimat inspiratif Michael Jordan lagi-lagi ampuh. “Saya dapat menerima kegagalan. Semua orang pasti pernah gagal dalam hidup mereka. Tapi saya tidak bisa menerima kegagalan karena tidak mencoba.”

Sentralnya Peran Badan Adhoc

Ribuan badan adhoc, mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemugutan Suara (PPS), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tentu saja adalah kekuatan nyata di lapangan. Jika diatur dengan baik lewat pola dan sistem yang terukur, sosialisasi di lapangan akan sangat powerfull.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tomohon merasakan benar manfaat yang lahir dari aktivitas sosialisasi ribuan badan adhoc. Di kelurahan masing-masing, banyak dari mereka yang merupakan tokoh masyarakat. Tentu saja segala sesuatu yang disampaikan, punya dampak yang baik itu KPU secara kelembagaan.

KPU Kota Tomohon merancang setiap PPS dan PPK memberikan laporan periodik mingguan, tentang kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Ini wajib. PPS menyampaikan laporan ke PPK, direkap, kemudian diteruskan ke KPU. Tak harus *hardcopy*. Cukup disampaikan lewat *email* atau aplikasi seperti *WhatsApp*.

Setiap anggota PPK juga harus rajin melakukan *monitoring* langsung. Ini jadi bagian laporan mereka setiap Minggu. Komisioner KPU Tomohon juga juga rutin turun lapangan melakukan *monitoring*. Ini penting agar anggota PPK dan PPS benar-benar serius melakukan sosialisasi tahapan Pilkada 2020.

Selain sosialisasi langsung lewat ibadah-ibadah maupun kegiatan-kegiatan keluarga, memanfaatkan akun sosial media semua anggota PPK dan PPS juga menjadi sebuah kemewahan buat KPU Tomohon. Tidak ribet. Setiap tahapan, ajakan dan atau informasi penting tentang Pilkada 2020 cukup dibuat dalam bentuk *flyer*, kemudian di-*share* atau *repost* di akun *Facebook* dan *Instagram* semua badan adhoc.

Tapi tentu ada cara untuk mengontrol. Itulah kenapa setiap *posting-an* anggota badan adhoc, selalu ditautkan dengan akun resmi KPU Tomohon. Dengan begitu, bisa kelihatan siapa-siapa saja yang aktif mengeksekusi informasi Pilkada 2020 di dunia maya. Jika kekuatan individu-individu dalam sebuah lembaga dimaksimalkan, hasilnya selalu dahsyat. (*)



Catatan Kecil Jalan Panjang Menuju DPT

Albertien Pijoh

(Anggota KPU Kota Tomohon)

LINDUNGI hak pilihmu. Kalimat ini yang menjadi motivasi utama kami yang di divisi data KPU Kota Tomohon untuk bekerja penuh waktu dan tenaga, demi memenuhi hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat untuk memilih. Divisi data adalah tempat daftar pemilih ‘dilahirkan’. Dan untuk sampai pada tahapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), jalan yang dilalui sangat panjang dan berliku.

Sebagaimana diketahui daftar pemilih merupakan salah satu komponen yang sangat penting dan strategis bagi terselenggaranya pemilu dan Pilkada. Oleh karena itu penyusunan daftar pemilih harus dilakukan dengan cermat dan sungguh-sungguh, supaya data pemilih yang dihasilkan berkualitas. Penyusunannya kita lakukan tanpa melupakan prinsip-prinsip penyusunan daftar pemilih yang akurat, komprehensif, mutakhir, inklusif, transparan, responsif, dan partisipatif, sungguhpun di Pilkada kali ini kita bekerja dalam masa Pandemi Covid-19.

Memang kerja-kerja penyelenggara di pilkada kali ini sangat spesial, karena dalam bukan hanya berpegang dan patuh pada regulasi dan kode etik tetapi juga harus melaksanakan dengan ketat akan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Ya, Pilkada *new normal* adalah pilkada yang tidak sekedar tentang pelaksanaan hak pilih dan dipilih, tetapi juga hak keselamatan dan kemanusiaan yang dikedepankan.

Masa pandemi menimbulkan tantangan spesifik untuk pemutakhiran data pemilih. Berbagai isu harus patahkan

seperti apatisisme masyarakat terhadap data pemilih, yaitu dalam hal validitas dan kualitas data pemilih. Juga soal kekuatiran bahwa pencoklitan menjadi penyebab penyebab potensi penyebaran Covid-19. Semua itu bisa ditepis dengan disiplin tingkat tinggi melaksanakan protokol kesehatan serta memastikan semua penyelenggara sehat dan aman.

Jajaran KPU layak berbangga karena terbukti bersedia menjadi agen kemanusiaan dan keselamatan dengan gerakan memakai masker dan memberi contoh yang baik tentang protokol kesehatan. Dalam menyusun daftar pemilih divisi data harus melalui 16 tahapan pemutakhiran data pemilih sejak 15 Juni 2020 sampai 6 Desember 2020 (pengumuman DPT oleh PPS).

Pemutakhiran data pemilih sendiri adalah tahapan terpanjang. Divisi data bekerja paling awal tahapan, namun selesai paling akhir dari seluruh jadwal tahapan yang ada. Tidak heran divisi data ‘dibaptis’ dengan julukan Divisi Alfa Omega. Bahkan lebih ekstrim lagi pernah tercetuskan dalam celutukan senda gurau dari Komandan Data RI Viryan Aziz, bahwa divisi data adalah **divisi air mata**. Suatu gurauan tapi

justru kami bangga dengan sebutan itu. ‘Memang hanya orang yang kuat imannya dan orang sabar yang ada di divisi data’. Demikian juga gurauan balik kami di grup *Whatsapp* para komandan data kabupaten kota se-Indonesia.

DPS - DPSHP - DPT

Mendata pemilih harus difaktualkan dengan modal bukti dasar yaitu dokumen kependudukan KTP ataupun KK. Ini yang dijalankan oleh 220 PPDP di Kota Tomohon. Kegiatan *door to door* ini dijalankan dengan prokes ketat, dimana semua wajib memakai Alat Pelindung Diri (masker, *faceshield* dan sarung tangan) serta membawa *hand sanitizer*. Semua PPDP juga melewati proses *rapid test*. Semua aman dan kondisi imun diri terjaga baik dengan adanya asupan vitamin.

Suka duka diceritakan teman teman PPDP dalam mencoklit di masa pandemi. Misalnya saat mengunjungi rumah calon pemilih yang anggota keluarganya sedang isolasi mandiri, diperlukan strtaegi tersendiri dalam mendata. Sebelum PPDP turun *door to door* mereka terlebih dahulu

dibekali dengan bimbingan teknis Coklit agar ada kesepahaman dalam bekerja. Tidak banyak masalah dalam pelaksanaan Coklit. Tetapi satu dua kendala yang ada cukup memusingkan juga.

Contohnya masih ada penduduk yang tidak mempunyai dokumen kependudukan, atau dokumen ada tapi tidak sinkron misalnya antara KTP dan KK atau antara KTP dan akte kelahiran. Dan juga masih ada penduduk yang tinggal di luar kota bahkan luar negeri tetapi dengan KTP yang masih berlaku di Tomohon.

Dalam berbagai kesempatan, kami sering mengusulkan ke pemerintah, agar alangkah baiknya dalam kurun waktu tertentu saat menjelang tahapan pemilu atau Pilkada, sudah dibereskan kevalidan dan kekinian dokumen penduduk dari masyarakat. Sehingga saat PPDP melakukan pendataan, tidak ada masalah lagi yang berhubungan dengan dokumen kependudukan. Apabila hal ini dilakukan, bahkan penduduk yang sudah meninggal akan didapatkan kevalidannya karena keluarga dapat menunjukkan akte kematian. Jadi tak perlu PPDP sampai harus mendatangi

pusara dari orang yang sudah meninggal demi keakuratan data pemilih dan meyakinkan pihak *stakeholder*, bahkan rekan penyelenggara kami yaitu Bawaslu.

Dokumen yang lengkap akan memudahkan PPDP melakukan Coklit sehingga mereka murni menjalankan tugas mereka mendata pemilih. Tidak disibukkan lagi mengurus kependudukan yang harusnya merupakan ranah pemerintah, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Di Pilkada, KPU sampai menyelenggarakan Gerakan Dukung Rekam KTP Serentak. Ini terpaksa dilakukan untuk mengoptimalkan data kependudukan di lapangan. Padahal sejujurnya ini ranah Disdukcapil.

Syukurlah gerakan ini sangat efektif di Tomohon, karena dalam sehari dapat menjaring seratusan penduduk mengurus dokumen kependudukan. Suatu hal yang sangat positif karena dalam kondisi normal dan rutin, hanya 40-an penduduk yang datang ke kantor Disdukcapil per hari untuk mengurus dokumennya (Keterangan dari Kabid Kependudukan Disdukcapil Tomohon).

Fakta di atas menjelaskan, jika data kependudukan sudah dimutakhirkan terlebih dahulu oleh pemerintah, masalah-masalah berulang yang ditemui dalam setiap pemilu dan Pilkada akan terminimalkan. Contohnya masalah penduduk meninggal, pindah domisili, penduduk tanpa dokumen kependudukan, perbedaan usia karena beda tanggal lahir di KTP dan akta kelahiran, status sipil dan Polri TNI dan lain sebagainya.

Rasanya ego sektoral pun akan terkikis bila kerja terintegrasi dapat dilaksanakan terutama di saat pelaksanaan sinkronisasi data. Tak berlebihan kalau kami yang ada di divisi data menyimpulkan, sulit kalau pemerintah terus menerus pasif hanya menunggu masyarakat yang harus datang ke kantor Disdukcapil untuk urusi kelengkapan dokumen kependudukannya sendiri. Saatnya pemerintah aktif memutakhirkan kependudukannya walau hanya insidental, yaitu sebelum tahapan pemilihan. Jika tidak, sejumlah warga baru mau mengurus dokumen secara aktif kalau ada urusan seperti pensiun, bansos, kredit bank, dan hal lainnya.

Menjelang berakhirnya masa Coklit PPDP, KPU Kota Tomohon secara internal melakukan pemutakhiran data. Secara *road show* tim divisi data mendatangi instansi-instansi untuk mengecek mereka yang tidak sempat tercoklit di rumah-rumah oleh PPDP. Kegiatan ini cukup efektif karena memang didapati masih ada yang belum tercoklit dengan beragam alasan. Data yang diperoleh ini langsung disampaikan ke PPS, diteruskan ke PPDP untuk di-coklit.

Hasil Coklit PPDP direkapitulasi secara berjenjang mulai dari PPS sampai di tingkat kota. Agendanya dibuat dalam suatu rapat pleno terbuka. Dalam pleno ini dihadiri pihak terkait data pemilih. Sayangnya, catatan kami dalam setiap rekapitulasi daftar pemilih, perhatian dari partai politik terbilang minim. Padahal peran parpol dan tim sukses pasangan calon sangat dibutuhkan, demi validnya data pemilih di lapangan.

Dalam setiap rapat pleno terbuka KPU Tomohon sangat terbuka dan responsif terhadap masukan, koreksi ataupun tanggapan yang diberikan oleh peserta. Tentu saja tanggapan dan masukan yang diberikan harus dilengkapi

dengan data lengkap dan otentik. Ini sangat substansi karena semboyan Divisi Data adalah: “Kami hanya percaya Tuhan. Di luar itu harus dilengkapi data (baru kami percaya)”. Semboyan yang ada unsur humornya, tetapi ini kami seriusi betul dalam pelaksanaannya. Detail itu asyik, kata Komandan Data KPU-RI Viryan Azizi. Dan benar. Detail itu adalah data yang lengkap.

Demikian juga dalam pelaksanaan uji publik sebelum tahapan perbaikan data di tingkat PPS. Semua jajaran menerima dengan terbuka untuk setiap masukan dan koreksi. Namun sayangnya masyarakat juga masih kurang memanfaatkan *feed back* yang diberikan. Masyarakat dan peserta pemilihan relatif ‘rewel’ nanti pada hari pemilihan saja.

Serba Serbi

Bekerja selama masa pandemi membuat pimpinan KPU Tomohon dan jajarannya harus memrioritaskan tugas negara dan menjaga kesehatan pribadi serta keluarga. Di tengah himbuan pemerintah agar masyarakat jauhi

kerumunan dan jaga imun serta di rumah saja, tim data justru kerja tak kenal waktu. Benarlah salah satu moto divisi data. ‘Pantang pulang sebelum data pemilih sinkron.’ Dan memang demikian. Kami terjun berada langsung di antara orang banyak saat Bimtek-bimtek dan keluar rumah naik turun rumah saat cokolit.

Tetapi semuanya dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Jaga jarak, batasi kapasitas berkerumun, memaki APD dan membawa *hand sinitizer*. Ya, ini sejalan dengan moto: “KPU melayani, Anda di rumah kami yang bekerja.” Di sisi lain KPU Tomohon harus melindungi keluarga dari penularan Covid-19 tapi tidak terhitung banyaknya hari-hari dimana kami pulang larut malam atau bahkan dini hari. Bahkan setiba di rumah, ada protapnya. Harus mandi dulu baru bertemu anggota keluarga di rumah. Namun kadang dalam kondisi kelelahan atau pulang larut malam, tak sanggup untuk mandi. Bukan hanya sekali dua kali tim data tidur di mobil di garasi atau tidur di kursi transit di rumah yang letak kursinya di dapur karena badan rasanya tidak steril untuk berkumpul dengan keluarga.

Keluarga di rumah saja, tetapi kami selalu di luar rumah bertaruh nyawa menjalankan tugas negara di masa pandemi.

Perasaan *greget* juga ada saat website lindungi hak pilihmu ‘ngadat’. Padahal KU Tomohon sangat gencar sosialisasi kepada masyarakat untuk cek mandiri apakah mereka sudah terdaftar atau belum via *website* tersebut. Tapi inovasi baru yang ada di Pilkada kali ini sangat besar manfaatnya. Itu terkait stiker coklit yang sudah dilengkapi dengan *QR code* serta *hotline number* bebas pulsa.

Tergabung dalam *Whatsapp* Group (WAG) Candain, yaitu media koordinasi divisi data se-provinsi menjadi kesan tersendiri. Di bawah Komandan Data Provinsi Lanny Ointu, semua wajib mengunjungi 10 menit WAG minimal 10 menit sekali. Supaya tidak ketinggalan berita dan instruksi. Lebih dari 10 menit tidak buka WA, akan nada *reminder*. Maka adalah hal yang biasa bagi kami bila HP bukan hanya dalam genggam tangan, tapi harus di bawah bantal saat tidur. Siap *di-cal* 1x24 jam.

Demikian catatan kecil saya tentang perjalanan menuju 73.633 jiwa DPT di Kota Tomohon. Kami bangga

dengan hasil kinerja kami KPU Tomohon menempati ranking 1 nasional kategori tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota, tetapi semua itu ada kontribusi dari proses perjuangan panjang pemutakhiran data pemilih. DPT tidak hanya berbicara hasil, tetapi juga bagaimana proses mendapatkannya seperti yang sudah diceritakan di atas. Tetapi *award* yang sejati adalah bila kita sendiri menghargai pekerjaan kita. (*)

RAWAT PARTISIPASI, DI SAAT PANDEMI



PILIH PEMIMPIN: Suasana pemungutan suara di salah satu TPS di Kota Tomohon

Setiap *episode* pemilihan umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) biasanya ditandai dengan dinamika umum dan khusus. Dua dinamika ini sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pesta demokrasi. Syukur puji Tuhan kalau pengaruhnya bagus. Tapi kalau buruk, dampaknya bisa

berbahaya untuk tatanan demokrasi. Tugas KPU adalah menjaga ritme antusiasme masyarakat tetap pada level yang menjanjikan. Yang bagus ditingkatkan. Yang buruk diminimalisir efeknya. Pun ketika Pandemi Covid-19 membuat segala sesuatu menjadi lebih rumit.

Sikap apatis dan pragmatis adalah dinamika umum yang lazim lahir setiap hajatan pesta demokrasi. Dari sudut pandang penyelenggara, sikap apatis dan pragmatis muncul karena faktor internal dan eksternal. Adanya ketidakpercayaan terhadap integritas dan netralitas penyelenggara menjadi faktor internal. Sementara faktor eksternal disebabkan oleh karena kekesalan masyarakat terhadap kinerja pemimpin yang mereka pilih, yang dianggap tidak sesuai ekspektasi yang diharapkan.

Dinamika khusus sendiri muncul secara parsial. Sangat tergantung situasi dan kondisi yang muncul saat Pemilu dilaksanakan. Pada pemilihan serentak (Pilkada) 2020, Pandemi Covid-19 menjadi pemicu utamanya. Ekosistem kepemiluan kali ini mengalami perubahan wujud yang signifikan. Penyelenggara, peserta dan pemilih dipaksa

untuk mengubah pola pikir dan pola tindak, menyesuaikan dengan situasi yang sama sekali tak diperkirakan sebelumnya.

Tetap menggelar Pilkada 2020 di tengah kecemasan tinggi terhadap penyebaran Pandemi Covid-19, KPU Tomohon tidak hanya dituntut bekerja keras, tapi yang paling esensial adalah bekerja cerdas. Penyelenggara tentu saja harus *men-delivery* informasi ke masyarakat dengan pendekatan yang lebih taktis. Tidak ‘hantam kromo’ begitu saja.

Asas manfaat jadi opsi terbesar yang harus diambil. Percuma habis-habisan mencetak dan menyebar flyer, poster dan menghujani jalan-jalan protokol dengan banner dan baliho, jika pesan yang ingin disampaikan tidak sampai di masyarakat. Berlalu begitu saja. Sebaliknya, meski metode sosialisasi dari sosial media dan berbagai platform digital tidak menggejala di dunia nyata, tapi di era disruptif sekarang pola ini justru lebih powerful dampaknya. Sederhananya, transformasi sosialisasi dengan pendekatan digital sudah harus diberi porsi besar. Meski begitu, sosialisasi

konvensional jangan serta merta dihilangkan. Pada segmen pemilih tertentu, pola lama benefitnya masih memuaskan. Tinggal pintar-pintar mengatur.

Tradisi Demokrasi Tou Mu'ung

Kota Tomohon adalah daerah pemekaran dari Kabupaten Minahasa. Masyarakatnya tersebar di lima kecamatan dan 44 kelurahan. Saat Pemilu 2019 lalu, daerah pemilihan (Dapil) hanya ada tiga. Tidak banyak, karena ketika itu jumlah penduduk tidak lebih dari 100 ribu jiwa.

Bahkan sebelum dimekarkan, Tomohon sudah menjadi salah satu daerah paling sibuk di Sulawesi Utara. Pertama, yang paling konkrit, Tomohon adalah daerah transit. Warga Manado yang ingin pulang kampung di Kabupaten Minahasa, Minahasa Tenggara atau Bolmong Timur, sebagian besar memilih melintasi Tomohon. Begitu sebaliknya.

Kemudian yang kedua, Tomohon jadi daerah tujuan untuk sekolah dan berobat. Masyarakat di kabupaten/kota

sekitar Tomohon, tidak sedikit yang memilih Tomohon sebagai tempat untuk sekolah dan kuliah. Sejumlah sekolah strata SMP, SMA/SMK dan universitas swasta seperti UKIT, Unsrit, ITM dan kampus Pasca Sarjana Unima di Kaaten adalah primadona untuk menuntut ilmu.

Demikian juga dengan fasilitas kesehatan. RS Bethesda dan RS Gunung Maria adalah rumah sakit ikonik, yang jadi rujukan sebagian besar warga Minahasa Raya untuk berobat. Selain men-trigger penghasilan warga Tomohon karena mendongkrak penghasilan usaha kecil menengah di sekitaran, sekolah perawat dua rumah sakit tersebut menyedot ratusan siswa/siswi setiap tahun.

Seiring dengan *booming*-nya industry pariwisata, Tomohon makin kebanjiran orang dari luar. Dikenal memiliki alam yang eksotis dan mempesona, plus cuaca yang sejuk, spot-spot wisata baru yang banyak bermunculan selalu dijejali wisatawan domestik maupun mancanegara.

Gambaran potret Tomohon di atas tentu saja memberi warna baru bagi Tomohon, khususnya dalam dinamika berdemokrasi. KPU Tomohon sebagai penyelenggara Pemilu

dan Pilkada tentu saja harus menangkap dinamika tersebut dengan cermat, karena akan menghadirkan sejumlah tantangan spesifik di lapangan.

Kehadiran ribuan warga luar Tomohon, yang mana cukup banyak yang merasa nyaman dan memilih mengurus KTP Tomohon, otomatis berkonsekuensi pada tahapan data pemilih. Mengajak mereka untuk aktif berpartisipasi dalam tahapan pemutakhiran data pemilih tentu saja jadi tantangan tersendiri. Mendorong mereka untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah tantangan lainnya.

Mengintegrasikan keinginan mereka tinggal di Tomohon dengan keinginan berpartisipasi di tahapan-tahapan Pilkada tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Butuh *treatment* yang spesifik, agar supaya mereka tahu, tertarik dan kemudian sadar bahwa budaya berpartisipasi di hajatan-hajatan kepemiluan sudah merupakan pola pikir yang lazim di Tomohon.

Masyarakat Kota Tomohon sendiri memang sudah terbiasa dengan sistem demokrasi partisipatif seperti sekarang. Dahulu ketika masih menjadi bagian integral

Kabupaten Minahasa, saat kelurahan-kelurahan masing berstatus desa, pemimpin yang diistilahkan hukum tua dipilih secara langsung oleh masyarakat.

Pada beberapa jilid Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebelumnya, tingkat partisipasi pemilih terbilang menjanjikan. Di Pilkada 2015 lalu contohnya, Tomohon secara mengejutkan menjadi daerah dengan tingkat partisipasi pemilih perempuan tertinggi se-Indonesia. Hampir 90 persen. Secara kumulatif juga lumayan membanggakan. Tomohon masuk 10 besar tingkat partisipasi tertinggi se-Indonesia. Capaian waktu itu sekira 87,5 persen.

Capaian yang lebih menggetarkan hadir di Pilkada 2020. Tomohon dinobatkan sebagai daerah dengan tingkat partisipasi tertinggi se-Indonesia untuk kategori kota. Raihannya tidak main-main. 91,3 persen. Banyak yang masih tidak percaya. Di tengah prediksi bakal terjun bebasnya niat pemilih untuk ke TPS karena cemas dengan Covid-19, kehadiran masyarakat di bilik-bilik suara justru jauh melebihi

ekspektasi banyak pihak. Tidak terkecuali kami sebagai penyelenggara.

Memang perlu ada riset atau penelitian lebih holistik terkait tipologi pemilih di Tomohon. Khususnya tentang spesifikasi konkrit, mengenai berapa persen pemilih yang rasional dan sebanyak apa yang memilih karena faktor pragmatisme. Berapa banyak yang memilih karena suka dan terpengaruh dengan metode sosialisasi KPU Tomohon, kemudian berapa persen pemilih yang secara ideologis memang datang ke TPS karena melihat Pemilu dan Pilkada sebagai ladang kedaulatan rakyat. Jadi memang perlu kajian dan penelitian secara akademis.

Meski jejak rekam partisipasi masyarakat Tou Mu'ung terbilang oke, KPU Tomohon tidak mengendurkan ritme. Merawat level partisipasi tentu harus konsisten dalam memproduksi ide dan melahirkan inovasi sosialisasi. Yang lebih penting lagi, mengeksekusi ide dan inovasi tersebut secara berkelanjutan di lapangan.

Setiap tahapan tentu butuh sentuhan berbeda. Begitu juga setiap segmen terapinya pasti tak sama. Kepekaan dan

feel harus benar-benar cocok, agar kerja keras tidak merembes begitu saja tanpa *feedback* yang sepadan. Itulah kenapa *team work* sangat dibutuhkan dalam membuat dan mengesekusi program.

Contohnya saya. Meski sangat akrab dengan dunia *iven organizer* sebelum dipercayakan menjadi anggota KPU Tomohon, yang mana hal itu identik dengan kreativitas, saya tak sungkan memilih jadi pendengar setia saat merancang sederet program sosialisasi untuk anak muda. Saya percayakan sepenuhnya pembuatan *content* kepada tim Parmas KPU Tomohon yang berisikan anak-anak muda kreatif dan *fighter*.

Tidak ada gunanya bersikap layaknya komisioner serba tahu, sementara selera anak muda tak seirama lagi dengan umur, cara pandang dan *lifestyle* laki-laki yang tinggal beberapa tahun lagi berusia setengah abad seperti saya. Bukannya mengais simpati, ide jadul bisa saja membuat pemilih malah jadi antipati. Jangan sampai mengorbankan tujuan hanya karena mempertahankan keangkuhan struktural.

Itu untuk pemilih milenial. Untuk yang ada di kategori dewasa juga dilakukan beberapa pendekatan spesifik. Supaya mereka bisa aktif berpartisipasi di setiap tahapan Pilkada. Fakta bahwa tingkat partisipasi perempuan sempat mencatatkan rekor fantastis pada Pilkada 2015 lalu, membuat KPU Tomohon tidak terbuai dengan nostalgia indah itu.

Sebaliknya, disiapkan sejumlah metode agar supaya gairah electoral kaum perempuan tetap tinggi. Salah satunya dengan melakukan pendekatan perasaan. *Touch with heart*. KPU Tomohon menjalin koordinasi dan komunikasi intens dengan banyak tokoh-tokoh agama perempuan. Lebih tepatnya para pendeta, apakah itu ketua atau pendeta pelayanan di ratusan gereja yang ada di Tomohon.

Dalam pertemuan secara *virtual* maupun secara langsung dengan para tokoh agama perempuan, KPU Tomohon menanamkan impresi yang positif terkait strategisnya kehadiran pemilih perempuan di TPS, dalam konteks demokrasi partisipatif yang konstruktif dan progresif.

Peran mereka (tokoh agama) sangat dibutuhkan negara untuk melecut partisipasi perempuan dalam semua tahapan Pilkada.

Selain pendeta-pendeta, KPU Tomohon juga menggandeng sejumlah perempuan yang memegang simpul organisasi gereja GMIM dan Katolik. Harapan utamanya, dalam setiap ibadah dan pertemuan yang sifatnya *virtual* maupun konvensional, ada sentuhan-sentuhan informasi terkait tahapan yang sementara berlangsung.

Sementara untuk masyarakat umum, melibatkan tokoh masyarakat, aparat pemerintahan di level yang paling bersentuhan dengan masyarakat serta pengurus partai politik dan tim sukses calon tingkat kelurahan menjadi sangat bernilai tinggi.

KPU Tomohon merasakan benar dampak yang lahir dari pendekatan dengan tokoh-tokoh kunci ini. Dalam setiap pertemuan entah itu secara daring maupun luring, kami mendapatkan banyak sekali informasi untuk setiap tahapan Pilkada. Begitu sebaliknya, secara terbuka mereka menyebut komunikasi dan koordinasi yang dibangun, membuat mereka mendapatkan banyak sekali informasi yang benar dan

perspektif lebih luas. “Minimal kami bisa menyampaikan bahwa ini informasi yang benar dan meluruskan informasi yang salah kepada masyarakat.” Kira-kira begitu dimensi respon mereka dalam setiap pertemuan.

Redam Hoax Pemicu Apatisme

Memang benar. Di era informasi yang sedemikian cepat, banyak informasi-informasi tidak benar berseliweran di masyarakat. *Hoax-hoax* yang diproduksi dan disebarokan oleh oknum-oknum tidak bertanggung-jawab, berandil besar meredupkan animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan Pilkada.

Dampak buruk digitalisasi ini tentu saja tidak bisa diimbangi sendiri oleh KPU Tomohon. Sumber daya manusia penyelenggara sangat terbatas. Tidak semua isu-isu seputar Pilkada yang beredar bisa cepat dinetralisir. Oleh karena itu, tidak ada pilihan selain memperlebar informasi yang valid dengan menggandeng berbagai tokoh kunci seperti tokoh-tokoh agama dan masyarakat, pemerintah, media dan pengurus parpol di tingkat kelurahan.

Tidak hanya karena bersentuhan langsung dengan masyarakat, pernyataan dan sikap para pihak di atas akan sangat membantu memberikan pencerahan di lapangan. Benih apatisisme warga karena termakan *hoax*, harus secepatnya dibersihkan lewat kehadiran para *stakeholder* yang dipercaya dan ditokohkan di setiap kelurahan.

Banyak sekali *hoax* yang beberapa di antaranya melemahkan animo masyarakat untuk berpartisipasi di setiap tahapan Pilkada. Di tahapan data pemilih misalnya. Sempat muncul *hoax* yang menuduh KPU Kota akan melonggarkan praktik mobilisasi massa dari luar Tomohon untuk datang memilih di sejumlah TPS di Tomohon. Kejam sekali *hoax* ini. Selain itu, masih juga diorbitkan isu klasik yang menyebut jajaran KPU sengaja tidak mendata sejumlah pemilih yang tidak sepaham dengan pasangan calon tertentu.

Saat tahapan rekrutmen tenaga adhoc, mulai dari seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), isu-isu miring tak henti bermunculan.

Rata-rata menyebut KPU Tomohon tidak netral dan sengaja menyingkirkan calon-calon tertentu karena unsur subjektivitas. Lebih tepatnya karena tudingan pertimbangan politis. Sosial media menjadi *platform* empuk untuk menyudutkan KPU pada posisi yang buruk. Seperti biasa, karena *hoax* ini diviralkan berulang-ulang dan ditangkap mentah-mentah oleh sejumlah warga, sikap apatisme terhadap setiap tahapan menggejala secara natural.

Ada juga dua *hoax* yang muncul menjelang hari H pemilihan. Yang pertama munculnya fitnah yang sangat brutal, bahwa KPU Tomohon sengaja mencetak surat suara lebih dari yang dibutuhkan, dan akan memanfaatkannya untuk kepentingan kelompok tertentu. Ada-ada saja. Komisioner dan jajaran KPU Tomohon memang sempat meradang saat mendengar informasi sesat ini. Terlalu berlebihan soalnya. Tapi sebagai pelayan publik, respon yang diberikan tentu saja harus elegan dan sesuai kaidah-kaidah organisasi lembaga.

Yang kedua tentang *hoax* klasik bahwa KPU dan jajarannya sampai di KPPS akan melakukan manipulasi

perolehan suara. Untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Sejumlah *content hoax* yang diviralkan bahkan sudah sangat kasar, karena langsung menyerang aspek personal beberapa komisioner KPU Tomohon.

Kecewa dan marah tentu saja jadi reaksi manusiawi. Tapi mengisolasi pikiran dalam bingkai sempit itu bukanlah pilihan yang tepat. Perlu ada Langkah taktis yang konkrit dan progresif, agar *hoax-hoax* tersebut tidak lebih parah dampaknya. Masyarakat butuh mendapatkan informasi yang kredibel, agar mereka tidak pasif apalagi apatis, untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan Pilkada.

Tidak hanya *content* informasi yang kredibel. KPU Tomohon butuh topangan pihak-pihak lain, yang sudah barang tentu harus kredibel pula. KPU dan jajaran saja tidak punya daya jangkau luas dan kuat, apalagi jika objek yang akan disasar sudah lebih dulu antipati. Satu-satu jalan adalah melibat sejumlah tokoh kunci di level *grass root*, agar tujuan utama tercapai.

Meski di tengah Pandemi Covid-19, KPU Tomohon memutuskan untuk turun berbagi informasi ke semua

kelurahan. Semua. Tanpa terkecuali. Dilematis memang mengingat zona merah pandemi di sebagian besar area di Tomohon. Tapi situasi di lapangan memang mengharuskan penyelenggara Pilkada untuk bertatap muka dengan tokoh-tokoh kunci di lapangan. Tentu saja pada prosesnya, agenda ini dilakukan dengan penerapan protokol pencegahan Covid-19 dengan ketat.

Saking seriusnya, KPU Tomohon membuat dua sesi di setiap kelurahan. Sesi pertama kami undang tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan parpol dan tim kampanye/sukses. Dijelaskan yang sebenar-benarnya. Sejelas-jelasnya. Tidak ditambah kurang. Suasana komunikasi juga tidak monolog. Ruang dialog dibuka. Malah sesekali ada debat. Tapi konstruktif. Tidak apa-apa. Yang penting semua clear. Tuntas. Semua puas.

Beberapa tak sungkan menyampaikan terima kasih, karena sudah mendapatkan pencerahan atas situasi tak sehat di lapangan. Dan sebagian besar dari mereka, di setiap sesi tatap muka, akhirnya berkomitmen menyampaikan

informasi yang benar. Meluruskan *hoax* yang viral tak karuan. Inilah tujuan kami menggenjot agenda ini.

Sesi kedua melibatkan sejumlah kepala lingkungan/meweteng. Pengalaman di Pemilu Legislatif 2019, intensitas sosialisasi ke aparat pemerintahan di level yang paling dekat dengan masyarakat ini terbukti mujarab. Oleh karena itu, koordinasi dan komunikasi dengan para kepala lingkungan dan meweteng di Pilkada 2020, sangat-sangat strategis nilainya. Selain bisa membantu KPU Tomohon memotong mata rantai informasi yang tidak kredibel, mereka juga aktif merangsang masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap tahapan Pilkada.

Di Tomohon, kepala lingkungan dan meweteng adalah orang yang punya daya cengkeram yang kuat di lapangan. Tidak hanya karena mereka selalu terlibat secara langsung di kegiatan suka dan duka, juga karena segala pengurusan administrasi kependudukan dimulai dari tangan mereka. Jika bisa “dikendalikan” dengan baik, *multiplier* efek yang lahir dari usaha kepala lingkungan/meweteng akan sangat dahsyat. Tidak diragukan lagi.

Malah, saking strategisnya, peran dan kursi kepala lingkungan/meweteng selalu *sexy* dijadikan content kampanye parpol dan pasangan calon. Saat tahapan kampanye Pilkada 2020, isu terkait ini digoreng sedemikian gurihnya oleh hampir semua tim sukses pasangan calon.

Habis-habisan di darat, gempuran lewat udara juga dilakukan secara masif. KPU Tomohon melakukan kerjasama dengan sekira 15 media online dan dua radio di Tomohon. Setiap ada berita *hoax* yang muncul, kami melakukan klarifikasi serta menyodorkan data dan fakta yang sesuai aturan. Tidak sekadar narasi tanpa data empirik, layaknya yang dipraktekkan *buzzer-buzzer* lokal.

Semua platform digerakkan KPU Tomohon. Kalau tidak, masyarakat berpotensi jadi pasif dan bahkan apatis dengan setiap tahapan dan kerja-kerja penyelenggara. Mungkin saja tidak semua warga yang sudah duluan terhipnotis dengan berita tak benar bisa dijangkau dengan platform informasi yang kredibel. Tapi minimal yang terjangkau bisa tercerahkan, bisa menjadi tenaga “*marketing*” bayangan KPU Tomohon dalam membantu mengingatkan

keluarga atau tetangga mereka terkait fakta yang sesungguhnya.

Selain menggandeng teman-teman media dan memaksimalkan akun sosial media internal, KPU Tomohon juga menggandeng sejumlah *influencer* dan *blogger* lokal. Dengan jumlah *follower* yang mencapai ribuan, *content* yang mereka *share* dikemas dengan menarik agar bisa meredam *hoax* dan memompa partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan Pilkada. Dengan cara apapun, *hoax* memang harus dilawan.

Menjaga Ritme di Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih

Dalam hal apapun, menjaga ritme supaya tetap konsisten adalah perkara yang tidak mudah. Begitu juga dengan merawat masyarakat khususnya pemilih agar secara sustainable memelototi tahapan demi tahapan Pilkada 2020 lalu.

Dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat, tahapan pemutakhiran data pemilih menjadi salah satu

tantangan berat buat KPU Kota Tomohon. Jujur saja, di tahapan ini masyarakat sangat pasif. Bahkan ketika disentuh dengan beragam metode sosialisasi, entah itu secara digital maupun konvensional, kepekaan masyarakat terhadap krusialnya data pemilih terbilang rendah. Padahal, elemen ini menjadi fondasi utama dalam tahapan-tahapan selanjutnya.

Di Pilkada 2020, KPU sampai melahirkan sejumlah sub tahapan yang baru, demi menjaga keluhuran nilai-nilai transparansi, akuntabilitas dan realitas data pemilih. Kalau di Pemilu-pemilu sebelumnya sub tahapan uji publik lebih pada respon masyarakat atas data pemilih yang ditempel di tempat-tempat umum, kali ini penetrasinya lebih menohok.

Sejumlah tokoh masyarakat, semua pimpinan parpol dan tim sukses pasangan calon (Paslon) sampai Panwas di tingkat kelurahan di Kota Tomohon, diundang khusus dalam sebuah kegiatan untuk membedah satu per satu data pemilih yang sementara dimutakhirkan.

Buka-bukaan. Super transparan. Setiap masukan atau protes, langsung ditindak-lanjuti. Kalau memang ada pemilih yang terbukti harus dicoret di daftar, pasti dicoret. Sementara

kalau ada calon pemilih belum masuk daftar, PPS (Panitia Pemungutan Suara) pasti mem-*follow up* dengan melakukan kroscek langsung di lapangan. Tidak ada yang ditutup-tutupi, karena memilih adalah hak konstitusional warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Kalau ada pihak yang paling kami harapkan memberi andil besar merangsang niat masyarakat untuk memelototi tahapan pemutakhiran data pemilih, itu adalah Parpol dan Paslon. Kenapa? Karena dua pihak inilah yang paling berkepentingan dengan data pemilih. Makin banyak pendukung mereka yang tidak masuk daftar pemilih, normalnya makin besar kerugian yang bisa mereka alami. Itu contoh.

Tapi jujur saja, atensi Parpol dan Paslon rendah. Padahal harapan kami tak sulit dilakukan. Maksudnya begini. Baik Parpol maupun Paslon, semuanya punya kepengurusan atau tim sampai di kelurahan. Malah untuk Paslon di Pilkada, tim sampai di level lingkungan. Agar supaya tidak ada pendukung mereka yang tidak terdata (atau sebaliknya ada

pemilih yang semestinya tidak layak lagi masuk data pemilih tapi terdaftar), tim harus memaksimalkan jejaring mereka dalam melakukan identifikasi di lapangan. Tapi entah kenapa ini kurang dimaksimalkan.

Layaknya Parpol dan Paslon, peran pemerintah di level kelurahan juga sangat strategis. Jika mencermati tahapan demi tahapan di Pilkada 2020, upaya para camat dan lurah sebenarnya sudah cukup maksimal. Sesuai laporan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), para pemimpin di kecamatan dan kelurahan itu aktif membakar partisipasi warganya dalam memonitor proses pemutakhiran data pemilihan. Tapi respon masyarakat memang tidak menyentuh titik tertinggi, meski juga tidak bisa dikatakan rendah.

Meski tak bisa jadi alasan, tetap saja Pandemi Covid-19 jadi salah satu biang kerok kenapa tidak semua warga aktif berpartisipasi dalam tahapan pemutakhiran data pemilih. Untuk menyiasati ini, KPU Tomohon kemudian menghujani warga dengan ragam informasi mengenai data pemilih yang sifatnya digital.

Semua *platform* kami penetrasikan dengan sangat maksimal. Baik yang ada di internal maupun eksternal KPU. Memviralkan aplikasi lindungi hak pilih maupun *hotline* bebas pulsa di sosmed KPU begitu gencar dilakukan, sementara media massa dan elektronik juga tak kalah kecanggihnya membantu KPU dalam mempublikasikan dua hal di atas.

Program *viral* ini sendiri tak bisa dianggap enteng. Contoh sederhana, dalam banyak kesempatan saat tatap muka dengan berbagai pihak, tidak sedikit yang mengaku sudah mengecek langsung nama mereka apakah masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau belum. Meski perlu diteliti lebih lanjut agar mendapatkan data yang sah, tapi partisipasi masyarakat lewat platform digital begitu terasa.

Eksplorasi Tahapan Pencalonan

Tidak diragukan lagi, salah satu faktor kunci untuk memancing respon masyarakat agar tetap memonitor jalannya Pilkada, yaitu keberadaan pasangan calon.

Kontestan adalah pemain utama dalam gelanggang pesta demokrasi. Makin menjual pesona Paslon, makin menjanjikan level kehadiran masyarakat di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Tidak bisa dipungkiri, salah satu ornamen yang berkontribusi paling signifikan kenapa kemudian partisipasi masyarakat di Tomohon di Pilkada 9 Desember 2020 terbilang bagus, itu karena kehadiran tiga pasangan calon, Gabriela J Eman-Virgie Baker (Nomor urut 1), Caroll Senduk-Wenny Lumentut (Nomoro Urut 2) dan Robert Pelealu-Fransiskus Soekirno (Nomor urut 3).

Meski mentas di tengah Pandemi Covid-19, entah kenapa atmosfir di tahapan pencalonan begitu tinggi. Hanya saja, mengenai profil dan apa yang dilakukan setiap pasangan calon di lapangan, tidak akan ditulis di buku ini, karena memang itu menjadi wilayah Paslon dan Parpol pengusungnya.

Aspek yang dimanfaatkan KPU Tomohon untuk mendapatkan keuntungan kelembagaan adalah dengan memaksimalkan publikasi di setiap sub tahapan pencalonan.

Pencalonan memang memiliki sejumlah sub tahapan. Mulai dari pendaftaran bakal Paslon perseorangan yang dilanjutkan dengan verifikasi faktual pendukung, pendaftaran Paslon, pencabutan nomor urut sampai dengan penetapan pasangan calon peserta Pilkada.

Sadar karena tahapan ini menyedot atensi masyarakat, kami mem-*push* habis-habisan publikasi di berbagai platform digital. Sepekan sebelum pencalonan, setiap hari kami mem-*blow up flyer* di semua akun sosial media terkait hal-hal teknis. Teman-teman media juga rajin memberitakan hal ini. Terasa sekali antusiasme masyarakat. Komentar-komentar di setiap *content* yang kami aplot di *facebook* atau *Instagram* begitu banyak.

Hanya saja, KPU Tomohon sedikit hati-hati mengeksploitasi tahapan ini. Protokol penanganan pencegahan Covid-19 tentu saja melarang kerumunan orang. Dikuatirkan, saat Paslon mendaftar pendukung yang hadir juga jumlah berlebihan. Terkait ini, kami berulang kali melakukan koordinasi dengan semua Paslon, aparat

kepolisian dan TNI, gugus tugas Covid-19 serta pemerintah kota dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja.

Salah satu solusi yang dilakukan KPU Tomohon untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam tahapan pendaftaran Paslon adalah dengan menyiarkannya secara *live*, baik melalui akun *facebook* maupun *channel Youtube*. Dua *Platform* ini, *plus* topangan beberapa radio di Tomohon, cukup “mengobati luka” warga untuk menyaksikan langsung Paslon jagoan mereka saat mendaftar.

Yang menyaksikan *live* tersebut mencapai ribuan orang. Malah berdasarkan monitoring serta laporan dari sejumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS), tidak sedikit yang melakukan Nobar (nonton bareng). Saking antusiasnya, *operator* akun *facebook* dan *channel Youtube* sampai kelabakan meladeni protes warga manakala siaran tersebut sesekali terganggu karena jaringan atau *server internet*.

Meski begitu, tetap saja partisipasi masyarakat secara langsung di kantor KPU Tomohon terjadi saat pendaftaran Paslon. Bersama aparat kepolisian dan TNI, KPU Tomohon jatuh bangun untuk memberikan arahan dan pengertian

kepada pendukung, agar tidak berkerumun dan berpotensi menyebarkan virus Corona. Tapi begitulah. Partisipasi berbalut militansi memang tidak pernah mudah dikendalikan.

Tahapan penetapan bakal Paslon peserta Pilkada dan pencabutan nomor urut juga kami eksploitasi semaksimal mungkin, dalam menarik simpati dan partisipasi masyarakat. Lewat publikasi-publikasi jelang sub tahapan serta siaran langsung via media sosial saat hari H kegiatan, respon atau animo masyarakat benar-benar luar biasa.

Meski pendaftaran, penetapan dan pencabutan nomor urut Paslon memiliki nilai strategis dalam memantik partisipasi masyarakat, tapi verifikasi faktual pendukung bakal pasangan calon perseorangan menjadi variabel spesifik, kenapa kemudian tahapan pencalonan di Tomohon berkontribusi besar dalam peningkatan partisipasi masyarakat di Pilkada 2020.

Jadi begini. Ritme adalah elemen tak ternilai dalam menjaga antusiasme partisipasi masyarakat. Jika ada jeda yang membuat animo warga pelan-pelan meredup, tidak mudah untuk membangkitkannya kembali. Di sinilah letak

peran verifikasi faktual pendukung bakal pasangan calon perseorangan menjadi sangat kuat.

Di saat tahapan di kabupaten/kota lain kehilangan ritme, karena tidak ada tahapan strategis, Tomohon sebaliknya. Malah kehebohan terjadi beberapa pekan, selama masa tahapan verifikasi faktual pendukung bakal pasangan calon perseorangan. Aktivitas PPS untuk naik turun rumah pendukung calon perseorangan tentu saja melahirkan banyak cerita, di semua kelurahan.

Protes dari sejumlah pendukung karena merasa tidak pernah membubuhkan tanda-tangan mendukung bakal Paslon perseorangan, sampai dengan cerita-cerita kontroversial, melahirkan dinamika-dinamika khusus di semua kelurahan. Hal-hal inilah yang dibutuhkan untuk menjaga ritme partisipasi masyarakat terjaga selama tahapan Pilkada berlangsung.

Ledakan Partisipasi di Masa Kampanye

Lepas dari dampak negatif yang muncul, tahapan kampanye pasangan calon (Paslon) di Pilkada Kota Tomohon melahirkan respon masyarakat yang benar-benar di luar dugaan. Malah, kehadiran masyarakat Tomohon di 220 Tempat Pemungutan Suara (TPS) terbilang melampaui ekspektasi banyak pihak, salah satu faktornya karena residu yang muncul dari rivalitas antar pendukung saat kampanye.

Kerasnya “pertempuran” selama tahapan kampanye benar-benar tak terprediksi. Selain karena berbagai beleid (aturan) yang membatasi aktivitas kampanye dalam jumlah yang masif, tingginya penyebaran Covid-19 di Tomohon terbilang meresahkan banyak orang.



DEBAT: Kampanye debat pasangan calon menyita perhatian luas masyarakat Kota Tomohon

Tapi yang terjadi di lapangan berbeda. Meski secara preventif kami tak henti mewanti-wanti Paslon agar tidak menciptakan kerumunan dalam setiap aktivitas kampanye, situasi di lapangan benar-benar sulit dikendalikan. Warga selalu berjibun di lokasi kampanye, tak peduli virus Covid-19 yang sewaktu-waktu menginfeksi mereka.

Tahapan kampanye sendiri berlangsung medio 26 September – 5 Desember 2020. Kampanye kali ini berbeda

dengan sebelum-sebelumnya. Semua karena pandemi Covid-19. Tidak ada metode rapat umum atau kampanye besar. Itu berarti arak-arakan, kumpulan massa dalam jumlah besar semestinya tidak boleh terjadi.

Yang diperbolehkan hanya metode tatap muka, pertemuan terbatas, Alat Peraga Kampanye (APK), kampanye secara *virtual* dan debat Paslon. Untuk kampanye metode tatap muka dan pertemuan terbatas juga ada rambu-rambu khusus. Tidak boleh dilakukan di lapangan, hanya boleh di dalam ruangan atau ruangan tertutup. Peserta pun secara kumulatif hanya dibatasi 50 orang. Tata cara ini diatur secara detail supaya semua pihak yang terlibat tidak beresiko menularkan atau sebaliknya tertular Covid-19.

Praktiknya di lapangan menghasilkan situasi yang berbeda. Warga yang hadir berjubel. Tim Kampanye seperti tak kuasa meredam animo pendukung mereka. Serba salah memang. Dimarahi bisa berefek buruk buat Paslon, tapi jika tidak mereka berpotensi mendapatkan sanksi dari Bawaslu dan atau kepolisian.

Pelan-pelan, situasi ini melahirkan dinamika tinggi di lapangan. Posko-posko Paslon bertebaran di berbagai sudut kelurahan. Setiap hari, apalagi malam, selalu ramai disesaki warga. Atmosfir kampanye menghasilkan ledakan militansi yang tak terduga. Ancaman Pandemi Covid-19 secara kasat mata seperti diabaikan.

Tensi makin tinggi, militansi antar pendukung kemudian memproduksi aksi arak-arakan di jalan. Partisipasi warga dalam tahapan kampanye menjadi sulit dikontrol. Sering sekali jalan-jalan di Tomohon dibuat macet karena konvoi pendukung. Tidak pandang siang atau malam, *show of force* pendukung lazim terlihat di lapangan.

Biasanya aksi arak-arakan terjadi sebelum dan sesudah kampanye tatap muka dari Paslon. Parahnya, yang ikut dalam konvoi tersebut jumlahnya luar biasa banyak. Tak cuma menciptakan keramaian di seputaran lokasi kampanye tatap muka/pertemuan terbatas, aksi tersebut dilakukan di hampir semua jalan-jalan protokol. Puluhan mobil dan ratusan motor beriring-iringan.

Sejujurnya situasi ini juga menjadi dilematis buat penyelenggara Pilkada, baik itu KPU maupun Bawaslu Tomohon. Berulang kali kami melakukan Rakor dengan Paslon dan atau timnya, tapi tidak pernah manjur dalam praktik di lapangan. Pasangan calon dan tim kampanye-nya selalu memberikan respon klasik: “Kami sudah melarang. Tapi ini murni inisiatif pendukung. Kami tidak bisa berbuat banyak.”

Panas di darat, keras juga di udara. Perang urat syaraf di media sosial menjadi sangat-sangat tinggi. Sudah terbayang bagaimana lalu lintas postingan dukungan dari ribuan orang. Ada yang *soft*, ada pula yang kasar. Malah ada yang karena tak cerdas ber-medsos, mengaplot kalimat atau foto *caption* yang beresiko jadi masalah hukum. Sangat disayangkan, tapi seperti itulah dampak yang lahir dari kampanye yang bertensi tinggi.

Dari aspek penyelenggara, *feedback* paling terasa muncul dalam pelaksanaan debat pasangan calon. KPU Tomohon menggelar debat sebanyak tiga kali. Semua disiarkan secara *live* di akun *facebook* dan *channel Youtube*

resmi, juga disiarkan secara *live* oleh beberapa radio dan juga TVRI Manado.

Setiap *episode* debat, warga yang menyaksikan lewat *live* akun *facebook* dan *channel Youtube* KPU Tomohon disesaki belasan ribu *viewer*. Gangguan jaringan sedikit saja, protes langsung meledak di kolom komentar. Itulah reaksi alamiah saat menyaksikan agenda yang strategis. Dahsyat sekali memang partisipasi masyarakat untuk sub tahapan ini.

Peran Strategis Paslon, Parpol, Media dan Pemerintah

Sehebat dan sekreatif apapun usaha yang dilakukan, partisipasi masyarakat tidak akan muncul secara maksimal jika operatornya tunggal. Hanya penyelenggara Pilkada. Dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Pasangan calon (Paslon), Partai Politik (Parpol), pemerintah dan media memiliki posisi sangat strategis dalam memompa animo masyarakat pemilih dalam berpartisipasi di setiap tahapan Pilkada.

Paslon adalah patron. *Trend setter*. Sikap dan kalimat dari calon pemimpin ini akan jadi gejala di bawah. Jika

Paslon rajin memberi imbauan kepada pendukungnya untuk aktif berpartisipasi di setiap tahapan, atmosfer positif pasti akan menggejala di lapangan.

Untuk tahapan pemutakhiran data pemilih misalnya. Jika Paslon menginstruksikan tim kampanye dan tim sukses di setiap kelurahan untuk aktif mengkonsolidasi pendukung agar aktif mengecek nama mereka apakah sudah terdaftar atau tidak, masalah-masalah terkait data sudah bisa dikendalikan lebih dini. Tidak meledak setiap hari H pemilihan.

Parpol juga begitu. Malah peran para pengurus menjadi luar biasa strategis jika dimaksimalkan di setiap tahapan Pilkada. Kembali dikaitkan dengan tahapan pemutakhiran data pemilih. KPU Tomohon sebenarnya sudah berusaha semaksimal mungkin melecut antusiasme pengurus. Sayang sekali. Dalam setiap pleno di level kelurahan, teman-teman Panitia Pemungutan Suara (PPS) malah ada yang kesulitan untuk menghadirkan pengurus parpol tingkat kelurahan.

Kalaupun hadir, biasanya pengurus parpol tersebut tidak aktif mencermati hasil pemutakhiran data dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau PPS sendiri. Hanya hadir saja. Formalitas belaka. Yang menyedihkan, nanti saat proses pemungutan suara, baru berbagai protes dimunculkan.

Situasi ini juga berlaku sampai di level kecamatan. Dari sekian banyak pleno maupun pertemuan terkait data pemilih yang dilakukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), partisipasi aktif terasa minim. Sama dengan gejala di tingkat kelurahan, kalaupun hadir, pasti lebih pada aspek formalitas.

Di tingkat kota sebenarnya tidak jauh-jauh berbeda. Memang sesekali ada debat. Tapi yang dilontarkan biasa lebih pada tataran naratif. Malah ada beberapa yang sejujurnya lebih beraroma retorika. Tidak didukung dengan data empirik di lapangan. Sayang sekali memang, apalagi jika mengingat Parpol-parpol tradisional sebenarnya memiliki infrastruktur sampai di tingkat kelurahan.

Selain Paslon dan Parpol, media tak diragukan lagi menjadi elemen penting dalam setiap tahapan Pilkada. Baik itu tujuannya untuk memantik partisipasi publik, maupun

dalam hal memberikan informasi yang kredibel kepada masyarakat. Bagaimanapun juga, digitalisasi sudah melahirkan ‘jurnalis-jurnalis’ dalam individu masyarakat. Meski belum bisa diyakini kebenarannya, banyak warga yang tanpa beban meng-upload sejumlah rumor dan isu ke akun media sosial mereka masing-masing.

Media konvensional dan atau media *mainstream* memiliki tanggung jawab untuk melahirkan *content-content* berita yang edukatif. Warga biasanya cenderung percaya jika informasi disampaikan lewat media, baik itu koran, televisi, radio maupun laman *online*.

Pemerintah juga tidak kalah strategisnya. Memiliki infrastruktur sampai di tingkat terkecil namun paling strategis, yakni level lingkungan, peran serta pemerintah yang sifatnya konstruktif akan sangat kuat pengaruhnya di lapangan. Kembali jika dikaitkan dengan pemutakhiran data pemilih, yang mana tahapan ini memang paling panjang dan merepotkan, hal-hal klasik yang selama ini terjadi semestinya tidak perlu muncul lagi.

Banyak warga yang skeptis dengan KPU terkait data pemilih. Padahal KPU secara teknis hanya memutakhirkan data pemilih yang disodorkan pemerintah. Data dari Disdukcapil kota dikirimkan ke Kemendagri, setelah itu Dirjen Dukcapil mengirimkan kembali data ke KPU kabupaten/kota melalui KPU RI. Alurnya begitu.

KPU kemudian memutakhirkan di lapangan. Sayangnya, di lapangan banyak situasi yang tak terdeteksi. Lumayan banyak masyarakat yang belum sempat mengurus akte kematian keluarga mereka. Tidak sedikit yang sudah pindah domisili di kelurahan lain, tapi tidak dilaporkan ke pemerintah. Terakhir, yang paling menggejala, masih banyak warga yang belum memiliki KTP Elektronik.

Secara aturan memang tidak salah. Karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyampaikan posisi mereka di beberapa masalah di atas lebih pada posisi pasif. Jika warga datang mengurus mereka akan layani dengan baik dan cepat, tapi kalau tidak hal tersebut jadi kerugian sepihak warga.

KPU Tomohon sendiri terpaksa harus melangkah sedikit di luar koridor, hanya karena ingin melindungi hak pilih masyarakat. Semestinya hanya mengurus data pemilih, KPU Tomohon sudah sampai aktif di lapangan mendorong warga yang belum punya KTP Elektronik untuk secepatnya melakukan perekaman.

Sebenarnya hal ini tidak perlu terjadi, jika infrastruktur pemerintah di kelurahan dioptimalkan semaksimal mungkin. Jika semua aparat kelurahan secara gradual aktif turun lapangan menjemput bola, mendata kembali semua warga, masalah data pemilih pasti tidak akan seribet sekarang.

Mengelola Parmas yang Sustainable

Capaian bagus jadi kebanggaan sekaligus tantangan untuk penyelenggara di Pemilu dan Pilkada *episode* selanjutnya. Tidak mudah memang menjaga ritme agar partisipasi masyarakat (Parmas) di setiap tahapan Pilkada, teristimewa partisipasi pemilih di Tempat Pemungutan Suara

(TPS), tetap *sustainable*. Tidak mudah. Butuh ekosistem kepemiluan yang saling support satu dengan yang lain.

Berdasarkan pengalaman di Pemilu Legislatif 2019 dan Pilkada 2020, beberapa variabel penting supaya Parmas tinggi di setiap tahapan adalah regulasi, sinergitas dan kreativitas penyelenggara pemilihan itu sendiri. Jika tiga hal ini berjalan seperti yang diharapkan, output Parmas akan lebih terjaga. Tapi jika tiga hal ini tidak memiliki konektivitas yang konstruktif, sulit mengharapkan tingkat Parmas yang maksimal.

Regulasi memegang faktor kunci. Lagi-lagi dikaitkan dengan data pemilih, karena tahapan ini memang paling minim level Parmas-nya. Aturan terkait data pemilih masih sangat lembut karena tuntutan frasa hak pilih sebagai hak konstitusional. Masyarakat merasa tidak terlalu terbebani meski tidak terdata, karena cukup bermodal KTP saja mereka sudah bisa memilih di TPS.

Fakta ini jelas saja melahirkan kemerosotan minat di kalangan masyarakat, karena merasa hak pilih mereka tetap aman, meski pemutakhiran data pemilih nama mereka tak

masuk Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Situasi ini tentu saja memberi dampak tak baik bagi KPU. Pasalnya data pemilih sangat memengaruhi postur Pilkada secara makro. Berapa jumlah surat suara dicetak, dan berapa jumlah logistik lain diadakan, semua sangat tergantung jumlah pemilih. Berapa jumlah TPS, juga sangat tergantung jumlah pemilih di setiap kelurahan. Malah di tahapan kampanye, patokan KPU dalam mencetak *flyer*, brosur, pamflet dan lain-lain, sangat tergantung jumlah pemilih.

Pada gelaran pesta demokrasi berikut, penyelenggara juga harus memastikan bahwa ekosistem kepemiluan jalan. Artinya kerjasama konstruktif dengan sejumlah *stakeholder* peserta pemilihan, pemerintah, media, tokoh agama, tokoh masyarakat dan penggiat Pemilu adalah kebutuhan yang absolut. Tidak boleh terabaikan. Mengandalkan penyelenggara saja, *output* Pemilu dan Pilkada tidak akan seperti yang diharapkan.

Yang tak kalah pentingnya juga soal insting dan kepekaan dari penyelenggara. Insting dan kepekaan melahirkan ide dan gagasan. Kreativitas muncul dari ide dan gagasan. Kreativitas memunculkan banyak sekali alternatif program. Yang mana hal ini menjadi sangat dibutuhkan dalam menangkap keinginan ‘pasar’ (baca: pemilih). Jika penyelenggara kaku dan tidak punya passion yang bersenyawa dengan situasi di lapangan, program yang dijalankan tidak akan memproduksi *output* yang maksimal.

Kepekaan dan kreativitas penyelenggara muncul karena beberapa faktor, diantaranya pengalaman, dedikasi dan *teamwork* yang hebat. Oleh karena itu, menjadi penting jika komposisi anggota KPU, PPK dan PPS di waktu yang akan datang mempertimbangkan tiga faktor di atas. (*)

BAGIAN 3

TESTIMONI ANGGOTA-ANGGOTA PPK

Penuh Tantangan, Banyak Kenangan

Lily Mangundap

Ketua PPK Tomohon Selatan

Ketika nama diumumkan masuk sebagai anggota PPK, saya terasa bersemangat dan bahagia bisa terpilih dari sekian pendaftar untuk ikut berperan dalam pesta demokrasi negara tercinta khususnya kota tempat kelahiran Tomohon. Terpampang di depan mata tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan.

Seiring berjalanya waktu, tahapan demi tahapan dilalui dengan penuh semangat. Suka dan duka, sederet tantangan datang silih berganti, namun semangat pantang menyerah tetap terpatri dalam dada untuk sukseskan Pilkada tahun 2020. Ketika ada PPS mulai “nakal” dalam melaksanakan tugas, melatih diri saya untuk selalu sabar menghadapi beragam tingkah laku mereka.

Ketika menghadapi sulitnya mencari PPDP dan KPPS yang bersih, naik turun rumah bersama PPS tuk dapat penyelenggara yang bersih dan berintegritas melatih

kesabaran dan keuletan dalam menjalankan tugas mulia ini. Dalam perjalanan tahapan, banyaknya “surat cinta” yang diterima dari Bawaslu membuat kami PPK semakin tangguh dan jeli melihat persoalan-persoalan. Apalagi kami didukung, diarahkan dan diberi solusi selalu oleh Pak Stenly Kowaas, selaku komisioner KPU Tomohon Korwil Tomohon Selatan.

Saya sempat mengalami stress berat, karena ketika menjalani rapit tes hasilnya reaktif. Saya sedih, hampir putus asa dan merasa tidak berdaya karena harus menjalani isolasi di rumah sementara tahapan sosialisasi sementara berlangsung. Tubuh terbaring di rumah, tapi pikiran melanglangbuana memikirkan tugas dan tanggung jawab yang harus saya selesaikan. Syukur kepada Tuhan hasil Swab keluar dengan hasil negatif. Saya bersemangat dan langsung melaksanakan tugas.

Ketika berbagai masalah kami hadapi dalam proses persiapan pemilihan dimana ada satu kelurahan di Tomohon Selatan yang masyarakatnya sangat kritis membuat saya dan Ketua KPU Kota Tomohon Harryanti Lasut harus lima kali bolak-balik untuk menyelesaikan tempat mendirikan satu

TPS, sehari menjelang Hari H. Masalah ini muncul karena “perbedaan warna” di antara masyarakat setempat.

Penyelenggara yang kesulitan menentukan tempat yang tepat. Ada rasa putus asa tapi Tuhan selalu menguatkan dan memberi jalan keluar kepada saya untuk menyelesaikan tugas ini. Tepat pukul 11.00 selesai ibadah di gereja untuk kelima kalinya saya langsung ke kelurahan tersebut, dan puji Tuhan ada satu pihak tokoh politik yang mau mengalah dan menyetujui tempat yang sesuai persyaratan.

Hari H tiba, kami melalui dengan berbagai ketegangan dan masalah-masalah yang menuntut kami PPK harus memberi jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi PPS dan KPPS. Seakan burung merpati yang terbang ke sana-kemari, begitulah kami masih berada di satu kelurahan, panggilan kelurahan lain juga sudah masuk dan HP tak pernah berhenti berdering.

Tapi puji Tuhan semua deringan yang masuk dapat diterima dan diselesaikan dengan bantuan Korwil Stenly Kowaas dan Kadiv Teknis Robby Golioth, tentunya juga yang terpenting karena pertolongan Tuhan. Bagaikan rajawali

yang tak pernah lelah kami melaksanakan tugas mulia ini. Tapi setelah selesai hari H, badan terasa tak dapat bergerak, tubuh terasa linu, mata terasa berat, tangan dan kaki terasa pegal, tapi hati dan pikiran terasa lega karena tahapan proses pemilihan telah selesai, menunggu tahapan selanjutnya pleno di kecamatan.

Pleno di kecamatan banyak rekomendasi dari Bawaslu Kecamatan Tomohon Selatan tapi semua dapat diselesaikan. Ini semua berkat rekomendasi yang membuat PPK Tomohon Selatan dapat melaksanakan pleno di tingkat KPU dengan lancar. Lega rasanya tugas telah selesai. Makasih Tuhan, Tugas yang berat tapi mulia ini telah selesai. Suka dan duka telah dilalui, berbagai masalah telah dialami dan diselesaikan membuat saya bangga menjadi bagian dari penyelenggara Pilkada tahun 2020 yang penuh kenangan indah ini.

Integritas dan Resiko Penyelenggara Pemilu di Tengah Pandemi

Denny Liuw

Ketua PPK Tomohon Timur

Suksesnya Pemilihan Kepala Daerah Desember lalu merupakan kabar gembira bagi seluruh rakyat yang terlibat di dalamnya, baik sebagai peserta, pemilih maupun penyelenggara. Hal ini merujuk kepada amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk memilih pemimpin di daerah, baik itu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Karena ketika melahirkan pemimpin baru sesuai amanat undang-undang kita, merupakan kemenangan dan kabar gembira bagi seluruh masyarakat. Dimana dalam mewujudkan cita-cita mulia undang-undang tersebut, tentunya dibutuhkan usaha kerja keras dari semua *stakeholder* tanpa terkecuali.

Pemilukada kali ini terasa sangat berbeda, mengingat Indonesia terlebih khusus daerah kita masih menghadapi serangan Pandemi Covid-19 yang hampir setahun ini sangat memprihatikan. Hampir semua sektor di negeri ini

tergoncang akibat Pandemi ini. Akan tetapi dengan pertimbangan matang pemerintah pusat akhirnya tetap melaksanakan Pemilukada sesuai amanat undang-undang, meskipun sempat tertunda pelaksanaannya beberapa bulan. *Show must go on*, Pemilukada tetap dilaksanakan dengan pengaturan yang berbeda dari biasanya, penerapan protokol kesehatan ketat menjadi frame baru disetiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir dan melindungi setiap masyarakat yang datang memberikan hak suaranya dari ancaman Covid-19.

Kita ketahui bersama Kota Tomohon merupakan salah satu wilayah, dari sekian banyak daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota kali ini. Sejenak melupakan Covid-19, kita ketahui bersama Pilkada menjadi salah satu hal yang paling menarik perhatian masyarakat, baik itu di level elit maupun sampai pada level akar rumput, hampir semua pembahasan diruang publik, membahas Pilkada. Hal ini menjadi bahasan yang menyenangkan, tapi tak jarang pula menjadi pembahasan yang sangat berbahaya, dalam artian sering memunculkan

konflik sosial di masyarakat karena berbeda pilihan. Berdasarkan data Tingkat kerawanan politik Pilkada, akan menjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemilihan legislatif di tahun 2019. Hal ini disampaikan oleh Bawaslu RI dan Polri yang menempatkan Kota Tomohon sebagai salah satu kota dengan tingkat kerawanan tertinggi di Indonesia. Konteks sosial dan politik menjadi salah satu pengukur dalam menentukan tingkat kerawanan. Sosial dan politik ini berhubungan dengan keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, otoritas penyelenggara negara dan relasi kuasa di tingkat lokal atau daerah. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian khusus sehingga tidak akan terjadi dalam setiap tahapan pilkada serentak di tahun 2020.

Keberhasilan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 menjadi salah satu hal yang tidak mudah untuk diraih. Banyak kalangan yang meragukan akan kualitas pemilu karena beranggapan bahwa relasi kuasa di daerah akan banyak mempengaruhi proses pemilihan. Adanya intervensi dari pihak tertentu terhadap penyelenggara pemilu yang akan mewarnai proses perjalanan tahapan pilkada sehingga mempengaruhi kualitas Pemilu. Untuk mencapai

tujuan pemilu sesuai dengan yang diharapkan KPU harus mengambil langkah yang tepat untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi terutama memberikan keyakinan terhadap masyarakat bahwa semua proses penyelenggaraan pemilihan akan berlangsung sesuai dengan aturan yang ada tanpa adanya intervensi ataupun keberpihakan kepada pihak tertentu.

Salah satu kunci sukses dalam mencapai keberhasilan pemilu terdapat pada integritas penyelenggara Pemilu. Penyelenggara pemilu yang bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada tanpa adanya tekanan dari pihak tertentu, akan membawa tingkat kepercayaan publik meningkat, sehingga kualitas dari hasil pemilu akan dicapai. Namun jika penyelenggara pemilu tidak mampu menjaga integritasnya, bukan hanya kualitas pemilu yang akan menjadi buruk, tapi juga permasalahan lain akan muncul dan akan mempengaruhi tingkat kepercayaan publik menjadi rendah. Karenanya untuk mengantisipasi hal tersebut kualitas dari penyelenggara Pemilu menjadi bagian penting untuk diperhatikan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya KPU bersama dengan Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berpedoman pada regulasi. Sesuai dengan aturan yang ada dalam PKPU NO. 3 Tahun 2020 mengatur tentang tata kerja penyelenggara Pemilu. Dalam aturan tersebut banyak mengatur tentang bagaimana sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara Pemilu.

Menjadi penyelenggara Pemilu di tengah situasi pandemi Covid-19 dan dalam tingkat kerawanan politik Pilkada yang tinggi tidaklah mudah, karena segala bentuk perilaku kita dipantau oleh banyak pihak. Tidak hanya di lingkungan dimana kita berada tapi juga bagaimana sikap kita dalam menggunakan teknologi informasi khususnya dalam penggunaan media sosial. Sedikit saja kesalahan yang kita lakukan akan memberi dampak yang besar bagi lembaga dimana kita melayani yakni KPU. Pelaksanaan tahapan Pilkada di tingkat kecamatan Tomohon Timur tidak sepi dari masalah. Masalah netralitas penyelenggara Pemilu menjadi hal yang sering dipermasalahkan, baik dari hasil laporan masyarakat maupun Panwascam, sehingga ada beberapa

penyelenggara Pemilu di tingkat kelurahan harus berproses dengan aturan karena masalah integritas, dimana dinilai tidak netral atau berpihak kepada salah satu pasangan calon.

Penggunaan media sosial yang tidak bijak menjadi masalah bagi penyelenggara Pemilu. Walaupun dinilai sepele karena hanya memberikan tanda “like” atas postingan yang berhubungan dengan proses pemilihan, namun itu telah memberikan penilaian yang tidak baik bagi kalangan penyelenggara Pemilu. Selain itu ada juga yang terang-terangan memperlihatkan dukungannya, yakni dengan menghadiri kegiatan partai politik, berfoto dan menggunakan atribut yang mencitrakan salah satu peserta Pemilu. Tidak hanya dari kalangan penyelenggara pemilu di tingkat kelurahan atau PPS, tetapi hal yang sama juga dialami oleh KPPS. Sehingga banyak yang harus diganti. Proses penggantian inilah yang membuat pekerjaan di tingkat PPK menjadi lebih sulit karena tidak mudah mencari pengganti di situasi pandemi dan politik yang tinggi. Karena banyak masyarakat yang kurang ingin menjadi penyelenggara pemilu dengan beragam alasan.

Selanjutnya di tahap akhir pelaksanaan Pilkada, PPK harus berhadapan dengan adanya laporan Bawaslu terkait petugas KPPS di beberapa kelurahan yang diduga telah terkonfirmasi positif Covid-19 namun masih melaksanakan tugas di TPS. Ini membuat permasalahan semakin rumit, karena isu ini akan membuat proses pelaksanaan Pilkada menjadi ancaman bagi keselamatan penyelenggara pemilu dan masyarakat. Dan jika terbukti benar maka akan menjadi sia-sia segala upaya yang dilakukan penyelenggara Pemilu dan pemerintah serta memberikan catatan yang buruk bagi pelaksanaan Pilkada di Kota Tomohon. Namun setelah dikonfirmasi ke pihak yang bisa memberikan keterangan terkait hal ini, KPU bisa memberikan keterangan bahwa petugas KPPS yang disinyalir melanggar tersebut sudah berada pada status aman karena telah melewati beberapa rangkaian pemeriksaan, sehingga bisa melaksanakan tugas.

Sedangkan terhadap petugas KPPS lainya yang dilaporkan dengan dugaan yang sama oleh salah satu wartawan, sudah dinonaktifkan dan tidak lagi melaksanakan

tugas di TPS. Permasalahan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu beserta dengan hal-hal yang dikhawatirkan akan terjadi sepanjang tahapan pemilihan, semuanya bisa teratasi dengan baik. Ini terjadi karena komitmen dari penyelenggara pemilu atau KPU untuk menjalankan segala aturan yang ada menjadikan segala sesuatu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya penegakan aturan tanpa memandang latar belakang ataupun kepentingan tertentu sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggara pemilu meningkat. Masyarakat tidak lagi menjadi khawatir akan adanya intervensi ataupun tekanan dari pihak tertentu yang akan mempengaruhi keputusan hasil pemilu karena semua bisa melihat bagaimana penegakan aturan diberlakukan untuk setiap penyelenggara pemilu, mulai dari tingkat kecamatan hingga ke tingkat kelurahan.

Tingkat kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan pemilihan oleh KPU yang tinggi membawa dampak yang baik bagi kualitas hasil pemilu. Hal ini terlihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang mencapai lebih dari 91% tidak hanya menempatkan Kota Tomohon dalam

peringkat 1 di Indonesia tapi juga salah satu kelurahan, yakni kelurahan Kumelembuai, Kecamatan Tomohon Timur bisa meraih predikat tertinggi nasional untuk tingkat partisipasi masyarakat.

Keberhasilan ini perlu kita jaga dan syukuri, karena untuk mencapai semua ini tidaklah mudah. Dibutuhkan perjuangan dari berbagai pihak untuk mencapainya. Kita telah berjuang melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan yang ada, bahkan lebih dari itu. Semoga apa yang sudah kita lalui bersama bisa menjadi pengalaman berharga. Dan saya bangga bisa menjadi bagian dari pelaku sejarah berdemokrasi di negeri ini!!... Tuhan kiranya memberkati Kota Tomohon dan memberkati kita semua.

Fokus di Setiap Tahapan

Youcle D. Rares

Ketua PPK Tomohon Utara

Karir sebagai penyelenggara Adhoc KPU terbilang panjang. Saya memulai sejak Pilkada tahun 2010 sebagai anggota Sekretariat PPS, Pemilu Legislatif serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 sebagai anggota PPS.

Kemudian pada Pilkada tahun 2015 sebagai anggota PPK, Pemilu Legislatif serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 sebagai Ketua PPK. Jabatan serupa di Pemilu 2019 juga diemban saat menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020. Salah satu momen spesial saat menjadi peserta terbaik pada Kursus Kepemiluan dari KPU Tomohon tahun 2018.

Beberapa kali menjadi penyelenggara Adhoc KPU, pribadi saya sudah terbentuk secara natural untuk berkeinginan terlibat dalam setiap Pemilu sejak tahun 2009. Dalam artian, memang sudah termotivasi penuh untuk ikut

serta sebagai penyelenggara. “Berikut siap?” adalah pertanyaan yang muncul pada kalangan teman-teman penyelenggara di setiap akhir tahapan Pemilu. “Trauma atau tobat” pasti ada yang terucap. Namun bagi saya, sukses yang dicapai kala mampu melewati proses yang penuh dinamika merupakan kepuasan atau kenikmatan batin yang tidak akan tergantikan atau terlupakan.

Begitu juga ketika menuntaskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon tahun 2020. Yang awalnya hari pemungutan suara terjadwal 23 September 2020 , lantas diundur ke 9 Desember 2020. Disebabkan pandemi Covid-19. Ini membawa warna tersendiri bagi saya dibandingkan Pemilu-Pemilu sebelumnya. Sebab mustahil bagi orang lain di tengah situasi Covid-19 yang mengguncang dunia, namun sangat bermakna dan begitu menantang buat saya.

Sejak dilantik pada 29 Februari 2020 dan terpilih sebagai Ketua PPK Kecamatan Tomohon Utara, kami langsung *action* dengan membentuk Sekretariat PPK. Penentuan Sekretariat PPK memerlukan relasi baik dengan

camat. Kami pun boleh menentukan siapa nama-nama yang boleh bekerjasama dengan PPK. Dampaknya, PPK dan Sekretariat Tomohon Utara begitu solid di semua tahapan termasuk pengelolaan keuangan.

Tiba di tahapan perekrutan PPS pada Bulan Februari. PPK diingatkan soal trauma Pemilu tahun 2019, selain aturan SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik). Ditunjang sosialisasi dan aktifnya PPK turun langsung mencari calon PPS secara *door to door*. Meski ada kelurahan yang minim sehingga PPK bekerja ekstra sampai kuota calon PPS terpenuhi. Saat akan memasuki pelantikan PPS di Bulan Maret, tahapan ini tertunda karena Pandemi Covid-19.

Menunggu keputusan resmi KPU RI dan ditengah desakan sejumlah pihak agar pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda, akhirnya lanjutan tahapan Pilkada dimulai 15 Juni 2020. Sedangkan hari H diundur pada 9 Desember 2020. Inilah titik awal kami bekerja dengan serba baru dan penuh keterbatasan. Ditengah merebaknya pandemi Covid-19, tidaklah mudah bagi penyelenggara Adhoc karena butuh kesiapan mental yang kuat.

Kita wajib bekerja sesuai protokol kesehatan Covid-19 untuk menjaga atau melindungi pemilih serta lapisan masyarakat yang terlibat dalam pemilihan. Juga menjaga kesehatan diri dan terlebih keluarga kita.

Tahapan yang super padat, masing-masing divisi saling beririsan dan tumpang tindih. Begitu juga pertemuan-pertemuan tatap muka dibatasi baik rapat maupun pleno dan bimbingan teknis. Pemberlakuan rapat secara *daring* (dalam jaringan), menjadi kendala dan keraguan dalam tindak lanjut setiap tahapan bagi kami penyelenggara adhoc.

Lanjutan tahapan dimulai lagi Juni. Diawali pelantikan PPS melalui Daring. Hal baru bagi PPS. Bahkan ada kelucuan dalam pelantikan ini yakni signal tidak baik menimbulkan sedikit riak. Seperti ketika warna latar atau dasi yang dipakai harus netral. Pimpinan sampai menegur karena warna kelihatan tidak netral, karena warna pink kelihatan merah di layar.

Kemudian pembentukan Sekretariat PPS dan tidak kalah membuat galau kami PPK, ketika PPS dan Sekretariat

akan di-rapid test. Ada beberapa yang menolak. Ada yang takut dan memakai alasan lain dengan mengundurkan diri.

Tahapan verifikasi faktual calon perseorangan dari tahap pertama hingga ketiga, dan rekapan dari tingkat PPS, PPK dan KPU, banyak dinamika yang dilalui. Selama tahapan ini, saya dan Pak Robby (Golioth), selalu tidur menjelang subuh. Menunggu rekapan harian dari PPS, tapi semua terlaksana dan berjalan dengan baik. Tentunya dengan koordinasi mantap dari komisioner KPU, PPK, LO dan Panwaslu. Tak terkecuali melakukan rapat terbatas. Hal serupa kami lakukan dengan PPS.

Tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih juga menjadi salah satu tahapan yang sangat krusial dan strategis bagi terselenggaranya Pilkada. Bertujuan menghasilkan DPT yang terpercaya dan terlindunginya hak pilih warga negara, Meski tahapan ini dilalui sangat panjang. Tahapan Coklit dimulai dengan perekrutan PPDP yang cukup sulit. Lagi-lagi karena calon wajib *rapid test*. Apalagi sensus bakal masuk keluar rumah meski situasi pandemi.

Kendala Silon di mana Pilkada Tomohon ada calon perseorangan. Begitu juga Sipol. Tapi PPK boleh melewatinya dengan turun langsung mengawal bersama PPS. Dalam proses Coklit, PPDP sudah optimal. Mulai dengan adanya Gerakan Coklit Serentak (GCS) dan Gerakan Pakai Masker (GPM). Ada beberapa hal yang penting sehingga PPK benar-benar harus mengawal melalui aplikasi pesan grup ataupun turun langsung.

Yakni perlu sekali Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) mengawasi PPDP dalam pelaksanaan di lapangan. Meyakinkan bahwa pelaksanaan Coklit sesuai aturan, progress laporan harian Coklit harus valid secara berjenjang dari PPDP, PPS dan PPK. Cukup dilema di tahapan ini. Di mana ada hal menarik tapi menakutkan yang terjadi yaitu adanya warga yang positif Covid-19, tapi PPDP sudah mencoklit di rumah tersebut. Termasuk rumah pemilih yang sulit dijangkau, ataupun pemilih yang tinggal di kebun karena adanya pembatasan sosial. Semua dilewati penuh perjuangan yang mengharukan dan tak terlupakan.

Menuju DPT, dibuatlah posko layanan daftar pemilih, hotline cek data pemilih, serta website cek data pemilih. Termasuk adanya uji publik. Lanjut tahapan rekapan DPHP ini sedikit membuat kekacauan di PPS. Karena ada perubahan jadwal rekap tingkat kelurahan yang tiba-tiba. Sehingga persiapan yang dilakukan dibatalkan. Begitupula masalah PKD harus membawa surat mandat. Tapi dengan koordinasi baik dengan Panwaslu dan LO sehingga DPHP di tingkat PPS boleh terselesaikan.

Penyusunan A.B KWK yang mepet dan penginputan ke Sidalih yang kejar tayang, serta temuan Bawaslu RI dengan tahapan bersamaan, membuat PPK dan PPS kelimpungan. Tapi kami bisa melaksanakan semua itu karena ada semangat dan kebersamaan yang terjalin. Termasuk uji petik atas temuan Bawaslu RI dengan pencermatan bersama dengan Panwaslu.

Kemudian Tahapan DPS di mana pengumuman DPS diviralkan dan disosialisasikan supaya elemen data menuju DPT yang baik. Misalnya data ganda, data anomali, pemilih yg NKK dan NIK luar kota, usia dibawah umur, terlebih

wajib pilih yang belum terdaftar. Pengumuman DPS harus memakai 8 bintang. Tahapan ini menyita energi, waktu dan pikiran sampai lupa tidur karena pulang pagi. Semangat juang yang tinggi, ending-nya, DPT boleh disahkan dalam rapat pleno mulai tingkat PPS, PPK, KPU kota, KPU provinsi dan KPU RI. Sesudah DPT ditetapkan, timbul masalah banyak pemilih yang tidak memiliki KTP-el. Gerakan mendukung rekam KTP-el pun dilaksanakan.

Menuju hari H tanggal 9 Desember 2020, dimulai dengan perekrutan KPPS. Di Tomohon Utara terdapat 63 TPS tersebar di 10 kelurahan. Jadi harus merekrut sebanyak 441 KPPS dan Linmas sebanyak 126 orang. Di masa pandemi dan syarat untuk menjadi KPPS yakni harus di-swab. Muncul salah kaprah oleh masyarakat tentang KPPS akan memakai pakaian hazmat. Tapi ini hanya relatif atau sewaktu-waktu ketika diperlukan. Dan hanya 1 KPPS yang akan menggunakannya.

Bersama PPK dan PPS, kami jemput bola untuk calon KPPS. Tidak mengenal waktu berjibaku dengan waktu sampai tengah malam turun mencari calon KPPS. Kami pun

sedikit lega karena syarat swab diganti rapid test. Untuk Swab adalah PPK, PPS dan sekretariat, sehingga mempermudah kami dalam mencari calon KPPS.

Hal yang membuat kami kalang kabut yakni ada calon KPPS yang sudah lengkap berkas mengundurkan diri. Bahkan sampai mendekati hari H masih ada yang mengundurkan diri. Adapula Calon KPPS yang rapid test reaktif sehingga harus di-swab. Tantangan tidak kalah menarik yaitu sampai H-1 pencoblosan ada KPPS tersangkut masalah kode etik. Diduga tidak netral dan ditemukan di media sosial.

Di Tomohon Utara, hanya 1 KPPS dan 2 Linmas yang kena masalah. Karena saya tidak henti-hentinya mengingatkan netralitas sebagai penyelenggara baik PPS dan KPPS. Pola memonitor langsung di media sosial juga sering menimbulkan rasa was-was. Jangan sampai salah pencet sehingga dapat blunder ke diri sendiri.

Koordinasi secara intens dengan Panwaslu, akhirnya boleh sampai hari pemungutan dan penghitungan semua

aman. Kemudian beriringan penentuan titik koordinat TPS serta Bimtek Sirekap dan lokasi pembuatan TPS, titik koordinat untuk pemakaian Sirekap supaya lancar. Ada beberapa TPS yang dalam pembuatannya mendapatkan tantangan sampai H-1 karena berbagai penilaian. Ada yang objektif tapi banyak yang karena unsur politik. Tapi saya secara keras setiap menerima masalah, di lokasi TPS diselesaikan berkoordinasi dengan pimpinan KPU.

Tanggal 8 dan 9 Desember hari penentuan untuk Pilkada 2020. Mulai persiapan Logistik H-1 serta monitoring kesiapan TPS. Bahkan mempersiapkan kedatangan monitoring KPU provinsi, Kapolda Sulut bersama KPU kota di TPS 4 Kelurahan Kakaskasen Satu. Hari Pemungutan dan Penghitungan adalah hari di mana mata dan telinga saya tidak bisa lepas dari telepon genggam. Saya berkoordinasi dengan Pak Roby (Kadiv Teknis KPU Tomohon), PPS dan KPPS untuk menyelesaikan masalah dan hal-hal lain di TPS.

Di saat ada masalah, harus turun langsung supaya proses di TPS tidak terhambat. Intinya, koordinasi harus jalan baik antara KPU, PPK, PPS dan KPPS bersama Panwaslu

kepada PTPS. Tak kalah pentingnya, Bimtek yang baik sehingga penyelenggaraan pemungutan dan perhitungan suara berjalan aman, damai dan baik. Pada malamnya, kami tidak tidur karena proses pergeseran logistik ke tempat rekapitulasi PPK.

Hal paling menarik di hari H, KPPS dan pemilih dalam proses di TPS suasananya sangat berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Karena ada 15 hal baru yang berlaku, ada pemilih yang dilayani di rumah, KPPS memakai baju hazmat ketika menuju rumah pemilih.

Tiba saatnya pleno tingkat PPK. Sebelumnya, kami melaksanakan rapat dengan Panwaslu membicarakan proses pleno sehingga dapat berjalan lancar tanpa persoalan berarti. Di pleno tingkat kota, ada dinamika yang terjadi yaitu di pemilih DPPH dan DPTb, tapi boleh terselesaikan dengan baik. Catatan ke depan, untuk mekanisme pleno tingkat kecamatan harus ada pembandingan hasil rekapan. Baik itu pemilihan Provinsi dan pemilihan Kota.

Kota Tomohon boleh mencatatkan prestasi yang membanggakan di tingkat nasional. Yakni mendapatkan peringkat 1 Kota dengan Tingkat Partisipasi Pemilih tertinggi se-Indonesia. Satu hal bagi saya, suksesnya semua tahapan ini yaitu harus disosialisasikan oleh penyelenggara dalam berbagai macam sema dan bentuk kegiatan. Karena sosialisasi juga merupakan suatu bentuk transparansi penyelenggara ke publik atas setiap tahapan yang dilaksanakan.

Semua tahapan penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 ini pun boleh saya lalui. Intinya, fokus, komitmen juang yang tinggi, berintegritas, jujur dan takut akan Tuhan. Akhir kata, saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu Komisioner KPU Tomohon atas kepercayaan emas ini. Dan selalu memberikan motivasi sehingga boleh menjadi penyelenggara Adhoc dalam Pilkada Tahun 2020.

Pak Ketua Ari (Harryanto Lasut) yang penuh kharisma untuk menuntaskan petunjuk yang akan atau belum kami laksanakan. Pak Andre (Jacobus Wowor) yang adalah Korwil Tomohon Utara yang memberikan semangat. Ibu

Vierna Pijoh yang mendamaikan suasana, Pak Roby yang tegas dan terukur dalam setiap petunjuk, Pak Stenly Kowaas yang selalu menghentakkan kami untuk terbangun dan tancap gas dalam setiap petunjuk pelaksanaan tahapan, memberikan solusi dan membuka wawasan kami dalam penyelenggaraan Pemilu. Terima kasih juga kepada keluarga sebagai motivasi, inspirasi serta penyemangat bagi saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan kepada kita semua.

Warna-warni Pilkada di Tomohon Barat

Vanno J. Posumah

Ketua PPK Tomohon Barat

Hingar bingar Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) telah usai, semua elemen masyarakat sedikit demi sedikit mulai berbaur seperti sediakala, setelah beberapa waktu sebagian besar warga terkotak-kotak karena memiliki jagoan masing-masing dalam perhelatan 5 tahun sekali ini. Jalan-jalan dan rumah-rumah yang dulunya dipenuhi dengan atribut -atribut kampanye kini sudah tidak ada lagi. Pemilihan kemarin diakui banyak pihak berjalan dengan baik dan lancar, meskipun harus dilakukan ditengah pandemi.

Hal ini dibuktikan dengan tingkat partisipasi wajib pilih yang cukup tinggi, terlebih khusus di Kota Tomohon. Tentu tak lepas dari usaha dan kerja sama dari seluruh stageholder dalam menyukseskan pemilihan bersejarah ini. Tak ayal berbagai macam rintangan dan tantangan harus dilalui dalam proses penyelenggara pemilu, dalam mempersiapkan ajang ini.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota banyak indikator atau aspek yang menunjang untuk sukses atau tidaknya suatu penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Keberadaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah salah satu komponen penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah. Dimana tugas dan tanggung jawab dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Sebagai perpanjangan tangan dari KPU Kota Tomohon, yang bertugas membawahi wilayah di tingkat kecamatan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan Tomohon Barat. Dimana Panitia Pemilihan Kecamatan Tomohon Barat ini terbentuk melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tomohon Nomor :81/PP.04.2-Kpt/7173/KOTA/II/2020 yang dikeluarkan pada 29 Februari

2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Utara serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020. Bertepatan di tanggal yang sama, petugas PPK Tomohon Barat dilantik oleh Ketua KPU Kota Tomohon bertempat di Villa Emitta Hotel bersama para PPK dari kecamatan lainnya. Setelah pelantikan, langsung dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) mengenai tugas pokok dan fungsi PPK yang nantinya akan menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan (Pilkada).

Langkah pertama yang wajib dilakukan oleh PPK Tomohon Barat yaitu proses perekrutan PPS yang ada di delapan Kelurahan se-Kecamatan Tomohon Barat. Tahapan pertama dalam perekrutan tersebut, pada 4 Maret 2020 dimulai dengan tes tertulis bagi calon anggota PPS di Tomohon Barat bertempat di SMA Negeri 2 Tomohon. Enam hari berselang, tepatnya tanggal 11 Maret 2020 diadakan tes wawancara oleh kelima komisioner KPU Tomohon bagi para calon anggota PPS bertempat di Kantor KPU Kota Tomohon.

Di tengah jalannya proses perekrutan anggota PPS, tiba-tiba tahapan terhenti. Buah dari pandemi Covid-19 menggugang seantero dunia. Tanpa terkecuali Indonesia yang harus menerima wabah bencana non alam yang mengakibatkan begitu banyak orang terpapar. Melihat situasi dan kondisi yang ada, melalui keputusan KPU RI mengakibatkan beberapa tahapan dalam pelaksanaan Pilkada harus ditunda, guna mengantisipasi penyebarluasan virus Covid-19. Turunannya, KPU Kota Tomohon mengeluarkan Keputusan Nomor : 114/PL.02/7173/KOTA/III/2020 tentang Penundaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon dalam upaya pencegahan terhadap virus yang berasal dari Wuhan ini.

Saat penantian akan kelanjutan pesta demokrasi dalam menentukan kepala daerah serentak, munculah kabar dimana pihak terkait mulai pemerintah, DPR, dan dua lembaga penyelenggara yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPU sendiri, tahapan Pilkada

Dengan adanya kesepakatan Pemerintah, DPR, Bawaslu dan KPU maka tahapan pelaksanaan Pemilihan

Kepala Daerah dilanjutkan kembali pada tanggal 15 Juni 2020 dengan diadakannya Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang ada di Kecamatan Tomohon Barat dengan menggunakan aplikasi *Zoom Meeting* dan boleh berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah, PPK selalu membangun komunikasi yang baik dengan Panwascam Tomohon Barat dan PPS yang ada di wilayah kerja dengan melaksanakan rapat koordinasi guna mendukung suksesnya tahapan Pilkada.

Pasca dilantiknya PPS, mereka langsung diperhadapkan dengan verifikasi faktual syarat dukungan bakal calon perseorangan atas nama Robert P. A. Pelealu, SH, MH dan Franciscus Soekirno, SH, MH yang ikut dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Wota dan Wakil Wali Wota Tomohon meskipun masih diperhadapkan dengan Pandemi Covid-19. Sehingga dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (*Masker, Fase Shiled*, sarung tangan dan handsainitiser) dan mengikuti protokol kesehatan yang ada, PPS menjalankan tugas meskipun harus naik turun rumah memastikan benar atau tidaknya dukungan bakal calon perseorangan. Walaupun diperhadapkan dengan tantangan

yang cukup berat dan tentunya beresiko tinggi, belum lagi adanya penolakan dari masyarakat yang akan diverifikasi faktual oleh PPS karena takut terhadap masalah pandemi Covid-19. Beruntung dua tahapan verifikasi bias berjalan lancar, sehingga pleno di tingkat PPK Tomohon Barat dan KPU Kota Tomohon maka pasangan calon perseorangan dinyatakan memenuhi syarat untuk ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Tomohon.

Memasuki tahapan Pemutahiran Data Pemilih yang dilaksanakan pada 15 Juli-13 Agustus 2020 maka PPK Tomohon Barat membentuk Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP), yang nantinya akan bertugas untuk mencocokkan dan meneliti, istilah dalam tahapan ini Pencocokan dan penelitian(Coklit). Guna mempersiapkan data pemilih yang berkualitas yang akan digunakan dalam pemilihan kepala daerah pada tanggal 9 Desember 2020. Tanda dimulainya Pemutahiran Data Pemilih dengan dilaksanakannya apel akbar bertempat di Amphitheatre Woloan pada 18 Juli 2020, PPDP yang ada di Wilayah Kerja Tomohon Barat. Pasti ada suka duka yang dihadapi oleh PPDP dalam menjalankan tugas, mulai dari penolakan

terhadap PPDP untuk masuk ke rumah pemilih, sampai mengunjungi orang-orang yang sementara isolasi mandiri, bahkan mereka yang terkonfirmasi Covid-19 tidak lepas dari sasaran PPDP, tentunya dengan menggunakan alat pelindung diri.

Rentetan tahapan berlanjut, dengan persoalan yang relatif sama, ketika masuk dalam tahapan perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang hendak bertugas dalam Pemilihan Kepala Daerah di masing-masing TPS. PPK Tomohon Barat dan PPS di masing-masing kelurahan diperhadapkan dengan berbagai masalah yang ada, mulai dari kurangnya peminat karena ada ketakutan dengan pandemi Covid-19, ditambah lagi dengan ketakutan dari calon KPPS untuk mengikuti *rapid test* atau *swab test*. Ini yang menjadi kendala dalam Proses perekrutan calon KPPS. Dan dengan sabar gigih penuh perjuangan dari PPK Tomohon Barat dan teman-teman PPS yang ada maka kami boleh merekrut petugas KPPS yang merupakan ujung tombak dalam Pilkada 2020. Ketika direkrut melalui mekanisme yang ada, ternyata ada saja kendala menghampiri. KPPS yang sudah direkrut ternyata ada calon anggota yang masuk dalam

Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Mau tidak mau PPK Tomohon Barat bersama PPS putar otak untuk mencari pengganti guna memenuhi kuota kebutuhan KPPS, sehingga kami boleh merekrut petugas KPPS yang akan bertugas di 37 TPS pada tanggal 9 Desember 2020.

257 personil KPPS tersebar di 37 TPS yang ada di delapan kelurahan se-Kecamatan Tomohon Barat, maka kami selaku PPK dengan pendampingan langsung Ketua KPU Kota Tomohon bapak Drs. Harianto Y. S. Lasut, MAP secara marathon melaksanakan pembekalan kepada seluruh anggota KPPS. Terlebih mengenai mekanisme pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing kelurahan, karena kegiatan bimbingan teknis(bimtek) tidak dapat dilaksanakan sekaligus mengingat adanya pembatasan jumlah peserta berkaitan dengan protokol kesehatan Covid-19. Dan tidak kala menarik dalam pelaksanaan bimbingan teknis kami pun memberikan materi yang baru dalam pelaksanaan Pilkada di Tahun 2020 selain penerapan protokol kesehatan Covid-19 yaitu penggunaan Aplikasi Sirekap yang nantinya hasil perhitungan suara yang tertuang dalam

formulir C. Plano akan langsung terkirim ke server KPU Republik Indonesia dan masyarakat pun bisa secara langsung mengakses hasil dari sementara, demi untuk mengedepankan transparansi hasil pelaksanaan Pilkada di Tahun 2020.

Mendekati hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 sekira H-3, kami sudah mengarahkan KPPS melalui PPS untuk segera pembuat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dengan mengikuti peraturan yang berlaku, dengan standar ukuran TPS 8 X 10 meter, serta harus memperhatikan penerapan protokol kesehatan dalam proses pemungutan suara. Puji Tuhan, di 37 lokasi TPS yang ditetapkan yang ada diwilayah Kecamatan Tomohon Barat saat ditinjau oleh rekan-rekan Panwascam semuanya dinyatakan memenuhi standar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta siap untuk menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dalam semua proses yang akan dilaksanakan oleh teman-teman KPPS di TPS.

Urusan pembuatan TPS tuntas, berlanjut ke pengecekan logistik dan surat suara yang akan dipakai dalam proses pemungutan suara dalam Pemilihan baik Gubernur

dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Tomohon memanggil seluruh ketua-ketua KPPS di dampingi oleh PPS dan PPK Tomohon Barat melaksanakan proses pengecekan sesuai dengan cek list yang ada mengenai semua logistik yang akan digunakan di TPS. Ini dikandung maksud agar semua logistik yang akan di gunakan di TPS nanti itu benar-benar lengkap dan tidak ada yang terlewatkan baik yang ada di dalam kotak suara dan yang ada di luar kotak suara.

Tepatnya pada tanggal 8 Desember 2020, satu hari sebelum pencoblosan, sekira pukul 11.00, logistik Pilkada didistribusikan oleh KPU Kota Tomohon langsung ke TPS-TPS yang ada di Kecamatan Tomohon Barat, dengan pendampingan dan penjagaan ketat oleh Kepolisian dan TNI. Hujan terus menemani proses distribusi logistik, sehingga muncul kekhawatiran dari Panwascam berpotensi mengakibatkan kerusakan surat suara yang ada di dalam kotak suara akibat basah. Untungnya KPU Republik Indonesia telah merancang sedemikian rupa bahan kotak suara yang digunakan berbahan dupleks atau karton kedap air

sehingga logistik Pilkada yang ada di dalam kotak suara itu terjaga dengan tingkat keamanan yang cukup tinggi.

Proses Pemungutan Suara di TPS pada tanggal 9 Desember 2020 dibuka secara serentak oleh Ketua KPPS masing-masing selanjutnya dilanjutkan dengan Pengambilan Sumpah Janji Anggota KPPS oleh Ketua KPPS. Dalam proses pemungutan suara, KPPS dibantu oleh dua orang Petugas Keamanan yang bertugas di pintu masuk dan pintu keluar. Para pemilih yang datang di TPS membawahi KTP Elektronik dan formulir C Pemberitahuan, serta membawa alat tulis sendiri. Selanjutnya dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19 pemilih harus mencuci tangan, diukur suhu tubuh dengan thermogun, memakai masker, menggunakan sarung tangan plastik, harus menjaga jarak minimal satu meter antar pemilih, ini merupakan perbedaan mencolok yang belum kita hadapi dalam pesta demokrasi sebelumnya. Seluruh petugas KPPS dan Petugas Keamanan dalam menjalankan tugas menggunakan Alat Pelindung Diri berupa masker, penutup wajah, sarung tangan dan menggunakan hand sainitiser. Jika ditemukan pemilih yang suhu tubuh diatas 37.3 derajat celsius, maka pemilih tersebut harus menggunakan bilik

khusus yang sudah disiapkan, petugas yang melayani pun telah siap menggunakan Alat pelindung Diri yang lengkap termasuk Baju Hazmat.

Cara penandaan tinta bagi pemilih yang sudah melaksanakan proses pencoblosan, kali ini tidak dicelup tapi hanya ditetes berkaitan dengan Protap Covid-19. Dalam proses pemungutan suara di masa pandemi covid-19 pemilih yang sementara isolasi mandiri dan yang terkonfirmasi positif Covid-19 pun tak luput dari pelayanan petugas KPPS. Tentunya dengan menggunakan Alat Pelindung Diri Lengkap sehingga memberikan kesan tersendiri yang tak terlupakan, apalagi bagi KPPS yang bertugas dengan menggunakan baju Hazmat dalam pelaksanaan Pilkada special ini.

Penghitungan suara dilaksanakan setelah proses pemungutan suara selesai, mulai dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tomohon di 37 TPS yang ada diwilayah kerja PPK Tomohon Barat. Serta untuk menghindari kerumunan dalam proses Penghitungan Perolehan Suara di TPS karena dalam masa pandemi Covid-19, maka semua TPS menyiarkan secara

langsung lewat akun Facebook dari anggota KPPS supaya dapat disaksikan oleh semua orang tanpa harus hadir secara langsung di lokasi TPS. Ada hal baru dalam proses rekapitulasi dalam pelaksanaan pilkada di tahun 2020, dengan penggunaan aplikasi Sirekap yang belum pernah diterapkan dalam pelaksanaan pemilihan-pemilihan sebelumnya baik Pemilu dan Pilkada. Penerapannya langsung terkoneksi dengan server KPU Republik Indonesia sehingga memudahkan untuk memantau hasil rekapitulasi perolehan suara secara cepat di semua tingkatan pelaksanaan Pilkada. Hasil ini juga dapat diakses oleh masyarakat umum demi transparansi hasil dari pelaksanaan Pilkada di tahun 2020.

Setelah proses rekapitulasi di tingkat TPS selesai dengan diberikannya berita acara dan lampirannya yang tertuang dalam formulir C. 1 Hasil, KPPS menempelkannya di lokasi TPS selama 7 hari maka kotak suara pada hari itu juga dikumpul di BPU Kelurahan Taratara Dua yang merupakan sekretariat PPK Tomohon Barat. Buah dari koordinasi yang intens, juga pendampingan yang optimal berdampak pada minimnya permasalahan pasca proses penghitungan. Komunikasi yang terus terjalin dari PPK dan masing-

masing PPS dapat memuliskan langkah ke tahapan berikutnya.

Dalam tahapan Rekapitulasi Perolehan Hasil tingkat Kecamatan Tomohon Barat yang dilaksanakan pada tanggal 12-13 Desember 2020 bertempat di BPU Kelurahan Taratara Dua dihadiri oleh PPK Tomohon Barat, Panwascam Tomohon Barat, para saksi Pasangan Calon baik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Utara dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon dengan penerapan Protokol Kesehatan Covid-19. Meskipun tanpa dihadiri perwakilan saksi dari salah satu kontestan baik Pilgub dan Pilwako, proses Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat PPK Tomohon Barat dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Demokrasi di Tengah Pandemi

Meylani Sorongan

Ketua PPK Tomohon Tengah

Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 merupakan agenda rutin pelaksanaan demokrasi dalam regenerasi kepemimpinan daerah. Pelaksanaannya dilakukan secara berkesinambungan setiap lima tahun sekali. Kegiatan ini penting dilakukan untuk mempertahankan nilai dari demokrasi sesuai dengan konstitusi yang ada.

Adanya bencana non alam pandemi Covid-19 memberikan dampak cukup besar dalam pelaksanaan demokrasi. Hal ini membuat penegakan demokrasi menjadi dilema dan penuh tantangan.

Masalah kesehatan hingga pelaksanaan demokrasi menjadi dua hal penting yang harus diperhatikan. Di mana tujuannya adalah untuk kepentingan rakyat. Pilkada serentak tahun 2020 yang dilaksanakan ditengah merebaknya pandemi Covid-19 adalah pertama dalam sejarah berdemokrasi. Tidak

seperti situasi sebelumnya, di mana pelaksanaan pesta demokrasi dilakukan dalam kondisi normal. Namun sekarang diperhadapkan dengan situasi yang jauh berbeda dari sebelumnya.

Tantangan pun semakin besar sehingga membuat proses ini tidak mudah untuk dilalui. Adaptasi di era new normal harus dilakukan dalam menjalankan proses pemilihan. Penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan, karena harus memperhatikan keselamatan bersama. Yang paling merasakan dampak dari situasi ini adalah penyelenggara Pemilu. Tidak hanya memastikan semua proses berjalan sesuai dengan aturan yang ada, pelaksanaannya juga harus dilakukan sesuai protokol kesehatan sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19.

Sebagai pelaksana teknis pemilihan, KPU bersama jajaran mulai dari PPK, PPS, hingga KPPS turut merasakan betapa sulitnya menjalankan tugas ini. Karena dalam melaksanakan tugas penyelenggara Pemilu yang paling sering berhadapan dengan masyarakat.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kekhawatiran selalu ada, karena berpikir akan risiko yang dihadapi terlalu besar apalagi menyangkut keselamatan diri dan banyak orang. Ini juga yang mempengaruhi proses perekrutan penyelenggara Adhoc lainnya begitu sulit dilakukan. Banyak hal yang dialami penyelenggara Pemilu ketika melaksanakan tahapan Pilkada. Proses faktualisasi dukungan dan data pemilih yang sangat rentan dengan risiko terpapar virus Corona mewarnai perjalanan tahapan ini. Baik dari pihak penyelenggara maupun pemilih yang dikunjungi.

Tidak sedikit pemilih yang menolak untuk didatangi petugas. Namun KPU tetap memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa semua penyelenggara Pemilu yang bertugas telah melewati proses pemeriksaan. Untuk memastikan bahwa petugas yang turun ke lapangan sudah dijamin terbebas dari paparan virus. Oleh karenanya dalam menjalankan tugas agar tidak membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain, maka penyelenggara Pemilu dibekali dengan APD yang memadai serta memberlakukan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Perjuangan untuk melindungi hak pilih menjadi hal penting dalam menegakkan demokrasi. Karenanya berbagai upaya dilakukan oleh penyelenggara untuk bisa memfasilitasi hak pilih masyarakat. Mulai dari mendatangi langsung pemilih hingga meminta tanggapan masyarakat terhadap apa yang sudah dihasilkan, merupakan bentuk usaha yang dilakukan untuk memperoleh data pemilih yang berkualitas.

Dalam proses menjalankan tugas dan tanggung jawab, integritas menjadi bagian penting yang harus dijaga oleh setiap penyelenggara. Tidak hanya dalam bersosialisasi dengan masyarakat, tapi juga bagaimana sikap kita dalam menggunakan media sosial. Dibutuhkan pengendalian diri untuk bisa bertahan dalam menghadapi arus politik. Begitu kuatnya pengaruh politik dan lingkungan sehingga membawa sebagian penyelenggara Pemilu harus menghentikan perjalanannya karena dinilai tidak bisa menjaga netralitas sebagai penyelenggara Pemilu. Demi mendapatkan Pemilu yang berkualitas maka penegakan aturan harus diberlakukan. Karena jika tidak, akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.

Kepercayaan masyarakat ini begitu penting karena tanpa adanya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tahapan pilkada maka kesuksesan akan sangat sulit untuk diraih. Kegiatan melaksanakan pemungutan suara di TPS menjadi puncak pelayanan bagi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada. Masyarakat diberi kesempatan yang sama untuk menyalurkan hak pilihnya tanpa dibeda-bedakan.

KPU dengan segala komitmen yang ada yakni melayani, berusaha memfasilitasi masyarakat yang telah memiliki hak pilih dan memenuhi syarat untuk memilih. Pelayanan tidak hanya dilakukan di TPS, tetapi pelayanan juga dilakukan terhadap mereka yang memiliki keterbatasan untuk datang ke TPS. Perlakuan khusus diberikan terhadap mereka yang tidak bisa secara langsung memberikan hak pilihnya.

Pelayanan ini langsung dilakukan oleh petugas KPPS setempat dengan mendatangi rumah sakit, serta tempat tinggal pemilih yang sedang melakukan isolasi mandiri karena telah terpapar virus Covid-19. Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Walaupun segala tahapan pemilihan sudah dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan aturan yang ada, selalu saja ada pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk mengganggu proses yang sementara berjalan.

Namun semua itu tidak menyurutkan semangat penyelenggara Pemilu untuk tetap menjalankan semua proses. Dengan tetap berpedoman pada aturan yang ada, maka semua permasalahan bisa hadapi dengan baik. Pelaksanaan Pilkada serentak yang telah dilakukan dengan mengedepankan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien, aksesibilitas, serta kepentingan umum, membawa dampak positif terhadap kualitas penyelenggaraan pilkada tahun 2020 di Kota Tomohon.

Hal ini terlihat jelas pada tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dimana mencapai lebih dari 90%. Dengan adanya perolehan tingkat partisipasi yang tinggi dari masyarakat, menandakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan juga sangat besar. Tidak hanya mengenai proses pemilihan yang

dinilai baik oleh masyarakat, tetapi juga kepercayaan terhadap penyelenggara Pemilu yang bisa dijalankan dengan baik pada semua tahapan.

Pelaksanaan demokrasi ditengah pandemi Covid-19 memberikan banyak pelajaran yang berharga bagi kita. Komitmen yang dibangun oleh penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membawa keberhasilan.

Ini memberikan pemahaman bahwa usaha yang dilakukan bersama dengan penuh komitmen akan membuahkan hasil yang bisa dinikmati bersama. Sekalipun harus menghadapi tantangan yang besar, namun kerjasama dari berbagai pihak akan sangat menentukan keberhasilan. Semoga kesuksesan yang telah diraih pada pelaksanaan Pilkada dapat memberi motivasi kepada kita semua untuk tetap semangat dalam menghadapi berbagai situasi. Khususnya situasi Pandemi Covid-19. Tuhan kiranya menolong kita semua.

Masih Penasaran

Rommy N. Loho

Anggota PPK Tomohon Barat

Hari-hari tanpa tanggal merah memberi rasa penasaran bagi saya untuk bergabung menjadi penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Pameo yang sering terdengar kalau sudah di KPU sudah tidak ada lagi tanggal merah (libur) di kalender, walau benar tapi tidak semuanya. Karena sejak bergabung dengan KPU Kota Tomohon, tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan, membuat hari-hari tanpa tanggal merah itu menjadi suasana liburan setiap saat.

Dalam keluarga, ketika tahu saya akan mendaftar menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tomohon Barat, muncul berbagai ‘teguran’. “Belum kapok kamu?”. Itulah satu kalimat tanya yang dilontarkan istri saya yang seakan menjadi ‘korban’ pertama, setelah seseorang memilih jalur sesak menjadi penyelenggara Pilkada. “Masih penasaran”. Sambil tersenyum kecut, saya meyakinkan istri.

Meski menjadi seorang penyelenggara pemilihan harus benar-benar menghibahkan waktu, pikiran, dan tenaga. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut.

Meyakinkan istri adalah hal wajib bagi saya. Mengingat pada Pemilu tahun 2019, saya masuk dalam skuat PPK Tomohon Barat. Di mana bersama empat teman rasa saudara merasakan betul perjuangan dan tantangan waktu itu. Tidak terhitung lagi berapa agenda pribadi maupun keluarga yang tertunda bahkan batal. Karena harus berhadapan dengan sejumlah tahapan Pemilu.

Setelah melalui sejumlah tahapan seleksi yang ketat, akhirnya pada 29 Februari 2020, KPU Kota Tomohon melantik 25 orang PPK. Tentunya, ada nama saya didaftar penyelenggara yang dilantik tersebut. Selesai dilantik, kami sebagai PPK langsung melaksanakan sejumlah tahapan Pilkada 2020. Mulai dari pembentukan panitia pemungutan suara (PPS), petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), verifikasi surat dukungan terhadap bakal calon perseorangan.

Kemudian pencocokan dan penelitian daftar pemilih yang ditandai dengan Coklit serentak, rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS), pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS, perbaikan DPS, dan pengumuman daftar pemilih tetap (DPT). Selanjutnya, sosialisasi kepada masyarakat luas, masa kampanye yang ditandai kegiatan pengawasan dan pemantauan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU juga PPK, setelah itu masuk masa tenang.

Akhirnya, saat yang dinantikan tiba. Di mana seluruh wajib pilih berbondong-bondong datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan hak suara sesuai pilihan masing-masing. Alangkah indahnya melihat proses demokrasi berjalan sesuai ketentuan yang ada. “Vox Populi Vox Dei, Suara Rakyat Suara Tuhan”. Begitu kata orang-orang. Ditengah semangat menggelora menempuh tahapan Pilkada, masih terbilang awal, dunia dikejutkan dengan pandemi Covid-19. Penularan yang mewabah, menyebabkan tahapan Pilkada harus ditunda selama kurang lebih tiga bulan.

Pilkada yang direncanakan pada 23 September 2020, terpaksa digeser ke 9 Desember 2020. Hal lain tidak kalah

penting yaitu setiap tahapan pelaksanaan Pilkada wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Demi mencegah penyebaran virus corona berbarengan dengan suksesnya penyelenggaraan Pilkada.

Setiap penyelenggara dan stakeholder terkait wajib memakai alat pelindung diri seperti masker dan face shield. Juga harus rutin mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak. Banyak sekali suka dan duka yang dirasakan dalam pelaksanaan tugas sebagai PPK. Termasuk kewajiban menjalani rapid test hingga swab test.

Ketatnya protokol kesehatan yang diberlakukan, dengan maksud supaya penyelenggara Pilkada mampu melaksanakan motto kerja di situasi pandemic Covid-19. Yaitu “Selamat Bekerja dan Bekerjalah dengan Selamat”. Meski begitu, ada satu peristiwa yang tak terlupakan. Ketika hampir seluruh PPK dan PPS se-Kecamatan Tomohon Barat harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Hanya karena menghadiri rapat koordinasi yang turut dihadiri oleh anggota PPS yang terkonfirmasi reaktif saat rapid test.

Tapi situasi itu tidak menyurutkan semangat kami sebagai penyelenggara Adhoc. Justru menjadi pemacu dan pendorong untuk kami lebih giat dan semangat melaksanakan semua tahapan Pilkada di tahun 2020. Setelah melewati semua tahapan di atas, ditambah dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara mulai dari tingkat PPS, PPK, KPU Kota, dan KPU Provinsi, memunculkan rasa bangga. Tak hanya bagi saya tapi juga seluruh penyelenggara Pilkada. Karena dapat mempersembahkan hasil pelaksanaan Pilkada tahun 2020 kepada seluruh masyarakat.

Menunaikan masa kerja sembilan bulan, penyelenggara Adhoc, terdiri dari PPK dan PPS, akhirnya mengakhiri tugas dan tanggung jawab. Tidak ada gading yang retak. Demikian pula dengan faktor kemanusiaan kami. Sehingga dari hati yang paling dalam kami memohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan manusiawi yang terjadi. Namun saya pastikan, penyelenggara tetap mengedepankan asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, mengedepankan kepentingan umum, terbuka, proporsional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibilitas.

“Kami bangga menjadi penyelenggara Pilkada. Kami puas menjadi penyelenggara Pilkada. Kami senang menjadi penyelenggara Pilkada. Kami bagian dari sejarah, dan kami mencatatkannya”.

Saya sempat berkhayal, seandainya honor bulan terakhir sudah masuk rekening tentu akan lebih senang lagi. Lamunan itu buyar seketika oleh bunyi SMS Banking di telepon seluler saya. Ternyata benar honor sudah masuk. Disusul notifikasi terkirimnya pulsa data yang memang dijatahkan KPU bagi penyelenggara Adhoc setiap bulan.

“Hmmm...enaknya jadi penyelenggara”. Sesaat bergumam, tiba-tiba keheningan itu pecah oleh celetukan istri tercinta di sampingku. “Berikut masih mau mendaftar lagi?” tanya istri yang segera kusambut dengan antusias. “Masih penasaran” jawabku sambil tersenyum manis. Di luar dugaanku dia membalas dengan senyuman yang lebih manis lagi. Mungkin karena dia sempat melirik handphone yang kugenggam tadi.

Pahlawan Demokrasi

Erny Jacob

Anggota PPK Tomohon Tengah

Bermodalkan semangat untuk mengambil bagian dalam upaya meningkatkan demokrasi, saya mendaftar sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) 2020, dalam hal ini sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tomohon Tengah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tomohon membuka pendaftaran pada Januari 2020. Ini kali kedua saya mengikuti proses rekrutmen calon anggota PPK. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini syarat dan prosesnya cukup ketat.

Salah satu tahapan yang harus kami lalui para pendaftar adalah mengikuti tes tertulis berbasis komputer atau *Computer Based Test (CBT)*. Saya dapat mengikuti proses ini secara baik, dan menempati nomor urut tiga. Lalu tahapan berikutnya adalah wawancara.

Kami yang ditetapkan sebagai anggota PPK atau panitia *Adhoc*, yang secara keseluruhan se-Kota Tomohon berjumlah 25 orang, kemudian mengikuti pelantikan pada 29 Februari 2020. Saat pelantikan, media ramai memberitakan tentang virus Corona yang sementara menyerang beberapa negara. Setelahnya, kami PPK Tomohon Tengah segera memulai kerja penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Yaitu untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.

Sesuai tahapan yang direncanakan oleh KPU, pemungutan suara Pilkada akan dilaksanakan pada tanggal 23 September. Dengan demikian, kami anggota PPK harus bergegas menjalankan tugas mengikuti tahapan yang ditetapkan. Tapi, pandemi Covid-19 mengubah semuanya. Tanggal 2 Maret, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengumumkan kasus pertama dan kedua, atau pasien 01 dan 02 Covid-19 di Indonesia ditemukan di Jakarta.

Segera publik Indonesia menjadi panik. Betapa tidak, pandemi Covid-19 yang bermula dari Wuhan, China bulan

Desember 2019, telah menyebabkan jatuhnya puluhan ribu korban sakit dan meninggal di banyak negara. Politik dan ekonomi negara-negara menjadi kacau. Ternyata, penyebaran virus corona tidak berhenti di Jakarta. Hanya beberapa hari kemudian pemerintah mengumumkan pasien 03, 04, dan seterusnya di beberapa daerah. Pandemi Covid-19 lalu benar-benar mempengaruhi dan mengubah banyak hal, termasuk pelaksanaan Pilkada.

Tanggal 14 Maret, atau dua minggu setelah diumumkannya pasien 01 dan 02 Covid-19 nasional, pemerintah provinsi mengumumkan kasus 01 di Sulut. Menyusul diumumkan lagi pasien 02, 03, dan seterusnya. Ini berarti, pandemi Covid-19 sedang menyerang masyarakat Sulut. Gara-gara pandemi, KPU dan Bawaslu kemudian mengevaluasi lagi pentahapan dan pelaksanaan pemungutan suara yang mulanya direncanakan tanggal 23 September. Sambil menunggu kepastian revisi pentahapan, kami panitia Adhoc, pada Bulan April dinonaktifkan sementara dari tugas-tugas penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan.

Konsekuensinya, untuk beberapa bulan lamanya kami tidak menerima honor. Kami anggota PPK yang penuh semangat menyukseskan pesta demokrasi, tentunya harus mengikuti jadwal pentahapan dan arahan dari KPU Kota dan Provinsi. PPK akhirnya diaktifkan kembali pada pertengahan Juni, setelah diputuskan tanggal pemungutan suara Pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Jadilah, kerja-kerja penyelenggaraan Pilkada di semua tingkatan dilaksanakan dalam bayang-bayang terpapar virus corona.

Bagi saya, ini sesuatu yang sulit. Pandemi begitu menyesak dada. Siapa saja pasti mengalami kekhawatiran dan ketakutan terpapar virus corona. Sementara orang-orang pada umumnya diharuskan mengerjakan semua dari rumah. Yaitu bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, belajar dari rumah. Tami anggota PPK justru harus berada di luar rumah untuk memastikan semua hal demi suksesnya pesta demokrasi ini.

Kasus Covid-19 secara global, nasional dan lokal terus bertambah. Tapi, tahapan Pilkada harus terus berjalan. Tidak ada modal lain yang memotivasi dan mendorong saya

untuk terus bekerja sebagai anggota PPK, kecuali komitmen. Secara teknis bekerja dalam masa pandemi, kami mesti mengikuti protokol kesehatan yaitu memakai masker, rajin mencuci tangan dan selalu berusaha jaga jarak. Bimbingan Teknis (Bimtek) yang mesti dilaksanakan secara virtual atau dalam jaringan (daring) adalah hal yang baru. Tapi demi kualitas kerja yang memadai, mau tidak mau cara baru ini harus dilaksanakan. Sementara untuk kerja-kerja teknis lainnya sebagai anggota PPK yang membidangi divisi hukum, yaitu menangani pelanggaran kode etik di tingkat PPK, Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan kesekretariatan, saya harus menantang risiko terpapar virus corona. Sebab tidak semua tugas-tugas teknis ini dapat dilakukan secara daring.

Mendapat kepercayaan menangani masalah kode etik penyelenggaraan Pilkada adalah suatu kebanggaan tersendiri. Tapi, sesungguhnya ini tugas yang sangat berat. Terutama ketika menemukan indikasi adanya pelanggaran, baik temuan maupun laporan masyarakat.

Dilema. Kata ini menjadi satu ungkapan yang pas untuk hal yang berat itu. Sebab, orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran kode etik adalah ‘teman-teman kerja’. Ketika hendak melakukan upaya pembuktian atas dugaan tersebut, tentu saya harus berhadapan langsung dengan oknum-oknum yang adalah teman-teman tersebut.

Ada sebuah kasus. Seorang anggota PPS dilaporkan oleh masyarakat, bahwa yang bersangkutan diduga memiliki hubungan dengan salah satu pasangan calon (Paslon). Buktinya adalah berupa foto *screenshot* media sosial (Facebook) yang menunjukkan si bersangkutan foto bersama dengan Paslon tersebut. Hal itu mengindikasikan adanya pelanggaran kode etik yaitu netralitas sebagai penyelenggara Pemilu (Kode Etik, pasal 2, poin b).

Saya sebagai anggota PPK Divisi Hukum lalu melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan untuk mengklarifikasi laporan tersebut. Terdapat beban moral untuk melakukan tugas ini, sebab yang bersangkutan adalah bagian dari kerja bersama penyelenggaraan Pilkada. Namun, atas nama demokrasi tugas harus dijalankan. Namun, sebelum

kasus ini diproses, yang bersangkutan telah terlebih dahulu dengan niat baiknya menyatakan pengunduran diri.

Pelaksanaan Pilkada di masa pandemi ini, terutama di wilayah kerja saya, Tomohon Tengah penuh dinamika. Banyak laporan dari masyarakat yang kami terima terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh panitia Adhoc lainnya. Satu hal yang saya refleksikan dengan hal ini adalah bahwa untuk mewujudkan suatu Pilkada yang berkualitas dibutuhkan peran, pengetahuan dan komitmen dari pihak penyelenggara di garda terdepan secara sungguh-sungguh. Kemudian dukungan dan pengawasan masyarakat. Dan hal yang sangat penting pula adalah kedewasaan berpolitik para peserta Pilkada.

Tibalah hari H pemungutan suara pada tanggal 9 Desember. Sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) di Kelurahan Kolongan, saya harus memastikan penyelenggaraan Pilkada di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) berjalan sesuai dengan mekanisme.

Proses pemungutan suara di semua TPS berjalan baik. Tapi di TPS 4 dan 6 yang berlokasi dekat Rumah Sakit Gunung Maria mesti diberi perhatian khusus karena menerima Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), terutama pasien dari rumah sakit tersebut. Tepat pukul 13.00 Wita, saya mendampingi KPPS TPS 4 dan 6, setelah berkoordinasi dengan Pengawas TPS (PTPS) dari Bawaslu Kota Tomohon, beserta para saksi paslon dan 2 petugas Polisi. Kami melakukan pelayanan pemungutan suara di rumah sakit.

Ada hal yang membuat kami menjadi tegang. Seorang wajib pilih di rumah sakit itu sedang dalam status isolasi. Kami yang berada di situ sangat khawatir, takut berinteraksi dengan yang bersangkutan. Kami pun bersepakat, bahwa yang akan melayani pasien tersebut adalah KPPS. Dengan memakai pakaian *hazmat*, si KPPS tersebut menjalankan tugasnya. Setelah menjalankan tugas, anggota KPPS tersebut keluar ruangan isolasi dengan terlebih dahulu disemprot disinfektan oleh petugas rumah sakit. Kami semua menyambut dia terharu dan bangga atas keberaniannya menantang risiko terpapar virus corona demi menjalankan

tugas. Seorang anggota polisi spontan berkata, “Kita mo catat ngana pe nama.” Saya yang mendengar perkataan si polisi tersebut, berpikir mungkin maksudnya adalah suatu kebanggaan karena keberaniannya. Dialah pahlawan demokrasi sesungguhnya!

Ya, ‘pahlawan demokrasi’. Tugas telah diterima dengan komitmen dan dedikasi tinggi. Tidak mudah bagi siapa saja yang menjalankan tugas penyelenggaraan di tengah pandemi. Apalagi harus berhadapan langsung dengan wajib pilih yang berada di ruang isolasi. Semua orang pasti takut melakukan itu. Tapi rupanya, pada hal-hal tertentu, ketika tugas memanggil, siapa saja dapat menyatakan keberaniannya menantang risiko. Satu hak suara diselamatkan, dan itu berarti satu harapan besar bagi demokrasi.

Menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pilkada di tingkat kecamatan penuh suka dan duka. Apalagi, Pilkada tahun 2020 dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19. Hal ini sama dengan menjalankan tugas-tugas demi demokrasi dalam bayang-bayang ‘maut’ Covid-19.

Meski mematuhi protokol kesehatan semaksimal mungkin, yaitu memakai masker, rajin mencuci tangan, dan selalu berusaha menjaga jarak, tetap berisiko tertular virus. Buktinya, di banyak daerah yang melaksanakan Pilkada serentak, banyak penyelenggaranya tertular. Ada yang jatuh sakit, ada yang bahkan meninggal. Suatu pengalaman tak akan terlupakan. Demikian halnya dalam menjalankan tugas-tugas kepemiluan. Khusus dari pengalaman saya sebagai anggota PPK yang menangani divisi hukum dan koordinator di wilayah yang dua TPS-nya berada dekat rumah sakit yang harus melayani para pasien sebagai wajib pilih.

Ketika menjalankan tugas pelayanan pemungutan suara di TPS yang melayani wajib pilih yang sedang menjalani perawatan, dan terlebih sedang diisolasi adalah suatu pengalaman luar biasa. Dibutuhkan keberanian, tapi harus bijak dan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Tugas harus dijalankan sebaik mungkin, namun keamanan diri harus terjamin. Inilah kisah suka duka menjadi anggota PPK yang menjalankan tugas-tugas kepemiluan di masa pandemi Covid-19 di tahun 2020.

Tanggung Jawab dan Semangat Tinggi

Steven Kaunang

Anggota PPK Tomohon Timur

Suka dan duka menjadi bagian dari penyelenggara pemilihan kepala daerah di Sulawesi Utara, khususnya di Kota Tomohon. Menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di wilayah Tomohon Timur membawa kebanggaan tersendiri. Apalagi bekerja di situasi pandemi saat ini.

Pengalaman suka menjadi anggota PPK, di antaranya bisa bertemu dengan orang-orang hebat, banyak teman, saudara dan banyak orang yang kita kenal. Dapat juga menambah wawasan, termasuk ilmu pengetahuan di bidang kepemiluan. Sedangkan duka menjadi anggota PPK karena bekerja dalam kondisi pandemi saat ini. Ada rasa takut dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara. Tapi karena adanya rasa tanggung jawab dan semangat yang tinggi sambil menerapkan protokol kesehatan, sehingga dapat melaksanakan seluruh tahap Pilkada.

Ada satu momen di saat seorang Ketua KPPS yang akan dilantik. Ternyata yang bersangkutan mendapat rekomendasi dari Panwascam bahwa Ketua KPPS tersebut harus diganti. Alasannya karena yang bersangkutan punya hubungan keluarga (suami) dengan Panitia Pengawas TPS.

Menjadi PPK, memberi pelajaran bagi saya bahwa menjalankan tanggung jawab harus dengan semaksimal mungkin. Juga menjaga integritas yang tinggi dan bekerja secara kolektif kolegial. Harapan ke depan supaya lebih meningkatkan kinerja setiap penyelenggara Adhoc, PPK, PPS dan KPPS.

Terpatri KPU Melayani

Masye Sumolang

Anggota PPK Tomohon Selatan

Menjadi Penyelenggara Pemilu memberi pengalaman berharga untuk belajar mengelola emosi, lebih bersabar, dan melayani. Menjadi PPK adalah suatu berkat tersendiri. Apalagi bertugas di situasi pandemi, mengajarkan beberapa hal yang tidak akan diperoleh walau dengan jenjang pendidikan paling tinggi. Mungkin itulah kalimat yang menggambarkan sembilan bulan menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020.

Memang menjadi Penyelenggara pemilu bukanlah pengalaman yang pertama. Sejak tahun 2014 dimulai dari KPPS, tahun 2015 dan 2019 menjadi PPS. Dan kali ini memperoleh tantangan untuk menjadi penyelenggara di tingkat kecamatan. Sebenarnya menjadi PPK bukan hanya sekadar ‘naik jabatan’. Tapi lebih dari itu, tugas dan tanggung

jawab dalam lingkup yang lebih luas. Menjadi PPK bukan hanya memerintah PPS, namun bekerja bersama PPS dengan sistem manajerial.

Belajar mengelola emosi dan lebih bersabar. Mengapa demikian? Sebab yang menjadi rekan kerja kita baik itu PPS, PPDP, maupun KPPS berasal dari berbagai latar belakang. Apakah dari segi umur maupun pendidikan. Kalau mengikuti emosi kita, rasanya ingin marah dan melampiaskan kekesalan karena rekan sekerja tidak bekerja sesuai yang diharapkan. Sebab itu, kembali lagi ketika kita berpikir lebih jernih. Karena menyelesaikan masalah dengan emosi, bukannya selesai tapi akan menambah masalah. Kadangkala kita beranggapan tugas yang dikerjakan sudah maksimal. Ternyata bagi orang lain belum selesai. Momen yang seringkali membuat *down*.

Di saat inilah, semboyan ‘KPU Melayani’ mengingatkan lagi sehingga kami tetap semangat bekerja hingga akhir waktu. Muncul kebanggaan tersendiri ketika orang yang kita layani merasa puas. Karena yang dilayani bukanlah para petinggi melainkan masyarakat. Apresiasi

masyarakat berupa sapaan ramah walau hanya dari kendaraan atau tempat umum, membuat kami merasa bangga dan terharu. Itu berarti pelayanan kami sebagai penyelenggara Pemilu memberi kesan baik bagi masyarakat. Berperan sebagai PPK di masa pandemi Covid-19 cukup berkesan. Ketika pemerintah menganjurkan semua tinggal di rumah saja, di satu sisi tugas dan tanggung jawab mengharuskan penyelenggara untuk keluar rumah. Berinteraksi dengan orang banyak yang tidak kita ketahui kondisi kesehatannya. Walau ketika pulang rumah, terbersit kekhawatiran besar dalam pikiran. Mudah-mudahan tidak menjadi *carrier* Covid-19 terhadap anak bahkan orang tua yang tinggal di rumah.

Tahapan demi tahapan Pilkada memberi kesan dan pengalaman tersendiri. Divisi saya adalah Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Tugasnya adalah menyosialisasikan tahapan Pemilu. Meski suatu tantangan dalam masa pandemi, namun bersyukur dapat terlaksana.

Tugas lain dalam divisi ini adalah perekrutan PPS, PPDP, maupun KPPS. Diperhadapkan dengan Data Sipol dan Data Silon serta keterbatasan aktivitas tatap muka, sementara

di satu sisi dikejar dengan waktu tahapan. Terbersit pikiran ingin rasanya ‘menekan’ PPS. Namun pengalaman menjadi PPS di tahun 2019 yang pernah merasa ‘tertekan’ dengan tahapan ini, kembali menyadarkan diri untuk lebih bersabar. Dengan menguatkan niat jangan sampai pengalaman yang penuh emosi terulang. Alhasil, kesabaran berbuah baik sehingga tahapan boleh berjalan sesuai jadwal.

Berperan sebagai PPK, justru mewajibkan kita untuk menguasai lima divisi. Sebab di mata PPS, PPK adalah orang yang lebih tahu dari PPS. Karenanya, seorang PPK harus mampu mengembangkan diri. Bukan hanya terpaku pada divisi yang menjadi tanggung jawabnya. Koordinasi dengan PPS pun wajib dilaksanakan. Apalagi ketika kita diberi tugas dan tanggung jawab sebagai Korwil untuk memegang PPS. Di sini dibutuhkan kemampuan kita supaya boleh me-manage wilayah.

Bahkan tak hanya di wilayah kita. Justru dalam pelaksanaan di lapangan, tak menutup kemungkinan ada PPS yang bukan wilayah kita meminta bantuan, saran, bahkan

pertimbangan. Walau sebenarnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi mengingat perasaan PPK lain yang punya wilayah.

Pada kesempatan ini, saya bersyukur diberi waktu dan kesempatan oleh Tuhan, serta kepercayaan dari KPU. Untuk mengemban tugas mulia ini. Bersyukur boleh mengenal orang-orang yang luar biasa dalam pengalaman tugas negaran mulia ini. Mulai dari kelima komisioner. Begitu juga dengan jajaran sekretariat. Berbagi pengalaman bersama bahkan berbagi cerita bersama. Walau dalam tekanan tahapan Pemilu yang begitu singkat. Berburu waktu dengan tetap memperhatikan kualitas yang dihasilkan dari setiap tahapan. Bersyukur pula boleh bekerjasama dengan keempat sahabat PPK. Karena kami berlima bukan sekadar teman. Tapi sahabat rasa saudara.

Salah satunya, dengan keberagaman yang ada harus merumuskan suatu relasi yang selaras. Bagaimana mengomunikasikan beberapa kesalahpahaman. Bagaimana harus lebih bersabar dan menata hari agar lebih bijak dalam melangkah. Tanpa harus saling menyakiti. Hanya dengan tekad menjadi bagian dari KPU Melayani-lah yang

mempersatukan. Namun bukan berarti tidak bisa. Seperti sebuah ungkapan, ‘Majulah tanpa menyingkirkan orang lain, naiklah tinggi tanpa menjatuhkan orang lain, dan berbahagialah tanpa menyakiti orang lain’. Bersyukur boleh menjadi rekan sekerja dari teman-teman PPS dari 12 Kelurahan. Menjadi Korwil dari dua kelurahan.

Kebersamaan yang terjalin selama penyelenggaraan Pemilu kali ini, menjadi sesuatu yang tak terlupakan dan tak ternilai harganya. Mengajarkan bagaimana saling menghargai satu sama lain. Walaupun dua hari sebelum menulis catatan kecil ini, sempat merasa kesal sekali dengan teman-teman PPS yang menyepelekan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Meski bukan divisi saya, tapi terpanggil untuk membantu menanganinya. Karena bagi saya, apa yang telah kita terima, harus dipertanggungjawabkan dengan baik dan tepat waktu. Ini bukan hanya masalah uang, tapi bagaimana kita menjaga apa yang sudah dipercayakan kepada kita dengan memberi pertanggungjawaban tepat waktu.

Terima kasih untuk pengalaman yang tak terlupakan dalam pelaksanaan Pemilu. Yang membawa pada motivasi

dan tekad diri untuk terus menjaga integritas diri dalam berbagai keadaan. Karena integritas tak ternilai harganya. Tak mudah menjaga integritas, tapi bersyukur dimampukan menjaganya. Kiranya, tekad KPU Melayani boleh terus jadi bagian dari KPU. Bahkan bagian kami sebagai orang-orang yang pernah ada dalamnya dan menjadi motivasi dalam bidang pekerjaan kami.

Pilkada Saat Covid-19, Partisipasi Pemilih Tinggi

Ronny Osak

Anggota PPK Tomohon Barat

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 jelas berbeda dengan gelaran serupa di tahun sebelumnya. Ajang kali ini, dimana setiap iven lima tahunan harus menjalaninya dengan batasan-batasan ketat. Jangankan para kontestan, hingga penyelenggara pun tak luput dari aturan terlebih dalam rangka pertemuan tatap muka.

Melihat hasil yang ada, seakan menjelaskan keganasan Covid-19 ternyata tidak menyurutkan niat masyarakat Kota Bunga untuk menyalurkan hak pilihnya dalam Pilkada serentak 2020. Peran seluruh pihak patut diapresiasi, terlebih atas kesuksesan yang diraih pantas dialamatkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tomohon sebagai penyelenggara telah melaksanakannya dengan baik. Tidak adanya gugatan menjadi bukti, tetapi juga yang lebih fenomenal adalah meraih tingkat Partisipasi Masyarakat (Parmas) tertinggi kategori Kota se-Indonesia.

Dimana partisipasi masyarakat itu sendiri bisa diartikan sebagai keikutsertaan atau berperan serta dalam satu kegiatan. Berarti di Kota Tomohon masyarakat sangat berperan aktif dalam Pilkada. Angka tingkat partisipasi pemilih di Tomohon bisa terbilang fantastis, 91,89%. Padahal, kota mungil di kaki gunung Lokon ini tengah berjibaku melawan serangan wabah Covid-19 bahkan mengakibatkan Tomohon berada dalam 'zona merah' untuk tingkat penyebarannya.

Mewujudkan partisipasi masyarakat yang tinggi bukanlah sebuah hal yang mudah. Diperlukan upaya yang tentu saja haruslah luar biasa. KPU Kota Tomohon bersama seluruh jajarannya telah berjuang lewat kerja keras untuk meraih hasil terbaik, diantaranya melalui sosialisasi dalam setiap tahapan Pilkada yang masif dan berkesinambungan. Baik secara tatap muka ataupun lewat media sosial.

Konsep ajakan berselewiran di sarana publik hingga dunia maya. Tujuannya menghadirkan Pilkada yang berkualitas, jujur, adil dan terhindar dari penyebaran Covid-19. *Run for Vote*, *Selfie Contest*, Kuis Pilkada, *Meme Challenge*, *Tik tok Challenge* adalah bentuk-bentuk

sosialisasi lewat dunia maya. Seluruh Komisioner KPU Tomohon turun langsung menggandeng tokoh masyarakat dan tokoh agama di seluruh kelurahan se Kota Tomohon, dari Tinoor sampai Lahendong, dari Kumelembuai hingga Taratara untuk mensosialisasikan amannya memilih di TPS pada 9 Desember 2020. Bahkan secara terstruktur penyelenggara *Adhoc* gencar memaksimalkan segala lini yang diyakini mampu menjangkau banyak masyarakat, antara lain dalam rumah-rumah ibadah yang ada di Kota Religius.

Lewat sosialisasi yang terus-menerus maka informasi yang baik dan benar tentang tahapan Pilkada tersampaikan kepada masyarakat, serta terbangun prinsip keterbukaan dalam seluruh tahapan. Secara khusus juga bagaimana pada saat pencoblosan nanti dilaksanakan dengan protap kesehatan yang ketat sehingga menjamin keamanan dan keselamatan dari pemilih dan juga penyelenggara.

Tidak dipungkiri dalam seluruh tahapan Pilkada ada tantangan dan problematika yang ditemui, tetapi juga bisa diatasi diantaranya tahapan pemutahiran data Pemilih oleh Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP). Dimana terdapat pemilih yang tidak mau didatangi untuk didata karena takut

terjangkit Covid-19, ada yang *ba mento'* (istilah bagi orang Tomohon yang memilih tinggal di kebun), serta ada pemilih yang menjalani masa isolasi ataupun terkonfirmasi positif Covid-19.

Intens melakukan koordinasi, KPU Kota Tomohon dengan Dinas Kesehatan Kota Tomohon sehingga keluarlah Surat Keterangan Sehat dari Fasilitas Kesehatan (Faskes) bagi para PPDP sehingga ada legitimasi kesehatan dalam menjalankan tugas sehingga bisa diterima oleh para pemilih. Memicu motivasi dan semangat yang tinggi bagi PPDP sehingga boleh menjangkau pemilih-pemilih yang *ba mento'* dan dengan berani mengunjungi pemilih yang terdampak Covid-19.

Salah satu kendala yang muncul diantaranya kesulitan mencari calon penyelenggara *Adhoc* yang akan direkrut. Alasannya beragam seperti keengganan untuk mengikuti rapid test ataupun swab test sebagai salah satu persyaratan. Kolaborasi berjenjang PPK mencari calon PPS, PPS mencari calon PPDP dan KPPS benar-benar berperan sangat aktif, bahkan menyasar kaum milenial ataupun para mahasiswa untuk terlibat dalam Pilkada Kota Tomohon baik sebagai

PPS, PPDP dan KPPS. Alhasil di Kecamatan Tomohon Barat bahwa penyelenggara Adhoc didominasi usia 20-35 tahun yang masih sangat produktif mengawal jalannya pesta demokrasi.

Perlu dimaklumi sebagai manusia, masih memiliki kelengahan individu, yang berdampak pada kerugian pribadi. Seperti halnya dalam tahapan-tahapan yang dilalui tidak sedikit penyelenggara *Adhoc* yang diberhentikan karena terkait dengan pelanggaran kode etik. Tetapi hal ini secara tidak langsung mengakibatkan pandangan masyarakat akan menunjukkan ketegasan dalam kepastian hukum dan independensi penyelenggara pemilihan itu sendiri, sehingga kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara tetap tinggi.

Selain sosialisasi dan kepastian hukum serta independensi penyelenggara pemilihan, faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yang tinggi yaitu didapati masyarakat kota Tomohon secara aktif berpolitik. Bisa ditemui di tempat-tempat nongkrong, warung dan acara sosial kemasyarakatan pembicaraan dengan topik politik yang tengah hangat dibicarakan. “*Paslon nomor 2, so dorang yang komplit, baku cocok*”, “*Paslon nomor 1, muda deng*”

pinter”, “*Blum tantu deng Paslon no. 3, biar babadiam mar dorang so ada pendukung yang jelas*”. Kalimat-kalimat ini yang bisa kita dengar dari diskusi di kalangan masyarakat pemilih, yang imbasnya adalah mendorong masing-masing individu pemilih untuk menyatakan dukungannya lewat menyalurkan hak pilih di TPS.

‘Bekerjalah dengan baik agar kamu juga akan dipertemukan dengan hasil yang baik pula’ ungkapan ini sejalan dengan apa yang ditorehkan oleh keluarga besar KPU Kota Tomohon dalam Pilkada Tahun 2020. Partisipasi Masyarakat 91,89% adalah angka yang menempatkan Kota Tomohon sebagai kota dengan Partisipasi Masyarakat tertinggi se-Indonesia. Hasil ini pastinya menjadi tantangan bagi keluarga besar KPU Kota Tomohon dalam penyelenggaraan Pilkada berikutnya.

Slogan “*Meimo Kita Meleng*” adalah pilihan kalimat ajakan sebagai pendekatan kepada masyarakat Kota Tomohon yang berkultur budaya Tombulu. Sehingga gaung Pilkada Kota Tomohon menjangkau seluruh lapisan masyarakat, menembus keberagaman yang ada di Kota Tomohon. Walaupun di tengah Pandemi Covid-19, tidak

menyurutkan antusiasme masyarakat untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada, sehingga pencapaian yang baik ini adalah milik kita bersama.

Kuncinya, kita semua KPU, PPK, PPS, PPDP dan KPPS, kita tidak bekerja sendiri, kita semua adalah satu kesatuan. Mari berkolaborasi untuk Kota Tomohon yang semakin baik.

Dinamika Penyelenggara, Saat Hangatnya Corona

Meidy Roring

Anggota PPK Tomohon Timur

Sedikit memang yang berminat untuk menjadi penyelenggara Pemilihan Umum. Mulai dari minimnya minat masyarakat untuk memahami alur proses terkait pemilihan, masih lebih menginginkan sebagai 'pelaku' dalam pentas demokrasi, hingga cerita pilu akan kejadian Pemilu 2019 silam. Terlebih saat ini, berlangsung di tengah situasi mewabahnya virus Corona. Namun, tidak sedikit pula yang berkeinginan ambil bagian selaku pelaksana. Anggapannya sederhana, karena dengan menjadi penyelenggara Pemilu kita sudah mengabdikan diri kita untuk negara tercinta termasuk daerah tempat tinggal, apalagi menjadi penyelenggara Pemilu di tengah situasi pandemi. Atas dasar keinginan itulah memperkuat diri saya untuk mendaftarkan diri sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Langkah pasti memberikan keyakinan bahwa diri saya bisa ikut seleksi. Semangat yang kuat, integritas tinggi, dibekali dengan

pembekalan diri terkait penyelenggaraan Pemilu sebagai modal. Setelah melalui proses, akhirnya bisa masuk sebagai anggota PPK. Tugas pertama setelah menerima bimbingan dari para mentor, yaitu merekrut anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai penyelenggara di tingkat kelurahan. Bagian ini mulai menjadi tugas yang harus dilaksanakan dengan berbagai tantangan, karena begitu banyak yang enggan lagi menjadi penyelenggara karena diperhadapkan dengan situasi Pemilu sebelumnya.

Mengingat sudah merupakan tugas yang harus dijalankan, proses perekrutan dimulai. Diawali dengan pendaftaran, calon anggota PPS, berlanjut ke tes Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), kemudian diadakan tes tertulis bagi para calon PPS yang sudah mendaftar. Mereka yang lulus tes tertulis sebanyak lima orang berlanjut ke tahapan wawancara oleh para Komisioner KPU Tomohon. Tahapan selanjutnya para calon PPS ditetapkan sebagai anggota PPS melalui surat keputusan.

Saat semangat bertugas mulai menanjak naik, ditambah tugas pertama merekrut PPS mendekati klimaks, harus berhadapan dengan situasi pandemi Covid-19 yang

mengguncang dunia. Sebagai anggota PPK yang sudah dilantik harus menerima konsekuensi siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai amanat undang-undang. Dan tentunya menjalankannya sesuai dengan sumpah janji yang telah diucapkan.

Bencana datang, dampak virus asal Wuhan ini mengakibatkan begitu banyak korban terpapar dan meninggal. Imbasnya tahapan Pilkada serentak 2020 resmi ditunda. Kegagalan mulai muncul, ketika belum adanya titik terang terkait berlangsungnya Pilkada, ditambah lagi dengan memikirkan nasib rekan-rekan PPS yang belum dilantik, bagaikan cobaan awal dalam menjalani tugas sebagai pejuang demokrasi. Seiring berjalannya waktu, akhirnya cahaya mulai nampak, semakin jelas pancarannya ketika dikeluarkan keputusan KPU mengenai Pilkada lanjutan di tengah Pandemi Covid-19. Perlahan semangat yang sempat pudar mulai tumbuh kembali, begitu disahkannya terkait tahapan Pilkada serentak lanjutan di tengah wabah bencana non alam. Tugas pertama merekrut PPS mulus, langkah berikutnya para PPS yang terpilih akan membentuk Petugas Pemutakhiran

Data Pemilih(PPDP) yang menjalankan tugas pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

Mengingat tugas para PPDP tidak mudah, terlebih dalam situasi pandemi. Selain persyaratan yang menjadi momok bagi banyak calon petugas baik itu batas usia, pengecekan Silon dan Sipol hingga pemeriksaan kesehatan. Juga bagaimana mereka memiliki tanggung jawab besar bagi keselamatan hak pilih masyarakat. *Rapid test*, seakan menjadi tembok penghalang semangat kami. Bagaimana tidak, banyak peserta yang terjaring sulit untuk mengikuti persyaratan wajib ini, bukan soal takut akan jarum yang hendak menusuk ke nadi, tetapi bagaimana nantinya apabila hasilnya di luar harapan. Mau tidak mau, suka tidak suka setiap calon PPDP wajib ikut *rapid test*. Mengingat tugas mereka lumayan berat, harus *door-to-door* naik turun rumah, guna menyelamatkan hak warga yang masuk wajib pilih. Tantangan dan permasalahan harus dihadapi, setelah proses pemasukan berkas dan cek Sipol, dengan segala upaya dari PPS akhirnya bisa merekrut PPDP. Setelah Surat Keputusan diterbitkan dilakukan mereka yang lulus seleksi akhirnya disahkan lewat proses pelantikan PPDP.

Medio Juli 2020, tahapan Coklit mulai berjalan, para PPDP menjalankan tugasnya dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Tahapan demi tahapan dijalankan dalam proses menuju Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wali Kota Tomohon serentak lanjutan Tahun 2020 ditengah Pandemi Covid-19. Kini tiba saatnya kami selaku divisi Sumber Daya Manusia(SDM) untuk mengawal perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara(KPPS) dan petugas pengamanan TPS yang dilakukan oleh PPS. Lagi seakan tantangan ingin selalu bermesraan dengan kerja keras kami, dimana kami begitu sulitnya mencari dan menemukan masyarakat yang ingin menjadi penyelenggara Pemilu yang akan bertugas pada Rabu 9 Desember 2020. Minimnya antusiasme calon, berimbas kuota calon KPPS tidak terpenuhi. PPS harus kerja ekstra keras, dengan berbagai cara baik *door-to-door*, menghubungi lewat sambungan telepon hingga memanfaatkan media sosial, guna merekrut calon KPPS.

Semakin kental kerja sama tim berjenjang dilakukan, para pejuang tim penyelenggara PPS dengan pengawalan PPK mencari calon KPPS dan Pam TPS. Di tengah

ketidakberdayaan dan putus asa mulai menghampiri PPS mencari lagi calon anggota KPPS, dengan nafas yang sama menghasilkan kolaborasi apik dari PPK dan PPS untuk menemukan orang yang tepat dan memenuhi syarat. Lagi, separuh rintangan pembentukan KPPS terlewati. Kembali *rapid test* yang seakan menjadi momok kembali berulah, saat mengetahui ada calon KPPS yang hasilnya reaktif, dan dilanjutkan dengan *Swab test*, ada pula yang positif terpapar covid-19. Ketika hendak diganti, para calon tidak mau mengundurkan diri sehingga harus menunggu hasil swab lagi. Akhirnya, hasil yang ditunggu keluar dan menyatakan *swab test* negatif.

Detik-detik disaat tahapan Pemilihan ini berlangsung, terdengar kabar ada anggota KPPS yang tidak tahan uji akan netralitasnya sehingga berbuah pergantian karena masalah kode etik. PPS kembali harus mencari KPPS baru guna mengisi kekosongan anggota yang terkena masalah tersebut. Proses pencarian berjalan kembali di saat mulai ada rekan-rekan yang mengeluh dan berputus asa karena jenuh dengan permasalahan yang dialami. Seakan menggenapi usaha tidak pernah mengkhianati hasil, kekosongan KPPS bisa teratasi.

Dinamika situasi ini pastinya tidak akan terlupakan, menjadi catatan sejarah dalam penyelenggaraan Pemilu. Tapi dibalik semua kisah yang dijalani suka dan duka silih berganti tetapi selalu semangat berusaha melakukan yang terbaik untuk memilih para pemimpin daerah di tengah situasi Covid-19 ini. Menjadi bagian dalam skuad divisi SDM dan Parmas merupakan pengalaman berharga, apalagi menjalankan tugas di bawah komando Stenly Kowaas sebagai komisioner yang membidangi divisi ini. Ide kreatif dituangkan ke berbagai iven menarik, guna mengajak masyarakat berpartisipasi menyukseskan Pilkada. Semisal Lomba *Tik-tok Challenge*, *Run for Vote*, *Meme Challenge* hingga kuis berhadiah. Tujuannya menysasar para pemilih pemula untuk bisa menerima pesan *'meimo kita meleng'*.

Tentunya dengan tidak mengesampingkan cara konvensional dalam memaksimalkan tahapan sosialisasi. Turun ke tiap kelurahan, menggunakan pengeras suara, kerja sama dengan pemuka agama sehingga bisa menjangkau para umat dan jemaat, menggandeng tokoh masyarakat hingga perwakilan perempuan dan milenial, tentu dengan penerapan protokol kesehatan ketat(menggunakan masker, mencuci

tangan dan jaga jarak). Sehubungan dengan situasi pandemi, pertemuan tatap muka dibatasi. Sarana baru dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digencarkan sosialisasi dalam jaringan(daring).

Selain mempersiapkan kelancaran rentetan proses pemilihan, divisi SDM dan Parmas juga berperan aktif pada masa kampanye. Dimana PPK dan PPS ditugaskan untuk melakukan monitoring kegiatan kampanye terbuka yang dilaksanakan oleh para pasangan calon. Dimana harus mematuhi aturan dengan memperhatikan protokol kesehatan masa pandemi Covid-19.

Kini tiba pada tahapan pemungutan suara, Rabu 9 Desember 2020. Segala bentuk kerja keras dari pejuang-pejuang demokrasi ini terbayarkan dengan suksesnya Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Serentak Lanjutan Tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19.

Akhirnya dengan dengan mengucapkan syukur dan terima kasih kepada KPU Kota Tomohon, yang sudah mempercayakan saya menjadi anggota PPK yang



membidangi divisi SDM dan Parmas. Merupakan suatu kebanggaan bisa menjadi bagian dari keluarga KPU Kota Tomohon menorehkan tinta emas sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020. Terima Kasih KPU Kota Tomohon, salam sehat selalu.

Pengalaman Berharga

Margaretha Teteregoh

Anggota PPK Tomohon Selatan

Jauh dari apa yang dibayangkan, setelah berhasil lolos dalam seleksi dan masuk sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), diberi tugas menjadi bagian dalam divisi teknis. Awalnya terlihat mudah, namun ketika proses berjalan ternyata sering menimbulkan ketegangan terutama ketika secara mendadak harus merespons panggilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tomohon dan harus menyediakan data dan informasi secara lengkap dan ter-update. Selalu siap kapan saja ketika diperlukan, padahal secara pribadi masih memiliki tugas lain baik sebagai ibu rumah tangga maupun tugas lainnya yang tidak mungkin ditinggalkan. Bertugas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 sudah merupakan komitmen awal antara jiwa nasionalis dan hati yang melayani. Dengan tujuan mulia, ingin berpartisipasi dan mengawal suksesnya pesta demokrasi di Kota Tomohon.

Memang tidak ada pekerjaan yang hanya dilalui tanpa usaha. Kerja keras, semangat tinggi dan sekali-kali memacu

adrenalin pastinya merupakan hal yang lumrah. Dalam konteks kali ini, kala bertugas di divisi teknis harus siap 1x24 jam sebagaimana diisyaratkan oleh pimpinan kami di tingkat Kota. Namun ketegangan mulai sirna ketika semua data dan informasi yang dimintakan dapat disediakan dan sesuai dengan ekspektasi dari komisioner sendiri dan ini menjadi sebuah kepuasan tersendiri yang sulit untuk dibahasakan secara tertulis. Selalu siap 1x24 jam sebagaimana yang telah disyaratkan oleh KPU pada saat telah resmi menjadi bagian dari PPK, menjadi sebuah dinamika tersendiri bagi saya untuk secara bijaksana membagi waktu dengan tugas-tugas lain sebagai Ibu Rumah Tangga, serta tugas-tugas lain yang harus diselesaikan.

Terlepas dari itu, bertugas menjadi bagian dari Divisi Teknis selama proses perjalanan Pilkada 2020 ini ternyata cukup menyenangkan karena banyak hal yang bisa dijadikan pembelajaran bagi saya dalam melaksanakan proses verifikasi faktual dan terutama ketika pada proses pelaksanaan Pilkada itu sendiri.

Pandemi Covid-19 menjadi sebuah kecemasan tersendiri, karena ketika melakukan proses verifikasi faktual, berkoordinasi langsung dengan orang lain secara tatap muka menjadi sebuah kemutlakan yang tak bisa terhindarkan. Pertemuan-pertemuan tatap muka dengan para petugas PPS dan *Liaison Officer* (LO) dari Pasangan Calon Independent harus dilakukan tentunya dengan menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat, meskipun demikian tetap saja kecemasan besar ada mengingat angka penambahan pasien Covid-19 tetap bertambah hingga kini.

Selain kecemasan atas penyebaran Covid-19 ini, kecemasan menghampiri lima hari menjelang pelaksanaan pencoblosan, secara bersama-sama dengan petugas PPS untuk menentukan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga merupakan kendala tersendiri. Tidaklah begitu mudah untuk mendapatkan lokasi TPS yang sesuai dengan aturan Keputusan KPU menyangkut lokasi dan ukuran TPS. Terkadang harus berpindah mencari lokasi yang lain karena meskipun dari pertimbangan lokasi dan ukuran sudah memenuhi syarat, namun karena lokasi itu bersebelahan dengan pendukung partai tertentu maka secara otomatis harus

dicarikan lokasi lain guna menjaga independensi penyelenggara pemilihan.

Namun beberapa kendala juga terjadi dalam proses pelaksanaan di lapangan, salah satu contoh misalnya pemanfaatan aplikasi Sirekap yang dipakai oleh petugas KPPS untuk proses *uploading* dokumen C HASIL mungkin karena persoalan server yang *down* plus persoalan jaringan dan banyak pula para petugas KKPS tidak memiliki gadget Android yang cukup mendukung untuk memanfaatkan aplikasi ini. Kendala serupa juga dialami ketika pelaksanaan Pleno di Tingkat Kecamatan, petugas PPK juga mengalami kesulitan melakukan *uploading* C HASIL dari setiap kelurahan. Atas kendala ini, maka solusi yang dipakai memang kemudian adalah dengan melakukan pengambilan foto secara manual atas setiap dokumen C HASIL dari 54 TPS di Kecamatan Tomohon Selatan.

Terlepas dari semua kendala dan kecemasan yang sudah terjadi dan dialami selama proses Pilkada 2020 ini, bisa dikatakan bahwa secara teknis, momentum Pilkada ini jauh lebih mudah dan lebih singkat pemanfaatannya

mulai dari proses pemungutan hingga penghitungan suara di tingkat TPS dibandingkan dengan proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta para Calon Legislatif sebelumnya yang membutuhkan waktu cukup lama untuk melakukan semua proses tersebut di tingkat TPS.

Pastinya akan menjadi kenangan indah, saat mengetahui Kota Tomohon mencatatkan sejarahnya sebagai Kota dengan tingkat partisipasi masyarakat tertinggi dalam ajang Pilkada 9 Desember 2020. Data yang kami terima, KPU Pusat mencatat bahwa partisipasi pemilih tertinggi dalam pemilihan Walikota dan Walikota Tomohon ini mencapai 91,98%, disusul oleh Tidore Kepulauan sebesar 91,34%, menyusul kemudian Ternate sebesar 83,82%, kemudian Sungai Penuh sebesar 82,815, serta Blitar sebesar 79,2%. Tingkat partisipasi tertinggi ini sungguh berada di luar perkiraan mengingat pandemi Covid-19 masih cukup tinggi di Kota Tomohon yang masih diberlakukan pembatasan-pembatasan di sana sini guna menekan laju pertambahan angka penularan virus ini.

Melayani dengan Hati

Paramita S. Runtu

Anggota PPK Tomohon Barat

Pemilihan serentak 2020 adalah pemilihan yang menuntut seseorang untuk berjuang mempertaruhkan nyawa dalam penyelenggaraannya. Mengapa demikian? Ketika seorang penyelenggara harus bekerja di tengah pandemi Covid-19, tidak mudah baginya untuk melaksanakan tugas, menjamin keselamatan dan kesuksesan jalannya Pilkada. Memang sangat membutuhkan komitmen yang besar untuk melayani dengan hati di tengah pandemi Covid-19. Berikut cerita singkat perjalanan yang saya tempuh sebagai seorang penyelenggara di Pilkada 2020.

Tahapan pertama yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pilkada 2020 yaitu perekrutan penyelenggara badan *Adhoc* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dimana tahapan seleksi dimulai tanggal 15 Januari 2020. Secara pribadi memiliki keinginan yang besar untuk ikut dalam tahapan perekrutan tersebut. Selain mencari

pengalaman hidup, saya juga sangat senang melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat nasionalisme.

Dengan tekad yang bulat, saya memasukkan berkas pendaftaran dan berhasil lolos dalam seleksi administrasi bersama dengan 17 rekan calon PPK yang ada di Kecamatan Tomohon Barat dan 79 rekan yang ada di tingkat kota. Seleksi berlanjut pada 30 Januari 2020, dimana kami harus melalui tahapan tes tertulis. Dari hasil seleksi tertulis berbasis komputer (CBT) diambilah 10 orang dengan nilai tertinggi, saya bisa menempati urutan kesembilan dengan perolehan nilai atau skor 60 dengan range nilai tertingginya 86. Sangat bersyukur tentu, dengan capaian tersebut sayapun bisa melanjutkan diri pada seleksi wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2020. Gugup dan gemetar tat terhindarkan kala mengikuti sesi wawancara, membuat otak seakan berhenti bekerja dan saya pikir itu manusiawi karena saya harus berjuang melawan kesembilan teman yang memiliki latar belakang pengetahuan dan pengalaman yang lebih dari saya. Hanya bisa menyelipkan doa dalam hati, *“Tuhan se kuat akang deng se mampu akang pa kita for iko ini seleksi wawancara”* (Tuhan kuatkan dan mampukan aku

untuk mengikuti seleksi wawancara). Syukur tahapan ini terselesaikan, rasa tenang dan damai setelah keluar dari ruangan tes wawancara dengan harapan bisa lolos sebagai PPK.

Tepat pada 25 Februari 2020 KPU Tomohon mengumumkan hasil seleksi, menetapkan lima orang yang berhasil lolos sebagai PPK di tiap kecamatan yang ada di kota Tomohon, saya berada pada peringkat keenam yang berarti belum beruntung. Kegagalan tidak menyurutkan niat dan keinginan saya untuk menjadi seorang penyelenggara Pilkada ini, tetap semangat dan berjuang untuk ikut dalam perekrutan sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS). Hal mudah yang saya tempuh dalam perekrutan PPS karena mekanisme perekrutannya sama dengan PPK, mulai dari seleksi berkas, seleksi tertulis hingga wawancara. Saya dan dua rekan saya (Silvyaan dan Tika) dinyatakan lolos sebagai PPS di kelurahan Taratara Dua.

Sayang, tahapan Pilkada terhenti karena pandemi Covid-19 yang mendunia, termasuk Indonesia dengan kasus pertama pada tanggal 11 Maret 2020 kemudian menyebar di seluruh pelosok negeri menyebabkan penundaan bagi

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dijadwalkan pada tanggal 23 September 2020. Dengan segala pertimbangan dan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tahapan dilanjutkan kembali dengan mengikuti protokol kesehatan Covid-19. Sehingga pada 15 Juni 2020 KPU Tomohon menyelenggarakan pelantikan 132 orang PPS yang tersebar di 44 kelurahan di Kota Tomohon dengan mengikuti protokol kesehatan Covid-19. Kami mengikuti pelantikan secara daring dari rumah masing-masing, satu hal yang belum terbiasa tetapi pelantikan berjalan dengan lancar dan khidmat. Usai dilantik menandakan kami siap untuk melaksanakan tugas, memulai segala tahapan dengan semangat namun tetap menjaga diri agar tetap sehat dan terhindar dari virus Corona.

Pada 27 Juni 2020 kami mengikuti *rapid test* di Anugerah Hall sebelum kami melaksanakan verifikasi faktual dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon. *Rapid test* ini dilaksanakan karena kami akan turun langsung ke rumah-rumah masyarakat, ini juga untuk meyakinkan masyarakat agar tidak takut menemui PPS saat melaksanakan verifikasi

faktual. Rasa takut dan was-was ketika mengikuti rapid test, berharap hasilnya non-reaktif. Sangat terkejut ketika hasilnya keluar, salah satu rekan PPS Taratara Dua ada yang reaktif, sehingga harus menjalani isolasi mandiri di rumah selama 14 hari, otomatis verifikasi faktual hanya dilakukan oleh kami berdua (saya dan Silvyaan). Sebelum turun ke rumah-rumah masyarakat kami dibekali dengan alat pelindung diri (APD) yang lengkap mulai dari topi, *face shield*, masker, sarung tangan sekali pakai, *hand sanitizer*, dan tentunya protokol kesehatan yang wajib dijalankan. Menurut saya ini adalah pekerjaan yang sangat luar biasa ketika kami harus mempertaruhkan diri bekerja di tengah pandemi Covid-19 yang sangat beresiko terpapar virus corona. Namun hati dan iman saya terus menguatkan untuk melakukannya dengan tulus dan sepenuh hati. Karena saya yakin pengorbanan ini akan terus dikenang dan berharap nantinya semua dapat berjalan dengan lancar. Proses verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan atas nama Robert Pelealu dan Fransiskus Soekirno bergulir sepekan, dengan syarat harus mengumpulkan sebanyak 7.097 dukungan. Dimana perolehan awal yang dikantongi paslon ini selisih 2.342 dari syarat

dukungan hasil verifikasi administrasi. Otomatis mereka wajib memenuhi persyaratan yakni dua kali lipat dari selisih yang ada.

Dalam proses verifikasi faktual lanjutan, kami sudah kembali diperkuat teman saya Tika yang telah menyelesaikan masa isolasi mandiri. Beruntung tahapan ini kami tidak turun lagi ke rumah-rumah masyarakat dan hanya menunggu di sekretariat PPS saja. Dari hasil verifikasi faktual lanjutan tersebut RoSe (sebutan lain dari bakal pasangan calon perseorangan) dapat memenuhi syarat dukungan bakal calon perseorangan, sehingga mereka ditetapkan sebagai pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon.

Selesai urusan verifikasi syarat dukungan perseorangan, kembali kami diperhadapkan ladi dengan data. Apalagi kali ini menyangkut hak dari setiap warga negara, yaitu pendataan pemilih. Tahapan pemutakhiran data pemilih pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dilaksanakan pada 15 Juli – 13 Agustus 2020. Kami terus mengevaluasi kerja PPDP dalam melaksanakan coklit sehingga semua daftar pemilih boleh dicoklit sampai pada batas waktu yang ditentukan.

Pekerjaan inipun membutuhkan fokus tingkat tinggi dan semangat yang besar, apalagi bekerja di masa pandemi. Data pemilih hasil coklit PPDP harus kami olah, bertujuan untuk mendapatkan data yang berkualitas dengan mengelompokkan pemilih baik yang sudah memenuhi syarat, pemilih baru dan menghapus penduduk yang tidak memenuhi syarat diantaranya mereka yang sudah meninggal dunia, ditemukan data ganda, di bawah umur, pindah domisili, tidak dikenal, TNI, Polri, hak pilih dicabut, bukan penduduk.

Tahapan demi tahapan dilaksanakan KPU untuk memperoleh data pemilih yang berkualitas mulai dari penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP), rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS), rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), hingga pucuknya penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Tomohon berada diangka 73.633 pemilih. Semua PPS masih harus mensosialisasikan DPT baik di sekretariat maupun di tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat, dan juga mengumumkannya melalui pengeras suara.

Waktu terus berjalan hari pemilihan semakin dekat. Persiapan tahap akhir dimaksimalkan. Mulai dari

pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), lanjut *rapid test* bagi semua penyelenggara, penentuan lokasi TPS, mengadakan bimbingan-bimbingan teknis terkait pelaksanaan pungut hitung, juga konsistensi sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara pemungutan dan penghitungan suara dengan protokol kesehatan Covid-19 serta hal lain yang membuat masyarakat yakin untuk datang ke TPS dan tidak golput.

H-6 sebelum pemilihan, saya dilantik sebagai PPK melalui proses (pergantian antar waktu) menggantikan salah satu anggota yang mengundurkan diri. Rasa senang dan bahagia campur aduk, tetapi ada beban yang harus dipikul bersama dengan keempat rekan PPK yang lainnya (Vano, Ronny, Rommy dan Hengkie) untuk menghadapi hari pemilihan di 9 Desember 2020 yang sudah di depan mata. Satu hari sebelum pemilihan, logistik mulai didistribusikan ke TPS. Bertepatan hari itu cuaca kurang bersahabat, sehingga kami sebagai PPK harus hujan-hujan mengawal pendistribusian logistik. Dengan semangat yang besar kami dapat menyelesaikannya dengan baik tanpa cacat satupun.

Tahapan pencoblosan bergulir, berjalan aman dan damai sehingga proses selebihnya berjalan lancar.

Saya ditugaskan sebagai koordinator wilayah di kelurahan Taratara Dua. Sampai pada rekapitulasi tingkat kecamatan, bersyukur Taratara Dua merupakan kelurahan dengan tingkat kesalahan paling minim. Memang secara pribadi saya lebih menikmati segala proses yang ada dibandingkan dengan hasil, karena bagi saya hanyalah sebuah penghargaan ketika segala hal dilakukan dengan sepenuh hati. Pilkada 2020 benar - benar berbeda dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya. Pelaksanaan tahapan Pilkada yang berbarengan dengan masa pandemi, membutuhkan kepatuhan terhadap prosedur pencegahan Covid-19 yang cukup ketat. Mungkin kami hanyalah segelintir orang “gila” yang berjuang mempertaruhkan diri untuk bangsa dan negara, tetapi kepuasan yang kami nikmati dari hasil kerja keras yaitu melahirkan pemimpin yang akan menentukan masa depan Kota Tomohon dan Indonesia yang semakin maju. Pengalaman yang saya dapatkan akan menjadi pegangan dan pembelajaran ke depan untuk lebih baik lagi.

Genapkan Pengalaman Abdi Demokrasi

Hengkie Kojongian

Anggota PPK Tomohon Barat

Bertugas menjadi penyelenggara pemilihan kelurahan tempat tinggal saya di Woloan Dua sudah sejak tahun 16 tahun silam. Dan saat itu langsung dipercayakan menjadi ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS). Bila dihitung mundur, sejak tahun 2004 baik Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg) saya sudah akrab kerja sebagai PPS. Berbekal pengalaman sebagai penyelenggara di tingkat kelurahan maka ada keinginan untuk menjadi abdi demokrasi sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Awal tahun 2020 perekrutan PPK dalam rangka menghadapi Pilkada serentak dibuka, memantik semangat untuk menjalani tugas dan tantangan yang lebih besar yaitu sebagai PPK.

Ketika melalui seleksi yang dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tomohon lewat tes baik

online maupun wawancara saya berhasil menjadi anggota PPK. Dengan harapan dan doa saya berkeyakinan untuk diberikan kemampuan oleh Tuhan melaksanakan tugas ini.

Berdasarkan kesepakatan dengan ketua dan teman-teman anggota PPK Tomohon Barat lainnya pasca dilantik, maka saya ditugaskan untuk bertanggung jawab di Divisi Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi dan Sumber Daya Manusia. Meskipun telah memiliki rekam jejak selama bertahun-tahun sebagai penyelenggara, bukan berarti memulai tugas ini dengan mudah. Apalagi dalam suasana penyesuaian era baru pasca dihantam Pandemi Covid 19.

Menjajaki pengalaman baru sebagai anggota PPK tentunya banyak tantangan yang saya hadapi. Siap lahir batin sudah pasti, apalagi kali ini berbeda. Dimana sebagai *Adhoc* untuk pertama kalinya menghadapi momentum lima tahunan dalam situasi bencana non alam ini. Dimana untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi maupun bimbingan teknis dari KPU hanya dilaksanakan secara virtual via zoom meeting. Sehingga saya perlu menyesuaikan diri dengan aktif mengikuti setiap ada sosialisasi dalam jaringan (daring).

Tahapan pertama yang dilaksanakan terkait dengan tanggung jawab saya pada divisi Parmas, Sosialisasi dan SDM adalah perekrutan PPS. Dalam tahapan ini kesulitan yang kami jumpai adalah minimnya keinginan masyarakat untuk bergabung untuk menjadi anggota PPS. Apa lagi dengan pengalaman yang pernah bertugas sebagai PPS pada pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2019 silam masih membekas. Mengorbankan waktu dan tenaga namun karena tugas dan tanggung jawab sehingga membuat anggota PPS merasakan kesulitan kelelahan kala itu. Efeknya berpengaruh dalam perekrutan PPS pada Pilkada tahun 2020. Belum lagi persyaratan yang membatasi sehingga sulit merekrut calon PPS.

Semangat tidak boleh kendor, berpegang pada komitmen atas kepercayaan bertugas selaku PPK. Wajib menjalankan misi penting guna merekrut calon anggota PPS, sosialisasi dan pemberian pemahaman lebih intens bagi masyarakat untuk masuk menjadi anggota PPS.

Usaha dan upaya terus dilakukan untuk memuluskan perekrutan anggota PPS. Beruntung tahapan ini boleh

terselesaikan, meskipun sempat ada kerikil kecil yang sempat menghambat. Dimana sebagian calon PPS yang dijaring, ternyata sudah masuk dalam daftar Sistem Pencalonan (Silon), itu karena adanya calon perseorangan untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Tomohon 2020 yang sedang berproses. Cepat menghadirkan solusi, kami harus memutar otak segera mencari alternatif untuk dapat melengkapi kuota.

Lagi – lagi tekad dan tanggung jawab yang menguatkan kami, bak vaksin penyemangat sehingga kami tidak mudah putus asa. Maka tahapan ini pun boleh terlaksana dan untuk delapan kelurahan di Tomohon Barat boleh terpilih anggota PPS yang siap melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pada Pilkada serentak di tengah pandemi.

Kembali lagi, mengingat Pilkada 2020 berlangsung dalam situasi spesial di tengah pandemi, maka petugas di lapangan wajib membekali diri dengan penerapan protokol kesehatan ketat, sekaligus mengikuti tes kesehatan. Sehingga pada saat PPS melaksanakan tugas meskipun harus naik turun rumah melaksanakan berifikasi faktual syarat dukungan

calon perseorangan, pada masa pandemi Covid 19 sehingga tahapan ini boleh terlaksana dengan baik.

Tahapan berikut yang melibatkan divisi saya yakni perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) namun untuk tahapan ini tidak sesulit perekrutan PPS. Hanya saja dalam pelaksanaan tugas sebagai PPDP mengalami kendala karena harus naik turun rumah di masa pandemi untuk mendata pemilih di wilayah kerjanya. Ini menyangkut hak sebagai warga negara, sehingga sangat riskan apabila ada kelengahan. Untuk itu tugas PPK wajib terus memantau dan memberi motivasi sehingga tahapan ini boleh berjalan baik. Para petugas PPDP aman, hak pilih warga masyarakat terselamatkan. Berlanjut tahapan berikut yang melibatkan tugas saya sebagai penanggung jawab divisi Parmas, Sosialisasi dan SDM yaitu perekrutan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Tahapan ini menyita waktu dan tenaga, karena begitu banyak kendala yang dihadapi baik oleh PPS dan sebagai PPK khususnya yang membidangi Parmas, Sosialisasi dan SDM.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pembentukan KPPS pada Pilkada Tahun 2020 sangat sulit karena dibatasi dengan beberapa persyaratan termasuk usia 20 sampai dengan 50 tahun. Ketika dilaksanakan sosialisasi dan dibuka pendaftaran KPPS sangat minim. Asumsi kami, banyak yang enggan bergabung karena ‘trauma’ melihat tugas sebagai KPPS pada Pileg dan Pilpres tahun 2019. Begitu banyak usaha dari PPS dan PPK tapi hasilnya belum maksimal. Apalagi pada masa mendekati hari H pencoblosan, ada regulasi yang mengharuskan anggota KPPS wajib *rapid test* karena akan melaksanakan tugas sebagai garda terdepan di TPS. Motivasi tiada henti dari para komisioner KPU Kota Tomohon dan optimisme kuat sehingga tugas dan tanggung jawab tahapan inipun bisa dilalui.

Coba mencermati setiap proses ini, membuat pribadi semakin ditempa, melalui dinamika yang ada sejak perekrutan. Sangat dibutuhkan kerja ekstra keras dari PPS dan kami sebagai PPK. Setiap tantangan yang telah dilalui, kami jadikan sebagai pengalaman dan pembelajaran. Sebagai persiapan menghadapi proses berikutnya lebih matang. Tidak bisa dipungkiri kala raga mulai merasa lelah, sempat

memunculkan pemikiran -pemikiran negatif. Kekuatan doa berbicara, sehingga kami dimapukan.

Pemantapan terus dilakukan, melalui bimbingan teknis(bimtek) guna memperkuat para ujung tombak di Tempat Pemungutan Suara(TPS). Terbukti ampuh, nyatanya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada kendala berarti. Rekapitulasi awal sampai pada rapat pleno tingkat kecamatan dapat berjalan dengan lancar. Sangat kecil permasalahan yang muncul. Ini tak lepas berkat ketua dan para komisioner KPU Kota Tomohon yang mendonorkan semangat, pemahaman dan keyakinan dalam memperkuat kami bersama rekan-rekan PPS dan KPPS.

Berbicara terkait partisipasi masyarakat, upaya-upaya dari Komisioner KPU Kota Tomohon patut diacungi jempol. Memberdayakan seluruh sektor untuk terus melaksanakan sosialisasi di tempat-tempat umum, tempat ibadah, acara suka maupun duka sehingga tingkat partisipasi masyarakat wajib pilih kota Tomohon meningkat. Mengimbangi dunia semakin modern, langkah kreatif dari KPU Tomohon menggelar

lomba tik tok, lomba *photo selfie* semua dilaksanakan dan semuanya kesuksesan Pilkada di Kota Tomohon tahun 2020.

Bekerja memang ada manis dan ada pahitnya dan itu merupakan hal yang biasa. Ketika kita menginginkan kesuksesan dan keberhasilan harus ada pengorbanan. Demikian juga yang sudah kami laksanakan pada saat sebagai penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon 2020. Bekerja di bawah tekanan dan motivasi membuat saya merasa bangga bahwa saya mampu melaksanakan tugas tersebut. Keberhasilan kami ini juga tidak lepas dari motivasi yang kuat dari komisioner KPU Kota Tomohon maka tugas saya sebagai PPK boleh terlaksana. Bangga pada diri sendiri, ketika kita mampu melewati setiap tahapan dalam Pilkada tahun 2020 ini. Dengan ini banyak hal-hal baik yang saya petik menjadi anggota PPK Kecamatan Tomohon Barat.

Selain itu kami juga bersyukur memiliki ‘mentor’ komisioner KPU Kota Tomohon yang diperkuat orang-orang ‘super’. Kerja sama tim PPK Tomohon Barat yang apik

sehingga bias menyelesaikan tugas dengan baik. Dari sini saya mendapatkan banyak hal yang bisa saya adopsi dalam tugas dan tanggung jawab saya sehari-hari sebagai Pengawas Sekolah di Kabupaten Minahasa.

Bisa menjadi bagian dari kesuksesan meraih tingkat partisipasi pemilih tertinggi tingkat kota secara nasional ini tentunya akan menggoreskan tinta emas bagi pribadi saya. Menjadi sejarah baru bagi pengalaman saya sebagai anggota penyelenggara demokrasi. Kelelahan dan kesulitan yang dialami selama melaksanakan tugas, terbayar lunas ketika pada akhirnya mendapat prestasi membanggakan. Dengan keberhasilan ini pun membuat saya tetap berkerinduan untuk menjadi PPK pada pemilihan yang akan datang, semoga saja masih diberi kepercayaan. Semua keberhasilan itu juga tak luput berkat pimpinan Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk itu disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua dan semua anggota KPU Kota Tomohon yang sudah memberikan kepercayaan pada saya untuk melaksanakan tugas sebagai anggota PPK Kecamatan Tomohon Barat, dan sudah banyak membimbing kami dalam

melaksanakan tugas sebagai PPK pada pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon 2020.

Tidak lupa kami berterima kasih kepada sekretaris KPU dan para staf sekretariat KPU Kota Tomohon yang banyak membantu kami sebagai penyelenggara. Kepada Ketua PPK dan teman-teman PPK, Sekretaris dan teman-teman sekretariat PPK Tomohon Barat yang sudah boleh bekerja sama dengan saya sejak tahapan-tahapan Pilkada sampai selesai. Juga kepada teman – teman Ketua dan anggota PPS, sekretaris dan sekretariat PPS se Kecamatan Tomohon Barat bahkan pun semua KPPS yang sudah membantu kami dalam suksesnya kegiatan Pilkada Kota Tomohon Tahun 2020.

Tuhan Memberkati Kita Semua.

Perjuangan Hasilkan Daftar Pemilih Tomohon Tengah

Marcelino Montolalu

Anggota PPK Tomohon Tengah

Penyusunan daftar pemilih menjadi bagian krusial pada pemilihan serentak tahun 2020 ditengah situasi pandemi Covid-19. Di dalamnya termasuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon. Dijadwalkan semula pada 23 September 2020, Komisi Pemilihan Umum membuat keputusan untuk menunda pemilihan serentak menjadi 9 Desember 2020. Aturan mengenai pemilihan serentak dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum, termasuk di dalamnya penyusunan daftar pemilih yang mencakup delapan tahapan.

TAHAPAN COKLIT

Tahapan pertama yaitu pencocokan dan penelitian atau Coklit. Divisi Data, Perencanaan dan Informasi KPU memulai tahapan dengan penyusunan daftar pemilih. Sebelumnya, dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dan

diberikan kepada PPS untuk pemetaan TPS. Pada penundaan tahapan pemilihan kali ini, pemetaan TPS dilakukan oleh KPU kabupaten/kota, dan langsung diserahkan kepada Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih atau PPDP di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Untuk Kecamatan Tomohon Tengah, dipetakan menjadi 42 TPS. Berarti akan direkrut 42 PPDP. Hal yang menyulitkan untuk perekrutan PPDP di masa pandemi, sebab mengharuskan masyarakat lebih banyak beraktivitas dari rumah. Walau begitu, proses perekrutan PPDP tetap bergulir. Dan sebelum bertugas periode 15 Juli hingga 13 Agustus 2020, setiap PPDP harus mengikuti rapid test sesuai Peraturan KPU terbaru. PPDP bertugas untuk COKLIT Data Pemilih yang dikirim oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. PPDP harus naik turun rumah warga agar mendapat data yang valid dan berkualitas. Karena itu, setiap PPDP dilengkapi Alat Pelindung Diri.

Walaupun sudah dilengkapi dengan bimbingan teknis sebelum turun lapangan, tak dipungkiri PPDP menemui banyak masalah di lapangan. Cara kerjanya yang

menyambangi setiap rumah warga, membuat khawatir sebagian masyarakat. Seperti tidak mengizinkan PPDP masuk ke dalam rumah, pencoklitan cukup sampai di teras rumah. Jangankan teras rumah, bahkan ada PPDP melakukan pencoklitan dari depan pagar rumah warga. Selain rasa was-was sebagian masyarakat, masalah lain yang dihadapi PPDP yakni terdapat warga yang tidak berada di kediamannya. Padahal, PPDP turun untuk Coklit seturut waktu yang ditentukan. Apalagi, warga yang akan di-Coklit, ternyata bekerja di luar daerah.

Pada kasus seperti ini, PPDP diberi solusi untuk menghubungi warga yang bersangkutan via Daring (Dalam Jaringan). Atau juga via akun media sosial yang bersangkutan supaya bisa memberikan dokumen kependudukan berupa KTP dan Kartu Keluarga. Tapi upaya ini juga sangat berat, sebab ada sejumlah warga yang tidak percaya kepada PPDP. Mereka takut dokumen kependudukannya disalahgunakan. Kasus seperti ini terjadi di sejumlah kelurahan yang ada di Kecamatan Tomohon Tengah. PPDP tak kehilangan akal. Dengan cara menghubungi saudara terdekat dari pemilih

dimaksud. Agar dokumen kependudukannya bisa diperoleh oleh PPDP sehingga dapat didata.

Masalah lain, dokumen kependudukan pemilih bersangkutan hilang dan belum mengurus dokumen baru seperti KTP elektronik. Oleh PPDP, ditindaklanjuti dengan menanyakan sejumlah informasi langsung ke aparat kelurahan setempat atau ke Dinas Dukcapil terkait kepastian dokumen kependudukan dari pemilih tersebut. Selain itu, PPDP juga pernah menemui beberapa pemilih yang menolak untuk di-Coklit secara bersama dalam satu sticker. Dengan alasan sudah berpisah dengan pasangannya tapi belum cerai. Bahkan pemilih tersebut memberontak karena menolak pasangannya berada dalam satu sticker pencoklitan.

PPDP sudah melaksanakan tugasnya dengan mendata pemilih, tetapi kehendak pemilih bersangkutan justru di luar kuasa PPDP. Jalan keluarnya, pasangan pemilih bersangkutan tetap dilakukan pendataan, namun sticker diberikan kepada kepala lingkungan setempat. Supaya ketika ada laporan oleh pemilih bersangkutan bahwa dirinya tidak

didata dalam data pemilih, justru ada bukti proses pencoklitan telah dilakukan.

PPDP juga pernah mendapati adanya pemilih yang saat dilakukan Coklit tapi tidak diketahui keberadaannya. Semua info didapatkan mulai dari kepala lingkungan hingga masyarakat sekitar. Tapi tetap saja tidak ada yang tahu keberadaannya. Karena itu, dilakukan pengecekan terhadap KTP-El milik bersangkutan ke Dinas Dukcapil. Untuk memastikan apakah masih mempunyai dokumen kependudukan alamat setempat, atau sudah mempunyai dokumen kependudukan yang baru.

Masalah klasik lain yang muncul adalah mempertanyakan dokumen kependudukan yang sah dari pemilih dapat dilihat dari aspek mana saja. Jika terdapat dokumen kependudukan yang berbeda, PPDP melihat dokumen kependudukan dengan tahun terbit yang terbaru dan disesuaikan datanya.

Begitu juga kala PPDP dihadapkan dengan pemilih yang berdomisili di kebun. Ini menjadi tantangan bagi PPDP

yang akan melakukan pencoklitan data pemilih. Karena itu, PPDP dibantu PPS dan PPK melakukan pencoklitan di daerah perkebunan. Meski harus melewati medan jalan yang tidak biasanya, PPDP bermodal sepatu boots supaya bisa menjangkau pemilih yang berdomisi di wilayah perkebunan.

Masalah terbesar dan paling ditakuti oleh PPDP yaitu ketika pemilih tersebut telah terkonfirmasi positif Covid-19. PPDP yang dilemma untuk melakukan pencoklitan sementara waktu semakin habis, membuat si PPDP berinisiatif untuk mencoklit via Daring. Kemudian sticker hasil Coklit diletakkan di depan rumah si pemilih tanpa ada kontak fisik. Walau tantangan berat dihadapi, tapi PPDP kita tetap melakukan tugasnya dengan baik untuk mendapatkan hasil maksimal.

GERAKAN COKLIT SERENTAK

Sebuah tahapan yang dibuat oleh KPU Republik Indonesia dalam pelaksanaan data pemilih yaitu Gerakan Coklit Serentak. Digelar pada 18 Juli 2020 di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan ini melibatkan seluruh kalangan

masyarakat, di dalamnya pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun pemilih disabilitas. Gerakan Coklit Serentak ini dibuat dengan protokol kesehatan, agar masyarakat yang akan didata tidak merasa takut. Bahkan mau membuk pintu rumah mereka untuk di-Coklit. Gerakan Coklit Serentak ini juga bagian dari sosialisasi kepada masyarakat bahwa saat itu KPU melalui PPDP sedang melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih berdasarkan dokumen kependudukan.

PPDP bertugas men-Coklit para pejabat di Kota Tomohon. Di dalamnya, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Sekretaris Kota, dan seluruh Kepala Dinas yang berdomisili sesuai dokumen kependudukannya. Dilakukan hal sama terhadap tokoh agama seperti pendeta, pastor, kiai. Yang menarik, PPDP melakukan pencoklitan kepada pemilih disabilitas sebagaimana informasi yang diperoleh terkait domisili para pemilih disabilitas.

TAHAPAN DPHP

Dalam tahapan ini, hasil Coklit oleh PPDP di-rapat plenokan berjenjang di setiap kelurahan hingga kecamatan. Selanjutnya, hasil pleno di tingkat kota akan ditetapkan sebagai DPS (Daftar Pemilih Sementara). Dalam proses menuju pleno DPHP di tiap tingkatannya, terdapat saran dan rekomendasi dari masyarakat dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Seperti adanya beberapa rumah yang tidak ditempel sticker sehingga memunculkan asumsi bahwa pemilih yang berdomisili di tempat tersebut tidak di-Coklit.

Dalam klarifikasinya, PPDP setempat menerangkan bahwa sticker belum ditempelkan karena pemilih sedang isolasi mandiri. Namun, data pemilih tersebut telah dimasukkan dalam daftar pemilih. Sejumlah saran langsung ditindaklanjuti sehingga proses pleno rekapitulasi DPHP di tiap tingkatan, berjalan dengan baik. Kemudian ditetapkan di pleno tingkat kota sebagai Daftar Pemilih Sementara.

UJI PUBLIK

Setelah penetapan DPS, data tersebut dilakukan uji publik. Ditempelkan di tiap Sekretariat PPS dan lokasi yang berpotensi menjadi TPS. Uji Publik dilakukan agar masyarakat yang belum didata oleh PPDP sebelumnya, bisa membawa dokumen kependudukan kepada PPS untuk didaftarkan sebagai daftar pemilih.

Uji Publik dilakukan di tiap tingkatan. Namun keterlibatan masyarakat masih minim. Sehingga uji publik di tingkat PPS dan PPK tidak terdapat tanggapan atau sanggahan. Setelah itu, Penyelenggara Pemilihan mendapat saran dalam hal pemilih ganda. Ditemui sejumlah pemilih ganda dalam setiap elemen dokumen yang ada.

Menindaklanjutinya, dilakukan rapat koordinasi mengenai pemilih ganda antar TPS, antar Kelurahan dan antar Kecamatan. Jika terdapat pemilih ganda, maka akan di-TMS-kan di wilayah yang dokumen kependudukannya tidak di-update lagi.

TAHAPAN DPSHP

Selain dilakukan Uji Publik, KPU juga melakukan perbaikan terhadap data pemilih yang ada. Sejumlah pemilih yang sudah tidak memiliki dokumen kependudukan Kota Tomohon akan di-TMS-kan. Sedangkan pemilih baru yang memiliki dokumen kependudukan Kota Tomohon, akan dimasukkan sebagai pemilih baru. Kali ini, masyarakat merespon Daftar Pemilih Sementara dengan memberikan masukan serta tanggapan kepada Penyelenggara Pemilihan.

Di sini, PPS dan PPK melakukan tugas untuk memutakhirkan kembali daftar pemilih yang sudah ada. Sebelum pelaksanaan rekapan tingkat kecamatan, Panwasku Kecamatan memberikan sejumlah nama untuk ditambahkan dalam daftar pemilih. PPK pada saat itu langsung menindaklanjuti saran tersebut. Satu hari sebelum Pleno Rekapitulasi DPSHP, PPK dan Panwaslu Kecamatan melakukan uji faktual di lapangan terhadap sejumlah nama yang memiliki dokumen kependudukan. Setelah itu diperoleh Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan di rekap tingkat kecamatan.

DPT

Setelah Pleno Rekapitulasi DPSHP di tingkat kecamatan, data pemilih ini diplenokan di tingkat kota dan akan ditetapkan sebagai DPT. Dalam pleno tingkat kota, 91 nama yang berada di Lapas Kolongan Satu dimasukkan sebagai Daftar Pemilih Tetap. Ini membuat DPT untuk Kecamatan Tomohon Tengah ditetapkan menjadi 14.311. Dalam hal Uji Publik DPT kepada masyarakat, menjadi pertanyaan bagi masyarakat Kolongan Satu khususnya TPS 3. Sebab, pada DPT sebelumnya berjumlah 367 pemilih telah menjadi 458 pemilih.

PPS menjelaskan bahwa pemilih yang berada di Lapas Kolongan Satu ditetapkan sebagai DPT, tapi akan memilih sesuai dokumen kependudukan asal. Tidak semua dari 91 nama tersebut akan mendapat dua kertas suara. DPT ditempelkan di Sekretariat PPS dan setiap tempat yang berpotensi menjadi TPS. Dengan durasi hingga 6 Desember 2020, atau sebelum masa tenang.

DPTb

Sejumlah masyarakat yang baru menyelesaikan dokumen kependudukannya bertanya-tanya. Bagaimana jika belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap, akankah bisa menggunakan hak pilihnya? Tentu saja bisa. Sebab penyelenggara pemilihan tetap menjaga hak pilih setiap masyarakat yang sudah mempunyai dokumen kependudukan setempat. Pemilih tersebut datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya di atas jam 12 siang, sambil membawa dokumen kependudukan seperti KTP-El.

Dengan catatan, pemilih tersebut belum terdaftar pada DPT di kabupaten/kota lain. Pemilih tersebut akan dimasukkan dalam kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Khusus di Kecamatan Tomohon Tengah, ada sebanyak 195 pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-El.

DPPh

Pemilih yang tidak bisa berada di lokasi TPS pada saat hari pemilihan, bisa menggunakan hak suaranya dengan

menggunakan Form A5 atau sebagai Pemilih Pindahan. Pemilih yang memiliki Form A5 dan hanya akan memilih dalam satu wilayah Kota, seperti contoh sedang sakit dan berada di rumah sakit, maka pemilih tersebut akan mendapatkan 2 surat suara. Jika pemilih yang karena tugas dan kesibukannya berada di luar daerah tetapi masih dalam wilayah provinsi yang sama, maka pemilih tersebut akan mendapatkan 1 surat suara.

Sepenggal Kisah, Masuk Catatan Sejarah Pilkada

Irne Mandang

Anggota PPK Tomohon Tengah

Baru saja kita menyelesaikan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, Rabu 9 Desember. Terdapat 270 daerah yang ikut menyelenggarakan pesta demokrasi, dengan penjabarannya sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia. Banyak yang hanya memperhatikan bagaimana suasana kontestasi tersebut. Hiruk-pikuk para pendukung yang menjalankan peran guna menjual kandidatnya. Apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan para kontestan, bahkan tidak jarang juga kita mendengar faktor-faktor penyebab kekalahan maupun kemenangan diperbincangkan baik lewat dunia maya hingga perbincangan rumah kopi.

Rasanya tidak berimbang, ketika peran para pejuang demokrasi yang bertugas mengorbankan segala kepentingan pribadi sehingga tahapan demi tahapan kontestasi politik paling bergengsi ini hanya dianggap seakan terabaikan

sehingga kurang hangat dibicarakan. Padahal, tanpa kerja keras penyelenggara yang terstruktur, pesta demokrasi ini tidak akan berjalan maksimal.

Bila diberi kesempatan, ijin kan kami mengisahkan sepenggal perjalanan yang kami lalui kala bertindak selaku penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang bertugas di tengah pandemi. Jauh hari sebelum pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merekrut sejumlah penyelenggara pemilu Adhoc. Penyelenggara itu terdiri dari panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) tingkat desa/kelurahan, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) tingkat TPS.

Tomohon yang menjadi salah satu kota di Indonesia yang ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 dengan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon, berhasil mencatatkan sejarah.

Menjadi bagian dari catatan sejarah Pilkada serentak 2020 ini menjadi kebanggan tersendiri bagi saya. Penggalan

kisah ini bermula, etika pertama kali ikut dalam antrian pendaftaran calon anggota PPK, tidak pernah terbayangkan akan bekerja pada masa yang serba sulit. Sebelumnya ketika menjadi penyelenggara pada Pemilihan Presiden dan wakil Presiden serta Legislatif di tahun 2019 juga memiliki sensasi berbeda, karena tahapan-tahapan yang cukup melelahkan terutama menyangkut data pemilih, sampai ketika pemilu dilaksanakan 17 April 2019. Belum lagi dengan banyaknya jumlah kotak suara sehingga proses rekapan menjadi sangat melelahkan.

Hal ini masih berdampak, ketika diajak untuk ikut lagi sebagai penyelenggara sempat ada keraguan. Kemudian berpikir bahwa pemilihan kepala daerah hanya akan ada 2 kotak suara saja. Akhirnya memutuskan untuk ikut dalam seleksi PPK Kota Tomohon untuk Pilkada 2020, berhasil lolos hingga dilantik 28 Februari 2020. Siapa yang mampu menerawang, akan ada kejadian besar yang terjadi sehingga mengubah banyak hal di semua aspek kehidupan,

Corona Virus Disease- 19 (Covid-19) akhirnya sampai juga di Indonesia, Sulawesi Utara dan juga Kota Tomohon.

Imbasnya juga terhadap penyelenggara Pilkada 2020. Sempat dihentikan sementara proses tahapan Pilkada 2020, tetapi kemudian diaktifkan kembali dengan menjalankan protokol kesehatan yang sangat ketat, tak terkecuali bagi kami PPK. Ketika diaktifkan kembali di bulan Juni 2020, kami diwajibkan untuk melakukan Rapid test sebelum kembali bertugas. Rasa khawatir dan takut muncul, tapi mau tidak mau tapi wajib (sampai tekanan darah naik saking gugupnya). Di sinilah permulaan laku-liku penyelenggara Pilkada 2020.

Tahapan-tahapan Pemilihan kepala daerah mulai dijalani dengan dinamika tersendiri. Ketika perekrutan mulai dari PPDP sampai kepada KPPS yang semuanya harus dilakukan dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Calon anggota Adhoc yang sudah menyatakan diri bersedia akhirnya mundur karena tidak siap untuk ikut rapid maupun swab test, ataupun yang bersedia namun terganjal dengan hasil tes positif. Teman-teman penyelenggara yang entah sengaja atau tidak terlibat dalam euforia kampanye. Membuat kami dengan berat hati harus mengambil keputusan untuk mengganti teman-teman penyelenggara sampai akhirnya di hari pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ada TPS yang

hanya berisikan 6 orang petugas, bukan karena terkonfirmasi COVID-19 tetapi karena kedapatan tidak netral dalam bertugas. Pada saat penyusunan daftar pemilih, walaupun sudah ada petugas PPDP yang melakukan pencocokan dan penelitian terhadap data pemilih, ternyata masih banyak anggota pemilih yang sempat terlewatkan sehingga kami harus turun tangan langsung mengecek data pemilih di kelurahan-kelurahan yang masuk wilayah kami. Semua dilakukan dengan perasaan was-was, karena peningkatan kasus Covid-19 di kota Tomohon terus terjadi.

Bekerja di masa mewabahnya Covid-19 tantangannya adalah kami tidak pernah tahu siapa yang kami temui apakah positif atau negatif, jadi masker, handsanitizer menjadi barang wajib yang tidak boleh lalai. Sudah bisa dibayangkan bekerja dengan masker yang hampir seharian menutup muka, susah bernapas, tidak bebas dan jerawat muncul.

Belum lagi ketika teman-teman yang mungkin karena kesibukan mereka sehingga menunda-nunda pekerjaan yang terkait pilkada sehingga membuat kami PPK mendapat tekanan keras dari KPU. Seakan pekerjaan Pilkada ini

menjadi makin sulit saja. Rasanya makin sulit lagi ketika anggota PPS yang tidak bisa ditegur, atau diarahkan terkait tugas dan kerja mereka, dengan dalih pekerjaan. Manalagi masalah-masalah internal PPK dan PPS yang kadang kala membuat frustrasi, sehingga sempat terpikir untuk mundur.

Dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di detik-detik terakhir masih diperhadapkan dengan persoalan lokasi TPS yang agak sulit karena ukuran yang ditetapkan supaya memenuhi standart protocol kesehatan. Sehingga ada beberapa TPS yang harus pindah, bahkan sehari sebelum hari pencoblosan. Kami harus survei dan monitoring lokasi TPS hingga subuh. Tidak hanya itu, pada klimaksnya 9 Desember wajib memastikan TPS aman dan sesuai yang ditetapkan terlebih bebas dari intrvensi pihak manapun.

Pada akhirnya semua bisa terselenggara dengan baik dan hampir tanpa kendala yang berarti di TPS, baik dari penyelenggara, peserta pemilihan maupun pemilih. Khusus untuk Tomohon Tengah bersyukur sampai akhir tahapan rekapitulasi tidak ditemui KPPS, PPS dan PPK yang sakit apalagi sampai terkonfirmasi Covid-19.

Sukses Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Kota Tomohon menjadi kebanggan juga bagi kami penyelenggara khususnya PPK Tomohon Tengah karena kami kembali meraih prestasi sebagai PPK terbaik. Dan itu tidak terlepas dari kerja sama semua yang terlibat. Persaudaraan yang terjalin dari kerja tim ini juga menjadi kisah yang menyenangkan dan tentu membahagiakan. Terima kasih kepada KPU Kota Tomohon atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk menjadi penyelenggara Pilkada Kota Tomohon 2020. Pengalaman yang tak akan terlupakan dalam hidup, menjadi kebanggan yang akan diceritakan kepada generasi berikutnya.

BAGIAN 4

KATA MEREKA SOAL PILKADA

KATA MEREKA SOAL PILKADA

Jefifani Mawei

Sekretaris Partai Nasdem Tomohon

Partai Nasdem Kota Tomohon mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara Pemilu, terutama KPU Kota Tomohon, Bawaslu, serta aparat keamanan. Pesta demokrasi lima tahunan di Kota Tomohon terbilang rawan konflik akibat derasnya kepentingan politik. Namun berkat dukungan semua pihak, jalannya Pilkada di Tomohon berlangsung aman dan damai. Suatu kebanggaan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilwako di Kota Tomohon yang paling tinggi tingkat kota se-Indonesia. Ini berkat sosialisasi dari penyelenggara yaitu KPU Tomohon dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, juga untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik di Tomohon.

Fischer Mangundap

Ketua Partai Hanura Tomohon

Tahun 2020 mengukir kisah teramat penting dalam kematangan politik bagi masyarakat Kota Tomohon. Gelaran Pilkada 2020 tak hanya sebuah kompetisi sehat. Tapi catatan penting untuk masa depan kota tercinta.

Miky J. L. Wenur

Ketua Partai Golkar Tomohon

Partai Golkar menilai Pilkada Kota Tomohon berlangsung sukses. Kesuksesan dicapai tidak lepas karena tuntunan Tuhan Yang Maha Pengasih disertai komitmen kuat dari para pihak yakni KPUD, Bawaslu, pemerintah, aparat keamanan, tokoh-tokoh masyarakat dan agama, insan pers, partai politik, calon wali kota dan wakil wali kota bersama tim pemenangannya. Bahkan secara khusus, Partai Golkar Kota Tomohon memberikan apresiasi yang tinggi atas partisipasi aktif dari elemen masyarakat. Meski berbeda partai dan calon, tetapi senantiasa mengedepankan persatuan, kesatuan, keamanan dan kedamaian. Dengan tekad yang

sama untuk Tomohon lebih maju, baik kota maupun warganya mencapai kesejahteraan. Suatu kebanggaan tersendiri juga karena partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada di Kota Tomohon adalah tertinggi di Indonesia.

Jhonny Runtuwene

Bendahara PDI Perjuangan Tomohon

Sanutu'tul wanengka wangunen, leos lampangan.

Ferdinand Mono Turang

Ketua DPC Partai Gerindra Tomohon

Pelaksanaan Pilkada 2020 berlangsung sukses berkat peran seluruh komponen masyarakat Kota Tomohon. Hal tersebut tidak lepas juga dari peran KPU dan Bawaslu yang berpedoman pada Pemilu berintegritas. Yang terpenting adalah bagaimana hasil proses demokrasi nantinya akan membawa dampak pada kesejahteraan masyarakat, karena itulah nilai yang sesungguhnya.

Jilly Gabriella Eman

Kontestan

Apresiasi kepada KPU atas terselenggaranya Pilkada tahun 2020 dengan sangat baik dan sesuai dengan protokol kesehatan. Walaupun awalnya Pilkada di tengah pandemi menuai kontroversi, tapi berhasilnya penyelenggaraan Pilkada ini membuktikan kapabilitas KPU terlebih khusus KPU Tomohon dalam menjalankan tugas di tengah menghadapi tantangan pandemi ini. Penyelenggaraan Pilkada terbilang sukses tahapan per tahapan. Dan menjadi standar yang harus dipertahankan untuk KPU menghadapi Pemilu berikutnya. Ke depan, KPU akan menghadapi pemilihan serentak dan ini menjadi tantangan baru untuk KPU dalam mempertahankan kredibilitasnya, tapi saya masih optimis pasti KPU akan bisa menjalankan itu. Terima Kasih KPU.

Caroll J. A. Senduk

Kontestan

Terima kasih yang setinggi-tingginya bagi masyarakat Kota Tomohon yang telah berpartisipasi dalam Pilkada sehingga boleh mencapai angka partisipasi pemilih yang tinggi untuk Kota Tomohon. Terima kasih juga kepada penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu dan pihak TNI/Polri sehingga proses Pilkada dapat berjalan baik dan menghasilkan pemimpin Kota Tomohon.

Wenny Lumentut

Kontestan

Pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang dilaksanakan oleh KPU Tomohon sangat baik kinerjanya.

Robert Pelealu & Franciskus S. Soekirno

Kontestan

Paslon perseorangan ROSE mengapresiasi KPU Tomohon dan jajarannya atas tahapan Pilkada yang telah berjalan aman dan damai. Semoga KPU Tomohon dan jajarannya dapat menjadi contoh untuk generasi selanjutnya.

Ardy Kalumata

Jurnalis

Pelaksanaan Pilkada Tomohon tahun 2020 telah berjalan dengan baik. Kendati berada di tengah pandemi Covid-19 namun para pemilih antusias menggunakan hak pilihnya di TPS. Alhasil, Kota Tomohon menjadi salah satu daerah tertinggi prosentase partisipasi pemilihnya. Ini tak lepas dari terjalannya kerja sama yang baik antara penyelenggara dengan pemilih dibuktikan dengan tahapan yang berjalan dengan baik. Sosialisasi pun berjalan dengan baik.

Ivana Palit

Jurnalis

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon tahun 2020 berjalan dengan sukses. Mulai dari tahapan sampai pada penetapan pemenang Pilkada 2020. Apresiasi tentunya diberikan kepada penyelenggara Pilkada mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tomohon, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tomohon, Pemerintah Kota Tomohon, TNI/POLRI serta masyarakat yang turut menyukseskan hajatan pesta demokrasi lima tahunan. Awalnya, pelaksanaan Pilkada tahun 2020 menuai pro dan kontra akibat pandemi Covid-19. Bahkan ada ketakutan bahwa banyak pemilih yang tidak akan memilih karena masih tingginya angka terkonfirmasi positif Covid-19 di tengah masyarakat. Namun hal tersebut tidak terjadi di Kota Tomohon. Pasalnya, capaian tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya untuk Pilkada Tomohon dengan prosentase 91,37 persen, sementara untuk Pilkada Sulut di Tomohon dengan prosentase 91,53 persen. Angka partisipasi masyarakat dalam

Pilkada tinggi, berarti ada tingkat kepercayaan kepada penyelenggaraan tahapan Pilkada. Penyelenggara Pilkada berhasil meyakinkan masyarakat bahwa tahapan ini aman karena menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Komisioner KPU Tomohon sampai tenaga adhoc yang bertugas pun diwajibkan ikut swab test dan rapid test. Setiap ada pertemuan baik dengan calon Kepala Daerah, LO, media, ataupun pihak-pihak yang terkait dengan Pilkada, pesertanya dibatasi, diwajibkan mengenakan masker, cuci tangan dengan sabun di air mengalir, tes suhu tubuh, jaga jarak, serta aturan pencegahan penyebaran covid-19. Teknologi memang sangat membantu penyelenggara dalam mencegah terjadinya kerumunan, yakni sejumlah tahapan disiarkan melalui *live streaming* melalui media sosial KPU Tomohon. Pastinya, sebagai bagian dari media, sangat puas dengan kinerja dari KPU Tomohon dan semua pihak yang bersinergi menyukseskan jalannya Pilkada yang sehat dan sukses menghadirkan pemimpin baru di Kota Tomohon.

bingkai

Pilkada

KPU TOMOHON







DAFTAR PUSTAKA

Kasali, Rhenald. 2017. Disruption: Menghadapi Lawan-Lawan Tak Kelihatan dalam Peradaban Uber". Jakarta. Gramedia

Tarumingkeng, Rudi dan Chandra Suwondo. 2019. Kreativitas & Inovasi Kunci Kesuksesan. Jakarta. Gramedia

Widjaja, Yani dan Widi Winarso:. 2019. Bisnis Kreativitas dan Inovasi. Yayasan Barcode. Bandung

Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi). Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press

Kompas.com – 09/12/2020, Ada 22 Daerah Zona Merah yang Gelar Pilkada Serentak 2020, Mana Saja?

<https://manado.tribunnews.com/2020/12/09/bawaslu-ada-petugas-kpps-di-tomohon-positif-covid-19-tetap-bertugas>